

2023



**PEMERINTAH
KABUPATEN KUDUS**

**Laporan
Kinerja
Instansi
Pemerintah
Tahun 2023**

**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUDUS**

TAHUN 2023

Jl. R.Agil Kusumadya No. 44 Kode Pos 59343

Telp. (0291) 435111, Fax. (0291) 435594

Email : dprd@kuduskab.go.id

FB : [Dprd KabupatenKudus](#)

Instagram : [dprd.kudus](#)

Twitter : [@DPRD_Kudus](#)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
KATA PENGANTAR	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum Sekretariat DPRD.....	2
1.3 Permasalahan Utama	6
1.5 Sistematika Penulisan	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis	7
2.2 Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	18
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	48
3.3 Permasalahan yang Dihadapi	55
3.4 Rencana Tindak Lanjut	55
3.5 Akuntabilitas Keuangan	56
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	72
4.2 Saran	73

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja

Laporan Evaluasi Renja

Rencana Kerja Tahunan Tahun 2023

Pengukuran Tujuan, Sasaran dan Indikator Utama Tahun 2023

Realisasi Program Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2023

Realisasi Indikator dan Anggaran Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023

Laporan Realisasi Anggaran

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Sumber Daya Manusia Per Desember 2023..... 3
Tabel 1.2	Daftar Aset Yang Dimiliki Per Desember 2023..... 3
Tabel 1.3	Jenis Sistem/Aplikasi per Desember 2023..... 6
Tabel 2.1	Urusan dan Program Sekretariat DPRD..... 10
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Sekretaris DPRD Tahun 2023..... 13
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD Tahun 2023..... 14
Tabel 2.4	Program dan Anggaran Berdasarkan PK Sekretaris DPRD..... 14
Tabel 2.5	Kegiatan dan Indikator Kinerja Berdasarkan PK Eselon III dan IV..... 14
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2023..... 19
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2020,Tahun 2021, 2022 dan Tahun 2023 20
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Sasaran Dibandingkan dengan Target Akhir Renstra..... 20
Tabel 3.4	Capaian Kinerja Program Tahun 2023 22
Tabel 3.5	Capaian Kinerja Program Tahun 2020,Tahun 2021, 2022 dan Tahun 2023 23
Tabel 3.6	Capaian Kinerja Program Dibandingkan dengan Target Akhir Renstra..... 24
Tabel 3.7	Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2023 25
Tabel 3.8	Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2020,Tahun 2021, 2022 dan Tahun 2023 27
Tabel 3.9	Capaian Kinerja Kegiatan Dibandingkan dengan Target Akhir Renstra..... 30
Tabel 3.10	Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2023 34
Tabel 3.11	Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2020,Tahun 2021, 2022 dan Tahun 2023 38
Tabel 3.12	Capaian Kinerja Kegiatan Dibandingkan dengan Target Akhir Renstra..... 44
Tabel 3.13	Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Sasaran Tahun 2023..... 56
Tabel 3.14	Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2023..... 57
Tabel 3.15	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2023..... 66

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Kudus, Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi .

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2023, Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Rencana Strategis Perubahan Tahun 2023 serta Rencana Kerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Kudus, Januari 2024

Sekretaris DPRD Kabupaten Kudus



Drs. AGUS BUDI SATRIYO, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 196408251986031029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat DPRD mempunyai urusan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja , Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan Pelaporan Kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Fungsi Laporan Kinerja :

1. Media hubungan kerja organisasi
2. Media akuntabilitas
3. Media informasi umpan balik perbaikan kinerja

4. Media informasi penilaian keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanahkan.

1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Peraturan Bupati Kudus Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus

1.2.1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD

- Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, rapat DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

1.2.2. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus

Sesuai dengan Peraturan Bupati tersebut Susunan organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :

- a. SEKRETARIS DPRD
- b. KEPALA BAGIAN UMUM DAN HUMAS :
 1. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan
 2. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
 3. Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
- c. KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN :
 1. Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
- d. KEPALA BAGIAN KEUANGAN :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran
 2. Sub Bagian Akuntansi dan Perbendaharaan

1.2.3 Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus didukung oleh sumber daya manusia dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah Pegawai sebanyak 27 orang, terdiri dari ASN sebanyak 26 orang ,

PHD sebanyak 1 orang, dengan rincian sesuai Tabel 1.1 Sumber Daya Manusia Per Desember 2023

Tabel 1.1
Sumber Daya Manusia Per Desember 2023

NO	Jabatan	Jumlah
	Sekretaris DPRD	1 Orang
	Kepala Bagian	3 Orang
	Kepala Subbagian	4 Orang
	Analisis Kebijakan Ahli Muda/Muda	2 Orang
	Staf	16 Orang
	PHD	1 Orang
	Jumlah	27 Orang

1.2.4 Sarana dan Prasarana Sekretariat DPRD

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus tersedia sarana dan prasarana sebagai Tabel 1.2 Daftar Aset Yang Dimiliki Per Desember 2023 dan Tabel 1.3 Jenis Sistem/Aplikasi Per Desember 2023 sebagai berikut :

Tabel 1.2
Daftar Aset Yang Dimiliki Per desember 2023

No	Kode Barang	Nama Barang	Jml
1	01.01.03.13.003	Tanah Lapangan Taman lainnya	1
2	02.01.03.04.003	Stationary Generating Set	2
3	02.01.03.05.010	Pompa Air	3
4	02.01.03.12.020	Selang Air	1
5	02.01.03.16.001	alat bantu lainnya lainnya (dst)	2
6	02.02.01.01.003	Station Wagon	9
7	02.02.01.04.001	Sepeda Motor	17
8	02.02.01.04.002	Scooter	6
9	02.02.02.01.001	Gerobak Tarik	3
10	02.02.02.01.002	Gerobak Dorong	6
11	02.02.02.04.001	alat angkutan darat tak bemotor lainnya (dst)	1
12	02.03.02.07.003	Bor	1
13	02.03.02.12.028	Mesin Bor Listrik Tangan	1
14	02.05.01.03.007	Mesin Fotocopy Folio	2
15	02.05.01.03.011	Mesin Fotocopy Lainnya	1
16	02.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	4
17	02.05.01.04.002	Lemari Kayu	15
18	02.05.01.04.003	Rak Besi	22
19	02.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	44
20	02.05.01.04.007	Brandkas	1
21	02.05.01.04.026	Lemari Sorok	42
22	02.05.01.04.027	Lemari Kaca	2
23	02.05.01.05.002	CCTV - Camera Control Television System	32

24	02.05.01.05.003	Papan Visual/Papan Nama	62
25	02.05.01.05.009	Peta	1
26	02.05.01.05.010	Alat Penghancur Kertas	7
27	02.05.01.05.019	Alat Pemotong Kertas	1
28	02.05.01.05.020	Headmachine Besar	1
29	02.05.01.05.034	Display	1
30	02.05.01.05.078	Papan Tulis	4
31	02.05.01.05.088	Alat Kantor Lainnya	60
32	02.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	35
33	02.05.02.01.008	Meja Rapat	216
34	02.05.02.01.010	Tempat Tidur Kayu	3
35	02.05.02.01.013	Meja Podium	2
36	02.05.02.01.014	Meja Resepsionis	1
37	02.05.02.01.016	Meja Tambahan	2
38	02.05.02.01.018	Meja Bundar	7
39	02.05.02.01.024	Meja 1/2 Biro	33
40	02.05.02.01.025	Kasur/Spring Bed	1
41	02.05.02.01.030	Kursi Rapat	209
42	02.05.02.01.031	Kursi Tamu	75
43	02.05.02.01.032	Kursi Putar	162
44	02.05.02.01.033	Kursi Biasa	92
45	02.05.02.01.036	Kursi Lipat	275
46	02.05.02.01.048	Sofa	14
47	02.05.02.01.050	Meubeleur lainnya	3
48	02.05.02.03.001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	2
49	02.05.02.03.002	Mesin Pel/Poles	1
50	02.05.02.03.003	Mesin Pemotong Rumput	2
51	02.05.02.04.001	Lemari Es	13
52	02.05.02.04.003	A.C. Window	12
53	02.05.02.04.004	A.C. Split	145
54	02.05.02.04.006	Kipas Angin	16
55	02.05.02.05.001	Kompor Listrik (Alat Dapur)	2
56	02.05.02.05.002	Kompor Gas (Alat Dapur)	2
57	02.05.02.05.005	Rice Cooker (Alat Dapur)	73
58	02.05.02.05.007	Rice Warmer	24
59	02.05.02.05.019	Mixer	1
60	02.05.02.05.025	Thermos Air	3
61	02.05.02.06.002	Televisi	61
62	02.05.02.06.004	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya/ Home Use)	1
63	02.05.02.06.005	Amplifier	12
64	02.05.02.06.006	Equalizer	2
65	02.05.02.06.007	Loudspeaker	7
66	02.05.02.06.008	Sound System	5
67	02.05.02.06.013	Megaphone	1
68	02.05.02.06.014	Microphone	10
69	02.05.02.06.015	Microphone Floor Stand	1
70	02.05.02.06.016	Microphone Table Stand	97
71	02.05.02.06.017	Mic Conference	2
72	02.05.02.06.018	Unit Power Supply	4
73	02.05.02.06.028	Lambang Garuda Pancasila	11
74	02.05.02.06.031	Aquarium (Alat Rumah Tangga Lainnya/Home	1

		Use)	
75	02.05.02.06.036	Tangga Aluminium	2
76	02.05.02.06.037	Kaca Hias	8
77	02.05.02.06.038	Dispenser	9
78	02.05.02.06.039	Mimbar/Podium	1
79	02.05.02.06.047	Coffee Maker	2
80	02.05.02.06.048	Handy Cam	1
81	02.05.02.06.057	Karpet	5
82	02.05.02.06.059	Gordyin/Kray	1
83	02.05.02.06.069	Lampu	6
84	02.05.02.06.075	Tangki Air	2
85	02.05.02.06.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	94
86	02.05.02.07.001	Alat Pemadam/Portable	59
87	02.05.03.01.003	Meja Kerja Ketua/Wakil Ketua DPRD	10
88	02.05.03.01.004	Meja Kerja Pejabat Eselon II	44
89	02.05.03.01.009	Meja Kerja Pejabat lain-lain	60
90	02.05.03.02.003	Meja Rapat Ketua/Wakil Ketua DPRD	1
91	02.05.03.02.004	Meja Rapat Pejabat Eselon II	1
92	02.05.03.02.011	Meja Tamu Biasa	24
93	02.05.03.03.002	Kursi Kerja Pejabat Eselon I/Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota	6
94	02.05.03.03.003	Kursi Kerja Ketua/Wakil Ketua DPRD	10
95	02.05.03.03.004	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	144
96	02.05.03.03.007	Kursi Kerja Pejabat Eselon V	33
97	02.05.03.04.004	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	3
98	02.05.03.06.003	Kursi Tamu di Ruangan Ketua/Wakil Ketua DPRD	6
99	02.05.03.07.004	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon II	3
100	02.05.03.07.006	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	4
101	02.05.03.07.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	13
102	02.05.03.07.008	Buffet Kayu	3
103	02.06.01.01.075	Digital Audio Taperecorder	4
104	02.06.01.01.096	peralatan studio audio lainnya (dst)	1
105	02.06.01.02.003	Camera Electronic	8
106	02.06.01.02.045	Tripod Camera	1
107	02.06.01.02.061	Lensa Kamera	3
108	02.06.01.02.130	Video Conference	2
109	02.06.01.02.164	Alat Studio Video Lainnya	1
110	02.06.01.06.001	Alat Studio Lainnya	5
111	02.06.02.01.001	Telephone (PABX)	1
112	02.06.02.01.003	Pesawat Telephone	2
113	02.06.02.01.006	Handy Talky (HT)	16
114	02.06.03.22.001	Dehumidifier (Humidity Control)	1
115	02.10.01.02.001	P.C Unit	12
116	02.10.01.02.002	Lap Top / NoteBook	50
117	02.10.01.02.003	Note Book	18
118	02.10.01.02.009	Tablet PC	4
119	02.10.02.02.009	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	1
120	02.10.02.03.002	Monitor	1
121	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	47
122	02.10.02.03.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	7
123	02.10.02.03.017	External/ Portable Hardisk	20

124	02.10.02.04.003	Hub	1
125	02.10.02.04.023	Wireless Access Point	2
126	02.10.02.04.033	Peralatan Jaringan lainnya	2
127	02.18.01.02.003	Rambu Cermin	4
128	02.18.01.03.001	Rambu-rambu Lalin Darat lainnya	9
129	03.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3
130	03.01.01.01.005	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	4
131	03.01.01.02.001	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1
132	03.01.01.08.001	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	2
133	03.01.01.13.001	Gedung Pos Jaga Permanen	1
134	03.01.01.14.001	Gedung Garasi/Pool Permanen	2
135	03.01.01.14.002	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	1
136	03.01.01.30.005	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	1
137	03.01.01.32.001	Bangunan Tempat Parkir	1
138	03.01.01.37.001	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	1
139	03.01.02.02.001	Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	3
140	04.04.02.03.001	Jaringan listrik lainnya	1
141	04.04.03.01.004	Jaringan Telepon Di atas Tanah Lain-lain	1
142	05.01.01.04.005	Buku (Aset Tetap Lainnya)	1234

Tabel 1.3
Jenis Sistem/Aplikasi Per Desember 2023

No.	Jenis Aplikasi/Sistem	Keterangan
1.	https://s.id/tamudprdkudus	Inovasi Fasilitasi Tamu DPRD, Pelayanan Tamu Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), Tamu Kunjungan Kerja

1.3 Permasalahan Utama

Permasalahan utama yang dihadapi :

- a. Belum optimalnya kompetensi SDM Legislasi
- b. Kurangnya konsistensi terhadap rencana kerja DPRD yang disahkan
- c. Keterlambatan pengajuan pembahasan produk DPRD
- d. Belum Optimalnya Penyerapan Aspirasi dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
- e. Belum Optimalnya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
- f. Belum optimalnya Penyelesaian Pendampingan Kode Etik DPRD

1.4 Sistematika Penulisan LKjIP

Sesuai Permenpan no. 53 tahun 2014, sistematika format laporan kinerja sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

- 1.2 Gambaran Umum Perangkat Daerah
 - 1.2.1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah
 - 1.2.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah
 - 1.2.3 Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah
 - 1.2.4 Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah
- 1.3 Permasalahan Utama (Strategic Issued)
- 1.4 Sistematika Penulisan LKjIP

BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

- 2.1 Rencana Strategis Perangkat Daerah
 - 2.1.1 Tujuan Perangkat Daerah
 - 2.1.2 Sasaran Perangkat Daerah
 - 2.1.3 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Perangkat Daerah
- 2.2 Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
 - 3.1.1. Capaian Kinerja Sasaran
 - 3.1.2. Capaian Kinerja Program
 - 3.1.3. Capaian Kinerja Kegiatan
 - 3.1.4. Capaian Kinerja Sub Kegiatan
- 3.2 Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja
- 3.3 Permasalahan Yang Dihadapi
- 3.4 Rencana Tindak Lanjut
- 3.5 Akuntabilitas Keuangan
 - A. Target Dan Realisasi Pendapatan
 - B. Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja
 - C. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)

BAB IV PENUTUP

- 4.1 Kesimpulan
- 4.2 Saran

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Perangkat Daerah

2.1.1 Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah merupakan pernyataan tentang sesuatu yang ingin dicapai oleh setiap Perangkat Daerah dalam suatu periode tertentu. Tujuan dirumuskan secara spesifik dan realistis, serta harus dapat menjawab atau memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis setiap Perangkat Daerah. Tujuan Perangkat Daerah harus dapat menggambarkan fungsi pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Isu yang telah didapat sebelumnya adalah menyangkut tentang pelayanan dan tugas Sekretariat DPRD dalam memberikan dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh karena itu kualitas sumber daya manusia Sekretariat DPRD dan aspek intelektual, administrasi dan managerial menjadi hal yang sangat strategis dalam menjawab kebutuhan pelayanan publik tersebut.

Dengan demikian tujuan yang akan dicapai oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus Tahun 2024 – 2026 :

1. Meningkatnya Kinerja Lembaga DPRD Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang sesuai dengan Tuntutan dan Harapan Masyarakat
2. Terwujudnya Tata Kelola Perangkat Daerah Yang Baik

2.1.2 Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran Perangkat Daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara teratur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Perumusan sasaran memperhatikan pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, serta mendasarkan pada tugas dan fungsi Perangkat Daerah atau kelompok sasaran yang dilayani, dan profil pelayanan.

Sasaran Perangkat Daerah yang ditetapkan merupakan sasaran pada level OPD (eselon II), yang akan dijabarkan dalam program dan kegiatan. Adapun indikator kinerja sasaran yang digunakan merupakan medium term outcome atau outcome untuk jangka menengah.

Sasaran yang akan dicapai berdasarkan tujuan sebagaimana tersebut adalah:

1. Meningkatnya Kapasitas Lembaga DPRD Dalam Menyusun Peraturan Daerah ;
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

2.1.3 Strategi, Arah Kebijakan, Dan Program Sekretariat DPRD

Strategi dan kebijakan jangka menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus menunjukkan bagaimana cara Sekretariat DPRD target kinerja hasil (outcome) program prioritas Rencana Pembangunan Daerah yang menjadi tugas dan fungsi dari Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif.

Sekretariat DPRD masuk dalam Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, di mana perumusan strategi, arah kebijakan dan program dituangkan dalam tabel 2.1

Tabel 2.1

Urusan dan Program Sekretariat DPRD

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan
Meningkatkan Penyelenggaraan Reformasi Biokrasi	Persentase jumlah ranperda yang disahkan dari jumlah ranperda yang dibahas	Meningkatnya kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Optimalisasi Pelayanan Sekretariat DPRD dalam mendukung pencapaian target Rencana Kerja DPRD	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan Kapasitas DPRD dan Dukungan Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan DPRD Peningkatan Dukungan Rapat dan Persidangan DPRD Peningkatan Pelayanan Penyusunan dan Kajian Produk DPRD Peningkatan Layanan Kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Peningkatan Penyelesaian Pendampingan Kode Etik DPRD 	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	<ol style="list-style-type: none"> Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Pembahasan Kebijakan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Peningkatan Kapasitas DPRD Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD Fasilitasi Tugas DPRD

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan
Meningkatkan Penyelenggaraan Reformasi Biokrasi			Peningkatan kualitas kinerja kesekretariatan, sarana prasarana dan pelaporan dokumen keuangan dan perencanaan Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Layanan Administrasi dan Keuangan DPRD Peningkatan Pelayanan Penyusunan Program, dan Pelaporan Kinerja Peningkatan Pelayanan Administrasi Kesekretariatan Peningkatan Pelayanan Sarana Prasarana Perkantoran dan Rumah Tangga Peningkatan SDM Pegawai 	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none"> Perencanaan. Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Layanan Administrasi DPRD

2.2 Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Perencanaan Kinerja merupakan dasar dari pelaksanaan kegiatan yang diwujudkan dalam Perjanjian Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dimana Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Sekretaris DPRD Kabupaten Kudus Tahun 2023 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Kudus untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini.

Agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di masa mendatang dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang matang. Perencanaan yang disusun tentunya harus

mempertimbangkan keadaan yang ada dan memprediksikan keadaan yang akan datang.

Mengacu pada visi Kabupaten Kudus tahun 2018 – 2023 yaitu
 “ KUDUS BANGKIT MENUJU KABUPATEN MODERN, RELIGIUS, CERDAS DAN SEJAHTERA”

serta misinya yaitu :

1. Mewujudkan masyarakat Kudus yang berkualitas, kreatif, inovatif dengan memanfaatkan teknologi dan multimedia;
2. Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik;
3. Mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif;
4. Memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang berdaya saing;

Untuk Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus mengacu pada **misi ke dua** yaitu “ Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik ”.

Maka **tujuan** yang ditetapkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus adalah “ Meningkatkan penyelenggaraan Reformasi Birokrasi”.

Adapun **sasaran** yang hendak dicapai atau dihasilkan berdasarkan tujuan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.

Tabel 2.2
 Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Tahun 2023

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kapasitas lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase jumlah ranperda yang disahkan dari jumlah ranperda yang dibahas	NA	NA	NA	NA	80 %
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	70,50	73	75	81	83

Dari Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD, maka terdapat Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD (Tabel 2.3) yang dapat diuraikan untuk Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Tabel 2.4) yang merupakan penjabaran tugas untuk mendukung kinerja Sekretaris DPRD.

Tabel 2.3.

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Sekretariat DPRD

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target
1.	Meningkatnya kapasitas lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase jumlah ranperda yang disahkan dari jumlah ranperda yang dibahas	80%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	83

Tabel 2.4

Program dan Anggaran Berdasarkan Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2023

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	56.148.662.176
		Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Perangkat Daerah (Bagian Keuangan)	85	56.148.662.176
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase pelaksanaan program kerja DPRD yang telah disahkan	100%	39.033.526.000
		Persentase Fasilitasi Pembahasan Ranperda	100%	39.033.526.000

Tabel 2.5

Kegiatan dan Indikator Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pelaksana
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Sumber Daya Di Tingkat PD Sesuai Ketentuan, Efisiensi dan Efektif	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	Kabag Umum dan Humas
			Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Perangkat Daerah (Bagian Keuangan)	85	Kabag Keuangan

	Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Tepat Waktu dan Berkualitas	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi sesuai standar	33 dokumen	Kabag Keuangan
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19 dokumen	Kasubbag Perencanaan dan Anggaran
1.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14 laporan	Kasubbag Perencanaan dan Anggaran
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Keuangan PD yang Akuntabel	Jumlah laporan pertanggung jawaban keuangan yang sesuai standar	3140 laporan	Kabag Keuangan
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	728 orang/bulan	Kasubbag Akuntansi dan Perbendaharaan
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD	2400 dokumen	Kasubbag Akuntansi dan Perbendaharaan
1.2.3	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kasubbag Akuntansi dan Perbendaharaan
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terkelolanya BMD yang Dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah dokumen Administrasi BMD Sesuai Standar	1 Dokumen	Kabag Umum dan Humas
1.3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD	1 dokumen	Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya Pengelolaan Kepegawaian Sesuai Standart	Jumlah laporan hasil pengelolaan kepegawaian sesuai standar	6 laporan	Kabag Umum dan Humas
1.4.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	110 orang	Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian
1.4.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	5 laporan	Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Layanan Pendukung Perkantoran Sesuai Standart	Cakupan layanan pendukung perkantoran sesuai standar	467 Paket	Kabag Umum dan Humas
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	32 paket	Kasubbag RT dan Perlengkapan
1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	36 paket	Kasubbag TU dan Kepegawaian
1.5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	87 paket	Kasubbag RT dan Perlengkapan
1.5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	91 paket	Kasubbag TU dan Kepegawaian
1.5.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	21 paket	Kasubbag TU dan Kepegawaian
1.5.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	24 dokumen	Kasubbag TU dan Kepegawaian
1.5.7	Fasilitasi Kaunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kaunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	94 laporan	Kasubbag TU dan Kepegawaian
1.5.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60 laporan	Kasubbag TU dan Kepegawaian
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Efisien dan Efektifnya Pengadaan BMD	Jumlah BMD yang diadakan sesuai ketentuan (perpres pengadaan barjas dan RKBu)	467 unit	Kabag Umum dan Humas
1.6.1	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	157 unit	Kasubbag RT dan Perlengkapan

1.6.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	80 unit	Kasubbag RT dan Perlengkapan
1.6.3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	5 unit	Kasubbag RT dan Perlengkapan
1.6.4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	377unit	Kasubbag RT dan Perlengkapan
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan penggunaan jasa penunjang urusan yang sesuai ketentuan	266 laporan	Kabag Umum dan Humas
1.7.1	Penyediaan Jasa surat menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa surat menyurat	Jumlah Penyediaan jasa surat menyurat	17 laporan	Kasubbag TU dan Kepegawaian
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	100 laporan	Kasubbag RT dan Perlengkapan
1.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	149 laporan	Kasubbag TU dan Kepegawaian
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya BMD Sesuai Ketentuan	Jumlah unit BMD yang dipelihara sesuai standar	405 unit	Kabag Umum dan Humas
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	115 unit	Kasubbag RT dan Perlengkapan
1.8.2	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	80 unit	Kasubbag RT dan Perlengkapan
1.8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	73 unit	Kasubbag RT dan Perlengkapan
1.8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara dan direhabilitasi	14 unit	Kasubbag RT dan Perlengkapan
1.8.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarpras Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarpras Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarpras kantor (peralatan kantor) yang terpelihara	128 unit	Kasubbag RT dan Perlengkapan
1.9	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Tersusunnya Laporan Hasil Fasilitas Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah laporan hasil fasilitas keuangan dan kesejahteraan DPRD	586 orang/bulan/paket	Kabag Keuangan, Kabag Umum dan Humas
1.9.1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD	630 orang/bulan	Kasubbag Akuntansi dan Perbendaharaan
1.9.2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah paket pakaian dinas dan atribut yang disediakan	225 paket	Kasubbag TU dan Kepegawaian
1.9.3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Terlaksananya Medical Check Up DPRD	Jumlah orang yang mengikuti Medical Check Up DPRD	45 orang	Kasubbag Akuntansi dan Perbendaharaan
10.	Layanan Administrasi DPRD	Tersusunnya Laporan Layanan Administrasi DPRD yang Sesuai Ketentuan	Jumlah layanan administrasi DPRD	177 kali	Kabah Umum dan Humas
10.1	Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terlaksananya Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah laporan hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	177 laporan	Kasubbag TU dan Kepegawaian
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Terlaksananya Program Kerja DPRD yang Disahkan	Persentase pelaksanaan program kerja DPRD yang telah disahkan	100%	Kabag Persidangan dan PerUUan, Kabag Umum dan Humas
		Terlaksananya Ranperda yang Dibahas Sesuai Ketentuan Peraturan PerUUan	Persentase Fasilitas Pembahasan Ranperda	100%	Kabag Persidangan dan PerUUan
2.1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Terlaksananya Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah fasilitas kegiatan pembentukan perda dan peraturan DPRD	28 kali	Kabag Persidangan dan PerUUan
2.1.1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	8 dokumen	Analisis Hukum Ahli Muda/Muda
2.1.2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	7 dokumen	Analisis Hukum Ahli Muda/Muda
2.1.3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah dokumen kajian perundang-undangan	7 dokumen	Analisis Hukum Ahli Muda/Muda

2.1.4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah dokumen hasil penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik yang difasilitasi	6 dokumen	Analisis Hukum Ahli Muda/Muda
2.2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah fasilitasi tugas Badan Anggaran yang terealisasi	8 kali	Kabag Persidangan dan PerUUan
2.2.1	Pembahasan APBD	Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD	8 dokumen	Analisis Kebijakan Ahli Muda /Kabag Persidangan dan PerUUan
2.3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Terlaksananya Pengawasan Pemerintahan yang Dilakukan DPRD	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	72 laporan	Analisis Kebijakan Ahli Muda /Kabag Persidangan dan PerUUan
2.3.1	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah laporan hasil Pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum	72 laporan	Analisis Kebijakan Ahli Muda /Kabag Persidangan dan PerUUan
2.4	Peningkatan Kapasitas DPRD	Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah fasilitasi kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	694 laporan	Kabag Persidangan dan PerUUan, Kabag Umum dan Humas
2.4.1	Pendalaman Tugas DPRD		Jumlah fasilitasi kegiatan BinteK DPRD	27 laporan	Analisis Hukum Ahli Muda/Muda
		Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil pendalaman tugas DPRD	16 dokumen	
2.4.2	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah dokumen penyebarluasan produk hukum daerah, publikasi dan dokumentasi dewan	624 dokumen	Kasubbag TU dan Kepegawaian
2.4.3	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah orang dalam kelompok pakar dan tim ahli	36 orang	Analisis Hukum Ahli Muda/Muda
2.4.4	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah tenaga ahli fraksi	7 orang	Analisis Hukum Ahli Muda/Muda
2.5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Tersusunnya Penyerapan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Fasilitasi kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat	11 kali	Kabag Persidangan dan PerUUan
2.5.1	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Terselenggaranya Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah laporan hasil kunjungan kerja DPRD	8 laporan	Analisis Kebijakan Ahli Muda/Muda
2.5.2	Pelaksanaan Reses	Terlaksananya Reses	Jumlah hasil pelaksanaan Reses	3 dokumen	Analisis Kebijakan Ahli Muda/Muda
2.6	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Terlaksananya Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik	Jumlah SDM anggota DPRD yang memahami aturan	6 laporan	Kabag Persidangan dan PerUUan
2.6.1	Pengawasan Kode Etik DPRD	Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah laporan hasil pengawasan kode etik DPRD	8 laporan	Analisis Hukum Ahli Muda/Muda
2.7	Fasilitasi Tugas DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah SDM anggota DPRD yang memahami aturan	160 dokumen	Kabag Persidangan dan PerUUan, Kabag Umum dan Humas
2.7.1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	34 laporan	Analisis Kebijakan Ahli Muda /Kabag Persidangan dan PerUUan
2.7.2	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan tugas Badan Musyawarah	14 dokumen	Analisis Kebijakan Ahli Muda/Muda
2.7.3	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah dokumen hasil fasilitasi tugas pimpinan DPRD	112 dokumen	Kasubbag TU dan Kepegawaian

Dokumen Perjanjian Kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi, Eselon 3 dan Eselon 4 terdapat pada lampiran LKJIP Tahun 2023.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

LKjIP Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus Tahun 2023 menyajikan capaian kinerja setiap sasaran yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahun Anggaran 2023 Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan Indikator Kinerja Sasaran antara Target dengan Realisasinya.

Penetapan indikator kinerja pada setiap sasaran merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja. Kriteria yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun melalui Rencana Kinerja Tahunan (*Performance Plan*). Selanjutnya pada akhir Tahun 2023 target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya, sehingga diketahui celah kinerja (*Performance Gap*). Selisih yang timbul akan dievaluasi dan dianalisis guna menetapkan strategi untuk peningkatan kinerja dimasa datang (*performance improvement*).

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala penilaian capaian kinerja setiap indikator menggunakan pijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

Skala nilai peringkat kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Sangat Tinggi : $\geq 91\%$;
- b. Tinggi : 75,1 – 90%;
- c. Sedang : 65,1 – 75%;
- d. Rendah : 50,1 – 65%;
- e. Sangat Rendah : $\leq 50\%$.

3.1.1 Capaian Kinerja Sasaran

Pada tahun 2023, Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD Kabupaten Kudus Tahun 2023 dan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus, terdapat 2 sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu :

Sasaran 1 :

Meningkatnya Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sasaran 2 :

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Indikator kinerja, target dan realisasi capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus pada sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2023 Sekretariat DPRD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formula	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
1.	Meningkatkan penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kapasitas lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase jumlah ranperda yang disahkan dari jumlah ranperda yang dibahas	Ranperda yang dibahas dibagi dengan ranperda yang diajukan x 100%	80%	100%	125%	Sangat Tinggi
2.	Meningkatkan penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Hasil penilaian evaluasi kinerja Pemerintah Daerah dari Inspektorat	83	65,35	78,73%	Tinggi

Pada Tahun 2023 Indikator Kinerja Sasaran 1 menggunakan indikator yang mengacu pada Perubahan Renstra Tahun 2021 yang diaplikasikan pada Tahun 2023.

Untuk Indikator Kinerja Sasaran 2 masih menggunakan indikator lama.

Perbandingan ringkasan capaian kinerja sasaran Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2

Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2020, Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	2020			2021			2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya kualitas pelayanan pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat DPRD kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	82	81,52	99,41	82,50	80,37	97,41	82,70	83	100,36	-	-	-
	Meningkatnya Kapasitas Lembaga DPRD	Persentase jumlah ranperda yang disahkan dari jumlah ranperda yang dibahas	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	80%	100%	125
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	73	68,99	94,51	75	83,18	110,90	81	65,35	80,67	83	65,35	78,73

Keterangan :

Nilai SAKIP Menggunakan hasil penilaian mandiri

Perbandingan Ringkasan Capaian Kinerja Sasaran mulai Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023.

Tabel 3.3

Capaian Kinerja Sasaran Dibandingkan dengan Target Akhir Renstra

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Akhir Renstra	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
	Meningkatkan penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kapasitas lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase jumlah ranperda yang disahkan dari jumlah ranperda yang dibahas	80%	80%	100%	125%	Sangat Tinggi
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	83	83	65,35	78,73%	Tinggi

A. Sasaran 1 yaitu :

Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2023 sebagaimana tabel 3.1 sebagai berikut :

- Angka Capaian kinerja sasaran 1 Tahun 2023 sebesar 125% dari target 100% masuk dalam kategori sangat tinggi karena capaian kinerja sudah melebihi dari target yang telah ditentukan.

- Capaian kinerja sasaran 1 Tahun 2020 sebesar 99,41% , Tahun 2021 sebesar 97,41%, Tahun 2022 sebesar 100,36%. Capaian kinerja sasaran ini tidak bisa diperbandingkan dengan capaian kinerja sasaran Tahun 2023 karena mengalami perubahan yang disesuaikan pada Perubahan Renstra Tahun 2021.

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja sasaran :

1. DPRD telah melaksanakan kegiatan pembahasan ranperda sesuai Jadwal yang disepakati dalam Rapat Badan Musyawarah;
2. Adanya perubahan Propemperda Tahun 2023 yang semula 22 Ranperda menjadi 14 Ranperda.

Perubahan ini disebabkan sampai akhir bulan Desember 2023, Ranperda yang semula diusulkan dalam Propemperda tidak semuanya dikirimkan Bupati ke DPRD, sehingga sebanyak 14 Ranperda yang terbahas.

B. Sasaran 2 yaitu:

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana tabel 3.1 sebagai berikut :

- Angka Capaian kinerja sasaran meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023 menggunakan penilaian mandiri dengan nilai 65,35% dan capaian kinerja sebesar 78,73%.
- Capaian kinerja sasaran ini mengalami penurunan sebesar 1,94% dari nilai Tahun 2022 sebesar 80,76%.

Faktor penurunan capaian kinerja sasaran 2 pada Tahun 2023 ini disebabkan karena :

- Terdapat perbedaan/regulasi terkait sistem penilaian evaluasi SAKIP dari tahun sebelumnya

Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja sasaran maka faktor pendukung keberhasilan sasaran adalah :

- Meningkatkan komitmen dalam mengedepankan akuntabilitas dari sisi kinerja.

3.1.2 Capaian Kinerja Program

Program/Kegiatan yang mendukung capaian kinerja sasaran Meningkatkan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat adalah Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

Sedangkan Program/Kegiatan yang mendukung capaian kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Adapun Indikator kinerja, target dan realisasi capaian kinerja Program Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus dapat digambarkan pada Tabel 3.4

Tabel 3.4
Ringkasan Capaian Kinerja Program Tahun 2023

NO	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Pelaksana
1.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Pelaksanaan Program Kerja DPRD yang telah disahkan	100%	80%	80	Tinggi	Kabag Persidangan dan Perundang-undangan
		Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan	100%	100%	100	Sangat Tinggi	Kabag Persidangan dan Perundang-undangan
		Persentase Fasilitasi Pembahasan Ranperda	100%	100%	100	Sangat Tinggi	Kabag Persidangan dan Perundang-undangan
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Perangkat Daerah	85 indeks	94,34 indeks	110,99	Sangat Tinggi	Kabag Umum dan Humas
		Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Perangkat Daerah (Bagian Keuangan)	85 indeks	85 indeks	100	Sangat Tinggi	Kabag Keuangan

Tabel 3.5

Capaian Kinerja Program Tahun 2020, Tahun 2021, 2022 dan Tahun 2023

NO	Program	Indikator Kinerja	2020			2021			2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Perangkat Daerah	82	88,63	108,09 %	83	91,08	109,73 %	83,5	90,03	107,82 %	85	94,34	110,99 %
		Persentase dokumen Perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NA	NA	NA
		Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Perangkat Daerah (Bagian Keuangan)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	85	85	100%
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Pelaksanaan Program Kerja DPRD yang telah disahkan	100 %	100%	100%	100%	92,85 %	92,85 %	100%	88,95 %	88,95 %	100%	80%	80%
		Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Fasilitasi Pembahasan Ranperda	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100%	100%	100%

Keterangan :

Angka capaian kinerja Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD sebagai berikut :

- Pada capaian kinerja indikator Persentase Pelaksanaan Program Kerja DPRD yang telah disahkan Tahun 2023 sebesar 80% dari target 100% dengan kategori tinggi. Capaian ini mengalami penurunan sebesar 8,95% dari capaian kinerja tahun 2022 sebesar 88,95%.
- Capaian kinerja Persentase Pelaksanaan Program Kerja DPRD yang telah disahkan tidak mencapai target 100% dan mengalami penurunan

dikarenakan dengan bertambahnya waktu pembahasan Ranperda oleh 3 Pansus mengakibatkan waktu pelaksanaan kegiatan DPRD lainnya terpakai oleh pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dalam pansus. Hal ini menyebabkan beberapa agenda kerja DPRD pada kunjungan kerja tidak bisa dilaksanakan atau mencapai target karena adanya pembahasan Ranperda .

- Capaian kinerja Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan sebesar 100% dengan kategori sangat tinggi. Tercapainya persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan karena agenda kegiatan yang ada di DPRD terpublikasikan sehingga masyarakat memperoleh informasi kinerja DPRD dengan baik dan akurat.
- Capaian kinerja Persentase Fasilitasi Pembahasan Ranperda sebesar 100% dengan kategori sangat tinggi.

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja program :

1. DPRD telah melaksanakan kegiatan pembahasan Ranperda sesuai hasil Badan Musyawarah yang disepakati dalam Rapat Badan Musyawarah
2. Adanya perubahan Propemperda tahun 2023 yang semula 22 Ranperda menjadi 14 Ranperda. Perubahan ini disebabkan karena sampai akhir bulan Desember 2023, Ranperda yang diusulkan oleh Bupati belum dikirimkan ke DPRD, sehingga ke-14 Ranperda terbahas semua.

Tabel 3.6

Capaian Kinerja Program Dibandingkan dengan Target Akhir Renstra

NO	Program	Indikator Kinerja Program	Target Akhir Renstra	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
1.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Pelaksanaan Program Kerja DPRD yang telah disahkan	100%	100%	80%	80	Tinggi
		Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan	100%	100%	100%	100	Sangat Tinggi
		Persentase Fasilitasi Pembahasan Ranperda	100%	100%	100%	100	Sangat Tinggi
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Perangkat Daerah	85 indeks	85 indeks	94,34 indeks	110,99	Sangat Tinggi

		Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Perangkat Daerah (Bagian Keuangan)	85 indeks	85 indeks	85 indeks	100	Sangat Tinggi
--	--	---	-----------	-----------	-----------	-----	---------------

Hasil capaian nilai IKU Sekretariat DPRD Tahun 2023 dan Hasil capaian Realisasi Program Organisasi Sekretariat DPRD Tahun 2023 tersebut dapat dilihat pada aplikasi e planning sebagaimana terdapat dalam Lampiran .

3.1.3 Capaian Kinerja Kegiatan

Kegiatan yang mendukung capaian kinerja Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD adalah :

1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
2. Pembahasan Kebijakan Anggaran
3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
4. Peningkatan Kapasitas DPRD
5. Penyerapan dan penghimpunan Aspirasi Masyarakat
6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
7. Fasilitasi Tugas DPRD

Sedangkan Kegiatan yang mendukung capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
10. Layanan Administrasi DPRD

Adapun Indikator kinerja, target dan realisasi capaian kinerja Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus dapat digambarkan pada Tabel 3.7

Tabel 3.7

Ringkasan Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2023

NO	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Pelaksana
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Sesuai Standar	33 dokumen	33 dokumen	100	Sangat Tinggi	Kasubbag Perencanaan dan Anggaran
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang sesuai standar	3.140 Laporan	3.667 Laporan	116,78	Sangat Tinggi	Kasubbag Akuntansi dan Perbendaharaan
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi BMD sesuai standar	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Sangat Tinggi	Kabag Umum dan Humas
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan hasil pengelolaan kepegawaian sesuai standar	6 Laporan	9 Laporan	150	Sangat Tinggi	Kabag Umum dan Humas
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Pendukung Perkantoran sesuai standar	98 Persen	100 Persen	102	Sangat Tinggi	Kabag Umum dan Humas
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan sesuai ketentuan (perpres pengadaan barjas dan RKBU)	467 Unit	619 Unit	132,5	Sangat Tinggi	Kabag Umum dan Humas
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penggunaan Jasa Penunjang Urusan yang sesuai ketentuan	266 Laporan	266 Laporan	100	Sangat Tinggi	Kabag Umum dan Humas
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit BMD yang dipelihara sesuai standar	405 Unit	391 unit	96,5	Sangat Tinggi	Kabag Umum dan Humas
1.9	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Fasilitasi Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100	Sangat Tinggi	Kabag Umum dan Humas; Kabag Keuangan
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	588 Orang/Bulan/Paket	637 Orang/Bulan/Paket	108	Sangat Tinggi	Kabag Umum dan Humas; Kabag Keuangan
10.	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Layanan Administarsi DPRD	177 Kali	177 Kali	100	Sangat Tinggi	Kabag Umum dan Humas
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD					Sangat Tinggi	
2.1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	28 Kali	27 Kali	96	Sangat Tinggi	Kabag Persidangan dan PerUUan
2.2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Fasilitasi tugas Badan Anggaran yang terealisasi	8 Kali	6 Kali	75	Sedang	Kabag Persidangan dan PerUUan
2.3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah fasilitasi kegiatan pengawasan Pemerintahan yang dilakukan DPRD	72 Kali	72 Kali	100	Sangat Tinggi	Kabag Persidangan dan PerUUan

2.4	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	698 Laporan	684 Laporan	98	Sangat Tinggi	Kabag Persidangan dan PerUUan Kabag Umum dan Humas
2.5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat	11 Kali	11 Kali	100	Sangat Tinggi	Kabag Persidangan dan PerUUan
2.6	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah SDM anggota DPRD yang memahami aturan	6 Laporan	6 Laporan	100	Sangat Tinggi	Kabag Persidangan dan PerUUan
2.7	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah SDM anggota DPRD yang memahami aturan	160 Dokumen	136 dokumen	85	Tinggi	Kabag Umum dan Humas

Keterangan :

- Capaian kinerja Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota sebagian besar sudah mencapai target namun ada kegiatan yang belum mencapai target yaitu Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 96, 5
 Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja kegiatan adalah koordinasi antar bagian berjalan sesuai timeline
 Sedangkan faktor penunjang ketidakberhasilan capaian kinerja kegiatan yang tidak memenuhi target, karena ada Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target.
- Adapun Angka capaian kinerja Kegiatan pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD tidak memenuhi target pada kegiatan :
 1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD sebesar 96%
 2. Pembahasan Kebijakan Anggaran sebesar 75%
 3. Peningkatan Kapasitas DPRD sebesar 98%
 4. Fasilitasi Tugas DPRD sebesar 85%

Faktor penunjang ketidakberhasilan capaian kinerja kegiatan disebabkan adanya penambahan waktu Pembahasan ranperda sehingga beberapa agenda kerja DPRD pada Kegiatan tidak dapat dilaksanakan menjadikan tidak mencapai target.

Tabel 3.8

Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2022 dan Tahun 2023

NO	Kegiatan	Indikator Kinerja	TAHUN 2022			TAHUN 2023		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah data/dokumen perencanaan dan pelaporan sesuai ketentuan	26 Dokumen	26 Dokumen	100	NA	NA	NA
		Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Sesuai Standar	NA	NA	NA	33 dokumen	33 dokumen	100
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	56 Dokumen	56 Dokumen	100	NA	NA	NA
		Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang sesuai standar	NA	NA	NA	3.140 Laporan	3.667 Laporan	116,78
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah aset kantor yang terbayar	2 Unit	2 Unit	100	NA	NA	NA
		Jumlah Dokumen Administrasi BMD sesuai standar	NA	NA	NA	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang kompetensinya meningkat	464 Orang/kali	412 Orang/kali	88,79	NA	NA	NA
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Kepegawaian sesuai standar	NA	NA	NA	6 Laporan	9 Laporan	150
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	439 Jenis/OK	445 Jenis/OK	101,37	NA	NA	NA
		Cakupan Layanan Pendukung Perkantoran sesuai standar	NA	NA	NA	98 Persen	100 Persen	102
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan sarpras kantor	41 Unit	41 Unit	100	NA	NA	NA
		Jumlah BMD yang diadakan sesuai ketentuan (perpres pengadaan barjas dan RKBU)	NA	NA	NA	467 Unit	619 Unit	132,5
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	897 Jenis/Orang/Bulan	876 Jenis/Orang/Bulan	97,66	NA	NA	NA

		Jumlah Laporan Penggunaan Jasa Penunjang Urusan yang sesuai ketentuan	NA	NA	NA	266 Laporan	266 Laporan	100
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah aset kantor yang terpelihara	108 Unit	106 Unit	98,15	NA	NA	NA
		Jumlah Unit BMD yang dipelihara sesuai standar	NA	NA	NA	405 Unit	391 unit	96,5
1.9	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Fasilitas Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	726 Orang/Bulan/Stel	702 Orang/Bulan/Stel	96,69	NA	NA	NA
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	NA	NA	NA	588 Orang/Bulan/Paket	637 Orang/Bulan/Paket	108
10.	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Layanan Administrasi DPRD	9567 Orang/kali	7637 Orang/kali	79,83	177 Kali	177 Kali	100
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD							
2.1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Fasilitas Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	2141 Ok	1164 Ok	54,37	28 Kali	27 Kali	96
2.2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Fasilitas tugas Badan Anggaran yang terealisasi	816 Orang/Kali	636 Orang/Kali	77,94	8 Kali	6 Kali	75
2.3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah fasilitas kegiatan pengawasan Pemerintahan yang dilakukan DPRD	4868 Orang/Kali	3400 Orang/Kali	69,84	72 Kali	72 Kali	100
2.4	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah SDM Anggota DPRD yang Memahami Aturan	1274 Orang/Kali	1327 Orang/Kali	104,16			
		Jumlah fasilitas kegiatan peningkatan kapasitas DPRD	NA	NA	NA	698 Laporan	684 Laporan	98
2.5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Fasilitas Kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat	13784 Orang/Kali	13584 Orang/Kali	98,55	11 Kali	11 Kali	100
2.6	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah SDM anggota DPRD yang memahami aturan	216 Orang/Kali	207 Orang/Kali	95,83	6 Laporan	6 Laporan	100
2.7	Fasilitas Tugas DPRD	Jumlah fasilitas tugas Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPRD yang terealisasi	5785 Orang/Kali	3165 Orang/Kali	54,71			
		Jumlah SDM Anggota DPRD yang Memahami Aturan	NA	NA	NA	160 Dokumen	136 dokumen	85

Keterangan :

Terdapat perbedaan indikator kinerja kegiatan menjadikan tidak dapat diukur/diperbandingkan (NA).

Tabel 3.2

Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2020, Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	2020			2021			2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat DPRD kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	82	81,52	99,41	82,50	80,37	97,41	82,70	83	100,36	-	-	-
	Meningkatnya Kapasitas Lembaga DPRD	Persentase jumlah ranperda yang disahkan dari jumlah ranperda yang dibahas	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	80%	100%	125
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	73	68,99	94,51	75	83,18	110,90	81	65,35	80,67	83	65,35	78,73

Keterangan :

Nilai SAKIP Menggunakan hasil penilaian mandiri

Perbandingan Ringkasan Capaian Kinerja Sasaran mulai Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023.

Tabel 3.3

Capaian Kinerja Sasaran Dibandingkan dengan Target Akhir Renstra

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Akhir Renstra	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
	Meningkatkan penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kapasitas lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase jumlah ranperda yang disahkan dari jumlah ranperda yang dibahas	80%	80%	100%	125%	Sangat Tinggi
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	83	83	65,35	78,73%	Tinggi

A. Sasaran 1 yaitu :

Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2023 sebagaimana tabel 3.1 sebagai berikut :

- Angka Capaian kinerja sasaran 1 Tahun 2023 sebesar 125% dari target 100% masuk dalam kategori sangat tinggi karena capaian kinerja sudah melebihi dari target yang telah ditentukan.

- Capaian kinerja sasaran 1 Tahun 2020 sebesar 99,41% , Tahun 2021 sebesar 97,41%, Tahun 2022 sebesar 100,36%. Capaian kinerja sasaran ini tidak bisa diperbandingkan dengan capaian kinerja sasaran Tahun 2023 karena mengalami perubahan yang disesuaikan pada Perubahan Renstra Tahun 2021.

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja sasaran :

1. DPRD telah melaksanakan kegiatan pembahasan ranperda sesuai Jadwal yang disepakati dalam Rapat Badan Musyawarah;
2. Adanya perubahan Propemperda Tahun 2023 yang semula 22 Ranperda menjadi 14 Ranperda.
Perubahan ini disebabkan sampai akhir bulan Desember 2023, Ranperda yang semula diusulkan dalam Propemperda tidak semuanya dikirimkan Bupati ke DPRD, sehingga sebanyak 14 Ranperda yang terbahas.

B. Sasaran 2 yaitu:

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana tabel 3.1 sebagai berikut :

- Angka Capaian kinerja sasaran meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023 menggunakan penilaian mandiri dengan nilai 65,35% dan capaian kinerja sebesar 78,73%.
- Capaian kinerja sasaran ini mengalami penurunan sebesar 1,94% dari nilai Tahun 2022 sebesar 80,76%.

Faktor penurunan capaian kinerja sasaran 2 pada Tahun 2023 ini disebabkan karena :

- Terdapat perbedaan/regulasi terkait sistem penilaian evaluasi SAKIP dari tahun sebelumnya

Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja sasaran maka faktor pendukung keberhasilan sasaran adalah :

- Meningkatkan komitmen dalam mengedepankan akuntabilitas dari sisi kinerja.

3.1.2 Capaian Kinerja Program

Program/Kegiatan yang mendukung capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat adalah Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

Sedangkan Program/Kegiatan yang mendukung capaian kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Adapun Indikator kinerja, target dan realisasi capaian kinerja Program Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus dapat digambarkan pada Tabel 3.4

Tabel 3.4
Ringkasan Capaian Kinerja Program Tahun 2023

NO	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Pelaksana
1.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Pelaksanaan Program Kerja DPRD yang telah disahkan	100%	80%	80	Tinggi	Kabag Persidangan dan Perundang-undangan
		Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan	100%	100%	100	Sangat Tinggi	Kabag Persidangan dan Perundang-undangan
		Persentase Fasilitasi Pembahasan Ranperda	100%	100%	100	Sangat Tinggi	Kabag Persidangan dan Perundang-undangan
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Perangkat Daerah	85 indeks	94,34 indeks	110,99	Sangat Tinggi	Kabag Umum dan Humas
		Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Perangkat Daerah (Bagian Keuangan)	85 indeks	85 indeks	100	Sangat Tinggi	Kabag Keuangan

Tabel 3.5

Capaian Kinerja Program Tahun 2020, Tahun 2021, 2022 dan Tahun 2023

NO	Program	Indikator Kinerja	2020			2021			2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Perangkat Daerah	82	88,63	108,09 %	83	91,08	109,73 %	83,5	90,03	107,82 %	85	94,34	110,99 %
		Persentase dokumen Perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NA	NA	NA
		Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Perangkat Daerah (Bagian Keuangan)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	85	85	100%
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Pelaksanaan Program Kerja DPRD yang telah disahkan	100 %	100%	100%	100%	92,85 %	92,85 %	100%	88,95 %	88,95 %	100%	80%	80%
		Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Fasilitasi Pembahasan Ranperda	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100%	100%	100%

Keterangan :

Angka capaian kinerja Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD sebagai berikut :

- Pada capaian kinerja indikator Persentase Pelaksanaan Program Kerja DPRD yang telah disahkan Tahun 2023 sebesar 80% dari target 100% dengan kategori tinggi. Capaian ini mengalami penurunan sebesar 8,95% dari capaian kinerja tahun 2022 sebesar 88,95%.
- Capaian kinerja Persentase Pelaksanaan Program Kerja DPRD yang telah disahkan tidak mencapai target 100% dan mengalami penurunan

dikarenakan dengan bertambahnya waktu pembahasan Ranperda oleh 3 Pansus mengakibatkan waktu pelaksanaan kegiatan DPRD lainnya terpakai oleh pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dalam pansus. Hal ini menyebabkan beberapa agenda kerja DPRD pada kunjungan kerja tidak bisa dilaksanakan atau mencapai target karena adanya pembahasan Ranperda .

- Capaian kinerja Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan sebesar 100% dengan kategori sangat tinggi. Tercapainya persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan karena agenda kegiatan yang ada di DPRD terpublikasikan sehingga masyarakat memperoleh informasi kinerja DPRD dengan baik dan akurat.
- Capaian kinerja Persentase Fasilitasi Pembahasan Ranperda sebesar 100% dengan kategori sangat tinggi.

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja program :

1. DPRD telah melaksanakan kegiatan pembahasan Ranperda sesuai hasil Badan Musyawarah yang disepakati dalam Rapat Badan Musyawarah
2. Adanya perubahan Propemperda tahun 2023 yang semula 22 Ranperda menjadi 14 Ranperda. Perubahan ini disebabkan karena sampai akhir bulan Desember 2023, Ranperda yang diusulkan oleh Bupati belum dikirimkan ke DPRD, sehingga ke-14 Ranperda terbahas semua.

Tabel 3.6

Capaian Kinerja Program Dibandingkan dengan Target Akhir Renstra

NO	Program	Indikator Kinerja Program	Target Akhir Renstra	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
1.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Pelaksanaan Program Kerja DPRD yang telah disahkan	100%	100%	80%	80	Tinggi
		Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan	100%	100%	100%	100	Sangat Tinggi
		Persentase Fasilitasi Pembahasan Ranperda	100%	100%	100%	100	Sangat Tinggi
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Perangkat Daerah	85 indeks	85 indeks	94,34 indeks	110,99	Sangat Tinggi

		Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Perangkat Daerah (Bagian Keuangan)	85 indeks	85 indeks	85 indeks	100	Sangat Tinggi
--	--	---	-----------	-----------	-----------	-----	---------------

Hasil capaian nilai IKU Sekretariat DPRD Tahun 2023 dan Hasil capaian Realisasi Program Organisasi Sekretariat DPRD Tahun 2023 tersebut dapat dilihat pada aplikasi e planning sebagaimana terdapat dalam Lampiran .

3.1.3 Capaian Kinerja Kegiatan

Kegiatan yang mendukung capaian kinerja Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD adalah :

1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
2. Pembahasan Kebijakan Anggaran
3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
4. Peningkatan Kapasitas DPRD
5. Penyerapan dan penghimpunan Aspirasi Masyarakat
6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
7. Fasilitasi Tugas DPRD

Sedangkan Kegiatan yang mendukung capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
10. Layanan Administrasi DPRD

Adapun Indikator kinerja, target dan realisasi capaian kinerja Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus dapat digambarkan pada Tabel 3.7

Tabel 3.7

Ringkasan Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2023

NO	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Pelaksana
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Sesuai Standar	33 dokumen	33 dokumen	100	Sangat Tinggi	Kasubbag Perencanaan dan Anggaran
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang sesuai standar	3.140 Laporan	3.667 Laporan	116,78	Sangat Tinggi	Kasubbag Akuntansi dan Perbendaharaan
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi BMD sesuai standar	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Sangat Tinggi	Kabag Umum dan Humas
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan hasil pengelolaan kepegawaian sesuai standar	6 Laporan	9 Laporan	150	Sangat Tinggi	Kabag Umum dan Humas
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Pendukung Perkantoran sesuai standar	98 Persen	100 Persen	102	Sangat Tinggi	Kabag Umum dan Humas
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang diadakan sesuai ketentuan (perpres pengadaan barjas dan RKBU)	467 Unit	619 Unit	132,5	Sangat Tinggi	Kabag Umum dan Humas
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penggunaan Jasa Penunjang Urusan yang sesuai ketentuan	266 Laporan	266 Laporan	100	Sangat Tinggi	Kabag Umum dan Humas
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit BMD yang dipelihara sesuai standar	405 Unit	391 unit	96,5	Sangat Tinggi	Kabag Umum dan Humas
1.9	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Fasilitasi Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100	Sangat Tinggi	Kabag Umum dan Humas; Kabag Keuangan
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	588 Orang/Bulan/Paket	637 Orang/Bulan/Paket	108	Sangat Tinggi	Kabag Umum dan Humas; Kabag Keuangan
10.	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Layanan Administarsi DPRD	177 Kali	177 Kali	100	Sangat Tinggi	Kabag Umum dan Humas
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD					Sangat Tinggi	
2.1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	28 Kali	27 Kali	96	Sangat Tinggi	Kabag Persidangan dan PerUUan
2.2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Fasilitasi tugas Badan Anggaran yang terealisasi	8 Kali	6 Kali	75	Sedang	Kabag Persidangan dan PerUUan
2.3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah fasilitasi kegiatan pengawasan Pemerintahan yang dilakukan DPRD	72 Kali	72 Kali	100	Sangat Tinggi	Kabag Persidangan dan PerUUan

2.4	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	698 Laporan	684 Laporan	98	Sangat Tinggi	Kabag Persidangan dan PerUUan Kabag Umum dan Humas
2.5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat	11 Kali	11 Kali	100	Sangat Tinggi	Kabag Persidangan dan PerUUan
2.6	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah SDM anggota DPRD yang memahami aturan	6 Laporan	6 Laporan	100	Sangat Tinggi	Kabag Persidangan dan PerUUan
2.7	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah SDM anggota DPRD yang memahami aturan	160 Dokumen	136 dokumen	85	Tinggi	Kabag Umum dan Humas

Keterangan :

- Capaian kinerja Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota sebagian besar sudah mencapai target namun ada kegiatan yang belum mencapai target yaitu Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 96, 5 Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja kegiatan adalah koordinasi antar bagian berjalan sesuai timeline Sedangkan faktor penunjang ketidakberhasilan capaian kinerja kegiatan yang tidak memenuhi target, karena ada Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target.
- Adapun Angka capaian kinerja Kegiatan pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD tidak memenuhi target pada kegiatan :
 1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD sebesar 96%
 2. Pembahasan Kebijakan Anggaran sebesar 75%
 3. Peningkatan Kapasitas DPRD sebesar 98%
 4. Fasilitasi Tugas DPRD sebesar 85%

Faktor penunjang ketidakberhasilan capaian kinerja kegiatan disebabkan adanya penambahan waktu Pembahasan ranperda sehingga beberapa agenda kerja DPRD pada Kegiatan tidak dapat dilaksanakan menjadikan tidak mencapai target.

Tabel 3.8

Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2022 dan Tahun 2023

NO	Kegiatan	Indikator Kinerja	TAHUN 2022			TAHUN 2023		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah data/dokumen perencanaan dan pelaporan sesuai ketentuan	26 Dokumen	26 Dokumen	100	NA	NA	NA
		Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Sesuai Standar	NA	NA	NA	33 dokumen	33 dokumen	100
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	56 Dokumen	56 Dokumen	100	NA	NA	NA
		Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang sesuai standar	NA	NA	NA	3.140 Laporan	3.667 Laporan	116,78
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah aset kantor yang terbayar	2 Unit	2 Unit	100	NA	NA	NA
		Jumlah Dokumen Administrasi BMD sesuai standar	NA	NA	NA	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang kompetensinya meningkat	464 Orang/kali	412 Orang/kali	88,79	NA	NA	NA
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Kepegawaian sesuai standar	NA	NA	NA	6 Laporan	9 Laporan	150
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	439 Jenis/OK	445 Jenis/OK	101,37	NA	NA	NA
		Cakupan Layanan Pendukung Perkantoran sesuai standar	NA	NA	NA	98 Persen	100 Persen	102
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan sarpras kantor	41 Unit	41 Unit	100	NA	NA	NA
		Jumlah BMD yang diadakan sesuai ketentuan (perpres pengadaan barjas dan RKBU)	NA	NA	NA	467 Unit	619 Unit	132,5
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	897 Jenis/Orang /Bulan	876 Jenis/Orang /Bulan	97,66	NA	NA	NA

		Jumlah Laporan Penggunaan Jasa Penunjang Urusan yang sesuai ketentuan	NA	NA	NA	266 Laporan	266 Laporan	100
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah aset kantor yang terpelihara	108 Unit	106 Unit	98,15	NA	NA	NA
		Jumlah Unit BMD yang dipelihara sesuai standar	NA	NA	NA	405 Unit	391 unit	96,5
1.9	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Fasilitas Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	726 Orang/Bulan/Stel	702 Orang/Bulan/Stel	96,69	NA	NA	NA
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	NA	NA	NA	588 Orang/Bulan/Paket	637 Orang/Bulan/Paket	108
10.	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Layanan Administarsi DPRD	9567 Orang/kali	7637 Orang/kali	79,83	177 Kali	177 Kali	100
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD							
2.1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Fasilitas Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	2141 Ok	1164 Ok	54,37	28 Kali	27 Kali	96
2.2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Fasilitas tugas Badan Anggaran yang terealisasi	816 Orang/Kali	636 Orang/Kali	77,94	8 Kali	6 Kali	75
2.3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah fasilitas kegiatan pengawasan Pemerintahan yang dilakukan DPRD	4868 Orang/Kali	3400 Orang/Kali	69,84	72 Kali	72 Kali	100
2.4	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah SDM Anggota DPRD yang Memahami Aturan	1274 Orang/Kali	1327 Orang/Kali	104,16			
		Jumlah fasilitas kegiatan peningkatan kapasitas DPRD	NA	NA	NA	698 Laporan	684 Laporan	98
2.5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Fasilitas Kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat	13784 Orang/Kali	13584 Orang/Kali	98,55	11 Kali	11 Kali	100
2.6	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah SDM anggota DPRD yang memahami aturan	216 Orang/Kali	207 Orang/Kali	95,83	6 Laporan	6 Laporan	100
2.7	Fasilitas Tugas DPRD	Jumlah fasilitas tugas Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPRD yang terealisasi	5785 Orang/Kali	3165 Orang/Kali	54,71			
		Jumlah SDM Anggota DPRD yang Memahami Aturan	NA	NA	NA	160 Dokumen	136 dokumen	85

Keterangan :

Terdapat perbedaan indikator kinerja kegiatan menjadikan tidak dapat diukur/diperbandingkan (NA).

Tabel 3.9

Capaian Kinerja kegiatan Dibandingkan dengan Target Akhir Renstra

NO	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a						
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Sesuai Standar	33 dokumen	33 dokumen	33 dokumen	100	Sangat Tinggi
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang sesuai standar	3.140 Laporan	3.140 Laporan	3.667 Laporan	116,78	Sangat Tinggi
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi BMD sesuai standar	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Sangat Tinggi
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan hasil pengelolaan kepegawaian sesuai standar	6 Laporan	6 Laporan	9 Laporan	150	Sangat Tinggi
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Pendukung Perkantoran sesuai standar	98 Persen	98 Persen	100 Persen	102	Sangat Tinggi
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan sesuai ketentuan (perpres pengadaan barjas dan RKBU)	467 Unit	467 Unit	619 Unit	132,5	Sangat Tinggi
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penggunaan Jasa Penunjang Urusan yang sesuai ketentuan	266 Laporan	266 Laporan	266 Laporan	100	Sangat Tinggi
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit BMD yang dipelihara sesuai standar	405 Unit	405 Unit	391 unit	96,5	Sangat Tinggi

1.9	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Fasilitasi Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100	Sangat Tinggi
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	588 Orang/Bulan/Paket	588 Orang/Bulan/Paket	637 Orang/Bulan/Paket	108,3	Sangat Tinggi
10.	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Layanan Administrasi DPRD	177 Kali	177 Kali	177 Kali	100	Sangat Tinggi
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD						Sangat Tinggi
2.1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	28 Kali	28 Kali	27 Kali	96	Sangat Tinggi
2.2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Fasilitasi tugas Badan Anggaran yang terealisasi	8 Kali	8 Kali	6 Kali	75	Sedang
2.3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah fasilitasi kegiatan pengawasan Pemerintahan yang dilakukan DPRD	72 Kali	72 Kali	72 Kali	100	Sangat Tinggi
2.4	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	698 Laporan	698 Laporan	684 Laporan	97,99	Sangat Tinggi
2.5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat	11 Kali	11 Kali	11 Kali	100	Sangat Tinggi
2.6	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah SDM anggota DPRD yang memahami aturan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	100	Sangat Tinggi
2.7	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah SDM anggota DPRD yang memahami aturan	160 Dokumen	160 Dokumen	136 dokumen	85	Sangat Tinggi

Hasil capaian Realisasi **Kegiatan** Sekretariat DPRD Tahun 2023 tersebut dapat dilihat pada aplikasi e planning sebagaimana terdapat dalam Lampiran.

3.1.4 Capaian Kinerja Sub Kegiatan

Sub Kegiatan yang mendukung capaian kinerja Kegiatan pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD adalah :

1. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
2. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
3. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
4. Pengawasan Kode Etik DPRD
5. Kunjungan Kerja Dalam Daerah
6. Pelaksanaan Reses
7. Pendalaman Tugas DPRD
8. Publikasi dan Dokumentasi Dewan
9. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
10. penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
11. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
12. Pembahasan APBD
13. Penyusunan dan pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
14. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
15. Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
16. Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik

Sedangkan Sub Kegiatan yang mendukung capaian kinerja Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
5. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD
6. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
7. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
8. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
11. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
12. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
13. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
14. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undanga
15. Fasilitasi Kunjungan Tamu

16. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
17. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas/Jabatan
18. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
19. Pengadaan Mebel
20. Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya
21. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
22. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
23. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
24. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
25. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
26. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan
27. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
28. Pemeliharaan Mebel
29. Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya
30. Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya
31. Pemeliharaan /rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
32. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
33. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
34. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
35. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD

Adapun Indikator kinerja, target dan realisasi capaian kinerja Sub Kegiatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus dapat digambarkan pada Tabel 3.10

Tabel 3.10

Ringkasan Capaian Kinerja Sub Kegiatan Tahun 2023

NO	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Pelaksana
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19 Dokumen	19 Dokumen	100	Sangat Tinggi	Kasubbag Perencanaan dan Anggaran
1.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14 Dokumen	14 Dokumen	100	Sangat Tinggi	Kasubbag Perencanaan dan Anggaran
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	728 Orang/Bulan	743 Orang/Bulan	102	Sangat Tinggi	Kasubbag Akuntansi dan Perbendaharaan
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	100	Sangat Tinggi	Kasubbag Akuntansi dan Perbendaharaan
1.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2400 Dokumen	2914 Dokumen	121,5	Sangat Tinggi	Kasubbag Akuntansi dan Perbendaharaan
1.3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Sangat Tinggi	Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian
1.4.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	110 Orang	107 Orang	97,27	Sangat Tinggi	Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian
1.4.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	5 Laporan	5 Laporan	100	Sangat Tinggi	Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	91 Laporan	80 Laporan	87,9	Tinggi	Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	32 Paket	32 Paket	100	Sangat Tinggi	Kasubbag RT dan Perlengkapan
1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Paket	32 Paket	133,3	Sangat Tinggi	Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian
1.5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	52 Paket	80 Paket	153,8	Sangat Tinggi	Kasubbag RT dan Perlengkapan
1.5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	91 Paket	91 Paket	100	Sangat Tinggi	Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian
1.5.5	Penyediaan Barang Cetak dan	Jumlah Paket Barang Cetak dan	21 Paket	21 paket	100	Sangat Tinggi	Kasubbag Tata Usaha dan

	Penggandaan	Penggandaan yang Disediakan					Kepegawaian
1.5.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	24 Dokumen	100	Sangat Tinggi	Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian
1.5.7	Fasilitasi Kaunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	94 Laporan	94 Laporan	100	Sangat Tinggi	Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian
1.5.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	60 Laporan	100	Sangat Tinggi	Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian
1.6.1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	157 Unit	157 Unit	100	Sangat Tinggi	Kasubbag RT dan Perlengkapan
1.6.2	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	80 Unit	80 Unit	100	Sangat Tinggi	Kasubbag RT dan Perlengkapan
1.6.3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	100	Sangat Tinggi	Kasubbag RT dan Perlengkapan
1.6.4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	377 Unit	377 Unit	100	Sangat Tinggi	Kasubbag RT dan Perlengkapan
1.7.1	Penyediaan Jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17 Laporan	17 Laporan	100	Sangat Tinggi	Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 Laporan	100 Laporan	100	Sangat Tinggi	Kasubbag RT dan Perlengkapan
1.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	149 Laporan	149 laporan	100	Sangat Tinggi	Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	115 Unit	110 Unit	95,65	Sangat Tinggi	Kasubbag RT dan Perlengkapan
1.8.2	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	80 Unit	66 Unit	82,5	Tinggi	Kasubbag RT dan Perlengkapan
1.8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	73 Unit	73 Unit	100	Sangat Tinggi	Kasubbag RT dan Perlengkapan
1.8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14 Unit	14 Unit	100	Sangat Tinggi	Kasubbag RT dan Perlengkapan
1.8.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarpras Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	128 Unit	128 Unit	100	Sangat Tinggi	Kasubbag RT dan Perlengkapan
1.9.1	Penyelenggaraan Administrasi	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	630 Orang/bulan	540 Orang/Bulan	85,7	Tinggi	Kasubbag Akuntansi dan Perbendaharaan

	Keuangan DPRD						n
1.9.2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	225 Paket	225 Paket	100	Sangat Tinggi	Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian
1.9.3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 Orang	23 Orang	51,1	Rendah	Kasubbag Akuntansi dan Perbendaharaan
10.1	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	177 Laporan	177 Laporan	100	Sangat Tinggi	Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD						
2.1.1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	8 Dokumen	7 Dokumen	87,5	Sangat Tinggi	Analisis Hukum Ahli Muda/Muda
2.1.2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	100	Sangat Tinggi	Analisis Hukum Ahli Muda/Muda
2.1.3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan	7 Dokumen	7 Dokumen	100	Sangat Tinggi	Analisis Hukum Ahli Muda/Muda
2.1.4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	6 Dokumen	6 Dokumen	100	Sangat Tinggi	Analisis Hukum Ahli Muda/Muda
2.2.1	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	8 Dokumen	6 Dokumen	75	Sedang	Analisis Hukum Ahli Muda /Kabag Persidangan dan PerUUan
2.3.1	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	72 Laporan	72 Laporan	100	Sangat Tinggi	Analisis Hukum Ahli Muda /Kabag Persidangan dan PerUUan
2.4.1	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah fasilitasi kegiatan Bintek DPRD	27 Laporan	27 Laporan	100	Sangat Tinggi	Analisis Hukum Ahli Muda/Muda
		Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	16 Dokumen	16 Dokumen	100	Sangat Tinggi	Analisis Hukum Ahli Muda/Muda
2.4.2	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	624 Dokumen	624 Dokumen	100	Sangat Tinggi	Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian
2.4.3	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah orang dalam kelompok pakar dan tim ahli	36 Orang	10 Orang	27,77	Sangat Rendah	Analisis Hukum Ahli Muda/Muda
2.4.4	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7 Orang	7 Orang	100	Sangat Tinggi	Analisis Hukum Ahli Muda/Muda
2.5.1	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	8 Laporan	8 Laporan	100	Sangat Tinggi	Analisis Hukum Ahli Muda/Muda

2.5.2	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	3 Dokumen	100	Sangat Tinggi	Analisis Hukum Ahli Muda/Muda
2.6.1	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	8 Laporan	6 Laporan	75	Sedang	Analisis Hukum Ahli Muda/Muda
2.7.1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	34 Laporan	16 Laporan	47	Sangat Rendah	Analisis Hukum Ahli Muda /Kabag Persidangan dan PerUUan
2.7.2	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	14 Dokumen	12 Dokumen	85,7	Tinggi	Analisis Kebijakan Ahli Muda/Muda
2.7.3	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	112 Dokumen	108 Dokumen	96,4	Sangat Tinggi	Kasubbag TU dan Kepegawaian

Keterangan :

Capaian kinerja Sub Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota sebagian besar sudah mencapai target namun ada kegiatan yang belum mencapai target yaitu pada :

1. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi capaian kinerja 97,27%, karena ada beberapa pegawai yang tidak mengikuti karena melaksanakan tugas sesuai jabatan.
2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan capaian kinerja 95,65% karena ada kendaraan dinas roda dua yang telah dikembalikan kepada bagian Asset Setda Kabupaten Kudus.
3. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebeleur capaian kinerja 82,50% dan capaian kinerja keuangan 86,79% dikarenakan pemeliharaan mebeleur sesuai dengan kebutuhan dilapangan.
4. Sub Kegiatan Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD capaian kinerja 85,71% terdapat anggaran lebih yang tidak digunakan pada belanja tunjangan Reses, tunjangan jabatan DPRD, uang Representasi DPRD dan Tunjangan Komunikasi Intensif.
5. Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD capaian kinerja 51,11% dan karena terdapat 22 orang DPRD tidak melaksanakan Medical Check Up dikarenakan padatnya kegiatan Anggota DPRD .

- Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja kegiatan adalah koordinasi antar bagian berjalan sesuai timeline

Tabel 3.11

Capaian Kinerja Sub Kegiatan Tahun 2022 dan Tahun 2023

NO	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	TAHUN 2022			TAHUN 2023		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	19 Dokumen	19 Dokumen	100	NA	NA	NA
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	NA	NA	NA	19 Dokumen	19 Dokumen	100
1.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	100	NA	NA	NA
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	NA	NA	NA	14 Dokumen	14 Dokumen	100
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen penerima gaji dan tunjangan ASN	44 Dokumen	44 Dokumen	100	NA	NA	NA
		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	NA	NA	NA	728 Orang/Bulan	743 Orang/Bulan	100
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen pelaporan dan pengelolaan keuangan PD yang tersusun sesuai standar	NA	NA	NA	12 Dokumen	12 Dokumen	100
1.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	12 Dokumen	100
		Jumlah dokumen penerima gaji dan tunjangan ASN	NA	NA	NA	2400 Dokumen	2914 Dokumen	121
1.3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah sewa tanah dan premi asuransi kebakaran gedung yang terbayar	2 Unit	2 Unit	100	NA	NA	NA
		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	NA	NA	NA	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1.4.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang kompetensinya meningkat mengenai kinerja aparatur	220 Orang/Kali	160 Orang/Kali	72,73	NA	NA	NA
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan	NA	NA	NA	110 Orang	107 Orang	97,27

		dan Pelatihan						
1.4.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang kompetensinya meningkat mengenai implementasi perundang-undangan	244 Orang/Kali	252 Orang/Kali	103,28	5 Laporan	5 Laporan	100
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	NA	NA	NA	91 Orang	80 Orang	87,91
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	31 Jenis	31 Jenis	100	NA	NA	NA
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	NA	NA	NA	32 Paket	32 Paket	100
1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah barang habis pakai penunjang administrasi kantor, Peralatan dan Perlengkapan kantor yang tersedia	74 Jenis	74 Jenis	100	NA	NA	NA
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	NA	NA	NA	24 Paket	32 Paket	100
1.5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan Rumah Tangga	24 Jenis	24 Jenis	100	NA	NA	NA
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	NA	NA	NA	52 Paket	80 Paket	100
1.5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan makanan dan minuman kantor	12 Jenis	12 Jenis	100	NA	NA	NA
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	NA	NA	NA	91 Paket	91 Paket	100
1.5.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	9 Jenis	9 Jenis	100	NA	NA	NA
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	NA	NA	NA	21 Paket	21 paket	100
1.5.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan per UUan	29 Jenis	29 Jenis	100	NA	NA	NA
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	NA	NA	NA	24 Dokumen	24 Dokumen	100
1.5.7	Fasilitasi Kaunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	NA	NA	NA	94 Laporan	94 Laporan	100
1.5.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan perjalanan dinas	260 Orang/Kali	266 Orang/Kali	102,31	NA	NA	NA

		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	NA	NA	NA	60 Laporan	60 Laporan	100
1.6.1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	12 Unit	100	157 Unit	157 Unit	100
1.6.2	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	NA	NA	NA	80 Unit	80 Unit	100
1.6.3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah rehab/pembangunan gedung kantor	3 Unit	3 Unit	100	NA	NA	NA
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	NA	NA	NA	5 Unit	5 Unit	100
1.6.4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarpras kantor	26 Unit	26 Unit	100	NA	NA	NA
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	NA	NA	NA	377 Unit	377 Unit	100
1.7.1	Penyediaan Jasa surat menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	2 Jenis	2 Jenis	100	NA	NA	NA
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	NA	NA	NA	17 Laporan	17 Laporan	100
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, SDA dan listrik	84 Jenis/Bulan	84 Jenis/Bulan	100			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Diperlukan	NA	NA	NA	100 Laporan	100 Laporan	100
1.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pelaksana kegiatan dan tenaga kontrak yang terbayar	811 Orang/Bulan	790 Orang/Bulan	97,41	NA	NA	NA
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	NA	NA	NA	149 Laporan	149 laporan	100
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas, sarpras kantor (kendaraan dinas/operasional) yang terpelihara	38 Unit	38 Unit	100	NA	NA	NA
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	NA	NA	NA	115 Unit	110 Unit	95,65

1.8.2	Pemeliharaan Mebel	Jumlah sarpras kantor (mebeleur) yang terpelihara	20 Unit	20 Unit	100	NA	NA	NA
		Jumlah mebel yang dipelihara	NA	NA	NA	80 Unit	66 Unit	82,5
1.8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	NA	NA	NA	73 Unit	73 Unit	100
1.8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara/rehabilitasi	16 Unit	16 Unit	100	14 Unit	14 Unit	100
1.8.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarpras Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarpras kantor (peralatan kantor) yang terpelihara	32 Jenis	32 Jenis	100	NA	NA	NA
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	NA	NA	NA	128 Unit	128 Unit	100
1.9.1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang dipenuhi layanan keuangan	540 Orang/Bulan	535 Orang/Bulan	99,07	NA	NA	NA
		Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	NA	NA	NA	630 Orang/bulan	540 Orang/Bulan	85,71
1.9.2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jenis dan jumlah pakaian dinas beserta atribut yang disediakan	141 Stel	135 Stel	95,74	NA	NA	NA
		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	NA	NA	NA	225 Paket	225 Paket	100
1.9.3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang dipenuhi layanan kesehatan	45 Orang	32 Orang	71,11	NA	NA	NA
		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	NA	NA	NA	45 Orang	23 Orang	51,11
10.1	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	9567 Orang/Kali	7637 Orang/Kali	79,83	NA	NA	NA
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	NA	NA	NA	177 Laporan	177 Laporan	100
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD							
2.1.1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	528 Orang/Kali	387 Orang/Kali	73,3	8 Dokumen	7 Dokumen	87,5
2.1.2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah fasilitasi tugas DPRD terkait pembahasan ranperda	742 Orang/Kali	0	0	NA	NA	NA

		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	NA	NA	NA	7 Dokumen	7 Dokumen	100
2.1.3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah fasilitasi kegiatan kajian ranperda	870 Orang/ Kali	777	89,61	NA	NA	NA
		Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	NA	NA	NA	7 Dokumen	7 Dokumen	100
2.1.4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah fasilitasi penyusunan NA	8 Dokumen	8 Dokumen	100	NA	NA	NA
		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	NA	NA	NA	6 Dokumen	6 Dokumen	100
2.2.1	Pembahasan APBD	Jumlah fasilitasi tugas Badan Anggaran dalam/luar provinsi	816 Orang/ Kali	690 Orang/ Kali	84,56	NA	NA	NA
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	NA	NA	NA	8 Dokumen	6 Dokumen	75
2.3.1	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah fasilitasi tugas komisi A dalam /luar propinsi	13	13	100	NA	NA	NA
			1224 Orang/ Kali	858 Orang/ Kali	70,1	NA	NA	NA
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	NA	NA	NA	72 Laporan	72 Laporan	100
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah fasilitasi tugas komisi C dalam/luar propinsi	13	13	100	NA	NA	NA
		Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah fasilitasi tugas komisi D dalam/luar propinsi	13	13	100	NA	NA	NA
		Jumlah laporan pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah fasilitasi tugas komisi B dalam/luar propinsi	13	13	100	NA	NA	NA
		Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2.4.1	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Bintek DPRD	594 Orang/ Kali	648 Orang/ Kali	109,09	27 Laporan	27 Laporan	100

		Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	NA	NA	NA	16 Dokumen	16 Dokumen	100
2.4.2	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah kegiatan DPRD yang dipublikasikan	526 Orang/ Kali	550 Orang/ Kali	104,56	NA	NA	NA
		Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	NA	NA	NA	624 Dokumen	624 Dokumen	100
2.4.3	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah fasilitasi kelompok pakar dan tim ahli yang tersedia	58 Orang/ Hari	45 Orang/ Hari	77,59	NA	NA	NA
		Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	NA	NA	NA	36 Orang	10 Orang	27,78
2.4.4	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	96 Orang/ Bulan	84 Orang/ Bulan	87,5	NA	NA	NA
2.5.1	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah fasilitasi kegiatan fasilitasi tugas DPRD dalam Daerah	284 Orang/ Kali	199 Orang/ Kali	70,07	7 Orang	7 Orang	100
		Jumlah Laporan Hasil kunjungan Kerja DPRD	NA	NA	NA	8 Laporan	8 Laporan	100
2.5.2	Pelaksanaan Reses	Jumlah fasilitasi kegiatan reses	13500 Orang/ Kali	13300 Orang/ Kali	98,52	NA	NA	NA
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	NA	NA	NA	3 Dokumen	3 Dokumen	100
2.6.1	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah fasilitasi tugas Badan Kehormatan dalam/luar propinsi	216 Orang/ Kali	213 Orang/ Kali	98,61	NA	NA	NA
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	NA	NA	NA	8 Laporan	6 Laporan	75
2.7.1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah fasilitasi tugas, koordinasi, konsultasi alat kelengkapan DPRD	1716 Orang/ Kali	837 Orang/ Kali	48,78	NA	NA	NA
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	NA	NA	NA	34 Laporan	16 Laporan	47,06
2.7.2	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah fasilitasi tugas Banmus dalam/luar propinsi	1728 Orang/ Kali	1296 Orang/ Kali	75	NA	NA	NA
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	NA	NA	NA	14 Dokumen	12 Dokumen	85,71
2.7.3	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah fasilitasi Penyusunan naskah fasilitasi tugas, koordinasi, konsultasi Pimpinan DPRD	2341 Orang/ Kali	1032 Orang/ Kali	44,08	NA	NA	NA
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	NA	NA	NA	112 Dokumen	108 Dokumen	96,43

Keterangan :

Terdapat perbedaan indikator kinerja kegiatan menjadikan tidak dapat diukur/diperbandingkan (NA) dan adanya penambahan Sub Kegiatan baru.

Tabel 3.12

Capaian Kinerja Sub Kegiatan Dibandingkan dengan Target Akhir Renstra

NO	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target Akhir Renstra	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a						
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19 Dokumen	19 Dokumen	19 Dokumen	100	Sangat Tinggi
1.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	100	Sangat Tinggi
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	728 Orang/Bulan	728 Orang/Bulan	743 Orang/Bulan	101,65	Sangat Tinggi
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	Sangat Tinggi
1.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2400 Dokumen	2400 Dokumen	2914 Dokumen	121,4	Sangat Tinggi
1.3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Sangat Tinggi
1.4.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	110 Orang	110 Orang	107 Orang	97,3	Sangat Tinggi
1.4.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100	Sangat Tinggi
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	91 Laporan	91 Laporan	80 Laporan	87,9	Tinggi
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	32 Paket	32 Paket	32 Paket	100	Sangat Tinggi

		yang Disediakan					
1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Paket	24 Paket	32 Paket	133,3	Sangat Tinggi
1.5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	52 Paket	52 Paket	80 Paket	153,85	Sangat Tinggi
1.5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	91 Paket	91 Paket	91 Paket	100	Sangat Tinggi
1.5.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	21 Paket	21 Paket	21 paket	100	Sangat Tinggi
1.5.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	100	Sangat Tinggi
1.5.7	Fasilitasi Kaunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	94 Laporan	94 Laporan	94 Laporan	100	Sangat Tinggi
1.5.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	60 Laporan	60 Laporan	100	Sangat Tinggi
1.6.1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	157 Unit	157 Unit	157 Unit	100	Sangat Tinggi
1.6.2	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	80 Unit	80 Unit	80 Unit	100	Sangat Tinggi
1.6.3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	5 Unit	100	Sangat Tinggi
1.6.4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	377 Unit	377 Unit	377 Unit	100	Sangat Tinggi
1.7.1	Penyediaan Jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	100	Sangat Tinggi
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	100	Sangat Tinggi
1.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	149 Laporan	149 Laporan	149 laporan	149	Sangat Tinggi
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	115 Unit	115 Unit	110 Unit	95,65	Sangat Tinggi

1.8.2	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	80 Unit	80 Unit	66 Unit	82,5	Tinggi
1.8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	73 Unit	73 Unit	73 Unit	100	Sangat Tinggi
1.8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14 Unit	14 Unit	14 Unit	100	Sangat Tinggi
1.8.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarpras Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	128 Unit	128 Unit	128 Unit	100	Sangat Tinggi
1.9.1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	630 Orang/bulan	630 Orang/bulan	540 Orang/Bulan	85,7	Tinggi
1.9.2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	225 Paket	225 Paket	225 Paket	100	Sangat Tinggi
1.9.3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 Orang	45 Orang	23 Orang	51	Rendah
10.1	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	177 Laporan	177 Laporan	177 Laporan	100	Sangat Tinggi
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD						
2.1.1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	7 Dokumen	93,89	Sangat Tinggi
2.1.2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100	Sangat Tinggi
2.1.3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100	Sangat Tinggi
2.1.4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100	Sangat Tinggi
2.2.1	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	8 Dokumen	8 Dokumen	6 Dokumen	75	Sedang
2.3.1	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	72 Laporan	72 Laporan	72 Laporan	100	Sangat Tinggi

2.4.1	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah fasilitasi kegiatan Bintek DPRD	27 Laporan	27 Laporan	27 Laporan	100	Sangat Tinggi
		Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	16 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	100	Sangat Tinggi
2.4.2	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	624 Dokumen	624 Dokumen	624 Dokumen	100	Sangat Tinggi
2.4.3	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah orang dalam kelompok pakar dan tim ahli	36 Orang	36 Orang	10 Orang	27,77	Sangat Rendah
2.4.4	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7 Orang	7 Orang	7 Orang	100	Sangat Tinggi
2.5.1	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	100	Sangat Tinggi
2.5.2	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100	Sangat Tinggi
2.6.1.	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	8 Laporan	8 Laporan	6 Laporan	75	Sedang
2.7.1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	34 Laporan	34 Laporan	16 Laporan	47	Sangat Rendah
2.7.2	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	14 Dokumen	14 Dokumen	12 Dokumen	85,7	Tinggi
2.7.3	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	112 Dokumen	112 Dokumen	108 Dokumen	96,43	Sangat Tinggi

Hasil capaian Realisasi Sub Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2023 tersebut dapat dilihat pada aplikasi e planning sebagaimana terdapat dalam Lampiran.

3.2 EVALUASI DAN ANALISA CAPAIAN KINERJA

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran 1 : Meningkatnya kapasitas lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya pada :

1. Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah capaian kinerja 87,50% dan capaian kinerja keuangan sebesar 60,25% terdapat efisiensi sebesar 27,25%.

Efisiensi tersebut disebabkan karena :

- biaya transportasi berupa tiket pesawat tidak digunakan karena menggunakan perjalanan darat
- biaya penginapan memakai anggaran 30% tanpa menginap
- efisiensi anggaran kunjungan kerja dalam Propinsi karena jadwal kegiatan DPRD terpakai oleh pembahasan dalam Pansus

2. Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah capaian kinerja 100% dan capaian kinerja keuangan 26,29% terdapat efisiensi sebesar 27,21%.

Efisiensi tersebut disebabkan karena :

- biaya transportasi berupa tiket pesawat tidak digunakan karena menggunakan perjalanan darat
- biaya penginapan memakai anggaran 30% tanpa menginap
- efisiensi anggaran konsultasi dalam Propinsi karena kegiatan DPRD terpakai oleh pembahasan dalam Pansus

3. Sub kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan capaian kinerja kegiatan sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 98,60% terdapat efisiensi anggaran sebesar 1,40%.

Efisiensi anggaran disebabkan karena :

- biaya transportasi berupa tiket pesawat tidak digunakan karena menggunakan perjalanan darat,
- biaya penginapan memakai anggaran 30% tanpa menginap

4. Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan /Keterangan dan/atau Naskah Akademik capaian kinerja 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 41,35% terdapat efisiensi anggaran sebesar 33,65% .

Efisiensi anggaran disebabkan karena terdapat efisiensi pada pembayaran kepada pihak penyedia jasa sesuai kontrak.

5. Sub Kegiatan Pembahasan APBD capaian kinerja 75% dan capaian kinerja keuangan sebesar 57,41% terdapat efisiensi anggaran sebesar 42,59%.

Efisiensi anggaran disebabkan karena :

- biaya transportasi berupa tiket pesawat tidak digunakan karena menggunakan perjalanan darat,
- biaya penginapan memakai anggaran 30% tanpa menginap
- Efisiensi anggaran pada kunjungan kerja Dalam Propinsi yang tidak dilaksanakan karena kegiatan DPRD terpakai oleh pembahasan dalam Pansus

6. Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum, capaian kinerja sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 57,41% terdapat efisiensi anggaran sebesar 42,59%.

Efisiensi anggaran disebabkan karena :

- biaya transportasi berupa tiket pesawat tidak digunakan karena menggunakan perjalanan darat,
- biaya penginapan memakai anggaran 30% tanpa menginap

7. Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD capaian kinerja sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 62,87%, terdapat efisiensi anggaran sebesar 37,13%.

Efisiensi anggaran disebabkan karena :

Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD tercapai 100% dilaksanakan sesuai agenda kerja dalam Badan Musyawarah. Pada Pendalaman Tugas yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD melalui pihak ke 3 terdapat 9 orang DPRD tidak bisa mengikuti kegiatan karena bersamaan waktu dengan kegiatan lain, sedang untuk Bimbingan Teknik undangan partai sebanyak 31 orang tidak mengikuti kegiatan. Dan terdapat efisiensi anggaran karena biaya pendampingan (Perjalanan Dinas dan penginapan tidak digunakan).

8. Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan capaian kinerja sebesar 100% , capaian kinerja keuangan sebesar 95,46%, terdapat efisiensi anggaran sebesar 37,13%.

Efisiensi anggaran pada honorarium pejabat pengadaan barang jasa, cetak kalender cetak majalah, belanja jasa iklan dan reklame dan pemeliharaan kontruksi baliho.

9. Sub kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli, capaian kinerja sebesar 27,78% dan capaian kinerja keuangan sebesar 53,35% serta efisiensi anggaran

sebesar -25,57%.

Efisiensi anggaran disebabkan karena :

Anggaran penyediaan kelompok pakar dan tim ahli sebagian pada Alat Kelengkapan tidak digunakan karena permasalahan pada DPRD bisa terselesaikan intern DPRD dan tidak perlu menggunakan kelompok pakar dan tim ahli.

10. Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi, capaian kinerja sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 96,23% serta efisiensi anggaran sebesar 3,77%.

Efisiensi anggaran pada tingkat pendidikan honor tenaga ahli fraksi .

11. Sub Kegiatan Kunjungan Kerja Dalam Daerah, capaian kinerja 100%, dan capaian kinerja keuangan sebesar 0% terdapat efisiensi anggaran sebesar 100%.

Efisiensi anggaran disebabkan karena kunjungan kerja dalam daerah yang dilakukan Pimpinan DPRD dan Alat Kelengkapan dalam rangka pengawasan kepada OPD tidak menggunakan anggaran.

12. Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses, capaian kinerja 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 88,86% terdapat efisiensi anggaran sebesar 11,14%%.

Efisiensi anggaran disebabkan karena adanya efisiensi sewa gedung yang menggunakan sewa tratak serta adanya anggaran kegiatan Reses yang tidak digunakan oleh 2 orang anggota DPRD.

13. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kode Etik DPRD, capaian kinerja 75% dan capaian kinerja keuangan sebesar 38,79% terdapat efisiensi anggaran sebesar 8,27%.

- biaya transportasi berupa tiket pesawat tidak digunakan karena menggunakan perjalanan darat,
- biaya penginapan memakai anggaran 30% tanpa menginap
- Anggaran kunjungan kerja dalam dan luar Propinsi yang tidak dilaksanakan karena DPRD melakukan pembahasan Ranperda

14. Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD capaian kinerja 47,06% dan capaian kinerja keuangan sebesar 38,79% terdapat efisiensi anggaran sebesar 8,27%.

Efisiensi disebabkan karena :

- biaya transportasi berupa tiket pesawat tidak digunakan karena menggunakan perjalanan darat,
- biaya penginapan memakai anggaran 30% tanpa menginap

- Anggaran pada konsultasi Dalam Propinsi Badan Anggaran, konsultasi dalam propinsi Badan Kehormatan, konsultasi Dalam Propinsi Bapemperda masing-masing 3 kali, konsultasi dalam propinsi komisi A,B. Dan D masing-masing 2 kali tidak digunakan karena dengan bertambahnya waktu pembahasan Ranperda oleh 3 pansus mengakibatkan waktu pelaksanaan kegiatan DPRD lainnya terpakai oleh pembahasan dalam Pansus.

15.Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah capaian kinerja 85,71% dan capaian kinerja keuangan sebesar 45,28% terdapat efisiensi anggaran sebesar 40,44%.

- biaya transportasi berupa tiket pesawat tidak digunakan karena menggunakan perjalanan darat,
- biaya penginapan memakai anggaran 30% tanpa menginap
- agenda kunjungan kerja dalam propinsi 2 kali tidak dilaksanakan karena dengan bertambahnya waktu pembahasan Ranperda oleh 3 pansus mengakibatkan waktu pelaksanaan kegiatan DPRD lainnya terpakai oleh Pembahasan dalam Pansus.

16.Sub Kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD capaian kinerja 44,08% dan capaian kinerja keuangan sebesar 30,33% terdapat efisiensi anggaran sebesar 13,75%.

Efisiensi disebabkan karena :

- biaya transportasi berupa tiket pesawat tidak digunakan karena menggunakan perjalanan darat,
- biaya penginapan memakai anggaran 30% tanpa menginap
- Anggaran fasilitasi konsultasi dalam propinsi ketua DPRD belum terlaksana karena dengan bertambahnya waktu Pembahasan Ranperda oleh 3 pansus mengakibatkan waktu pelaksanaan kegiatan DPRD lainnya terpakai oleh Pembahasan dalam Pansus.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada Sasaran 2: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya pada :

1. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah capaian kinerja 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 66,35% terdapat efisiensi anggaran sebesar 33,65%.

Efisiensi pada biaya penggandaan dokumen evaluasi kinerja.

6. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN capaian kinerja 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 94,06% terdapat efisiensi anggaran sebesar 5,94% .
Efisiensi dikarenakan adanya mutasi pegawai.
7. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD capaian kinerja 100% dan capaian kinerja keuangan 99,58% terdapat efisiensi anggaran sebesar 0,42%.
Efisiensi dikarenakan terdapat efisiensi pada pembayaran kepada pihak penyedia jasa sesuai kontrak.
8. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi capaian kinerja 97,27%, realisasi fisik kegiatan 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 44,30% terdapat efisiensi anggaran sebesar 52,97%.
Efisiensi anggaran pada uang harian peserta Bintek karena kegiatan dilaksanakan di dalam kantor.
9. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis dan Implementasi Peraturan Perundang-Undangan capaian kinerja 87,91%, realisasi fisik kegiatan 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 83,81% terdapat efisiensi anggaran sebesar 10,14%.
Tidak semua peserta bisa mengikuti Bimbingan Teknis dikarenakan adanya kegiatan yang harus dilaksanakan didalam kantor.
10. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik capaian kinerja 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 87,75% terdapat efisiensi anggaran 12,25%.
Efisiensi pada komponen instalasi listrik yang di beli sesuai penggunaan kebutuhan.
7. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor capaian kinerja 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 87,75% terdapat efisiensi anggaran sebesar 12,25%.
Efisiensi sisa anggaran pada belanja ATK, belanja bahan untuk kegiatan bahan komputer, perabot kantor, bahan kegiatan kantor ,alat rumah tangga yang dibeli sesuai kebutuhan kantor.
8. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor capaian kinerja 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 98,08% terdapat efisiensi 1,92%.
Efisiensi pada belanja makanan dan minuman rapat serta jamuan tamu yang disesuaikan dengan kunjungan tamu yang datang.
9. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan capaian kinerja 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 72,14% terdapat efisiensi anggaran sebesar 27,86%.

Efisiensi pada belanja cetak bahan kegiatan Alat Tulis Kantor yang berupa banner dan spanduk yang dibelanjakan sesuai permintaan.

10. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan capaian kinerja 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 94,04% terdapat efisiensi anggaran sebesar 5,96%.

Efisiensi biaya harga pembayaran belanja surat kabar/majalah.

11. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD capaian kinerja 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 94,57% terdapat efisiensi anggaran sebesar 5,43%.

Efisiensi belanja kontribusi Asosiasi Sekretaris DPRD Kabupaten Se-Jawa Tengah tidak dikenakan lagi pembayaran iuran kepesertaan tahunan. Padatnya jadwal kegiatan DPRD mengakibatkan berkurangnya rapat-rapat intern kantor serta adanya efisiensi pada biaya perjalanan dinas.

12. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel capaian kinerja 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 98,78% terdapat efisiensi anggaran sebesar 1,22%.

Efisiensi adanya penyesuaian harga penawaran dan negosiasi pada saat pemaketan pekerjaan sehingga nilai kontrak yang didapatkan lebih rendah dari pagu anggaran.

13. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya capaian kinerja 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 92,74% terdapat efisiensi sebesar 7,26%.

Efisiensi dikarenakan Terdapat efisiensi pada pembayaran kepada pihak penyedia jasa sesuai kontrak.

14. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya capaian kinerja 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 96,74% dan terdapat efisiensi anggaran 3,26%.

Efisiensi dikarenakan Terdapat sisa anggaran pada pembayaran kepada pihak penyedia jasa sesuai kontrak.

15. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat capaian kinerja 100% dan capaian kinerja keuangan 96,74% dan terdapat efisiensi anggaran 3,26%.

Efisiensi pada biaya paket pengiriman.

16. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik capaian kinerja 100% dan capaian kinerja keuangan 63,55% terdapat efisiensi anggaran sebesar 36,45%.

Efisiensi dikarenakan terdapat sisa anggaran pada belanja tagihan telepon,

tagihan air, tagihan listrik dan belanja internet dan kebutuhan di gedung DPRD baru yang belum sepenuhnya digunakan.

17. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor capaian kinerja 100% dan capaian kinerja keuangan 97,42% terdapat efisiensi anggaran sebesar 2,58%.

Efisiensi dikarenakan terdapat sisa anggaran belanja jasa tenaga administrasi dan pembelian souvenir/cinderamata sesuai dengan kebutuhan.

18. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan capaian kinerja 95,65% dan capaian kinerja keuangan 87,42% terdapat efisiensi anggaran sebesar 8,23%

Efisiensi karena terdapat sisa anggaran pemeliharaan kendaraan dinas roda dua yang telah dikembalikan kepada bagian Asset Setda Kabupaten Kudus.

19. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebeleur capaian kinerja 82,50% dan capaian kinerja keuangan 86,79% terdapat efisiensi anggaran -4,29%.

Efisiensi dikarenakan pemeliharaan mebeleur sesuai dengan kebutuhan dilapangan.

20. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya capaian kinerja 100% dan capaian kinerja keuangan 84,09% terdapat efisiensi anggaran sebesar 15,91%.

Efisiensi dikarenakan sisa anggaran pada pembayaran kepada pihak penyedia jasa sesuai kontrak.

21. Sub Kegiatan Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD capaian kinerja 85,71% dan capaian kinerja keuangan 94,61% terdapat efisiensi anggaran sebesar -8,90%.

Efisiensi pada belanja tunjangan Reses, tunjangan jabatan DPRD, uang Representasi DPRD dan Tunjangan Komunikasi Intensif.

22. Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD capaian kinerja 100% dan capaian kinerja keuangan 89,48% terdapat efisiensi anggaran sebesar 10,52%.

Efisiensi dikarenakan terdapat sisa anggaran pada pembayaran kepada pihak penyedia jasa sesuai kontrak.

23. Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD capaian kinerja 51,11% dan capaian kinerja keuangan 41,96% terdapat efisiensi anggaran sebesar 9,15%.

Efisiensi karena terdapat 22 orang DPRD tidak melaksanakan Medical Check Up dikarenakan padatnnya kegiatan Anggota DPRD.

24. Sub Kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD capaian kinerja 100% dan capaian kinerja keuangan 87,53% terdapat efisiensi anggaran sebesar 12,47%.

Kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sudah dilaksanakan sesuai jadwal kegiatan rapat-rapat DPRD.

Terdapat efisiensi anggaran pada jumlah peserta rapat.

3.3 Permasalahan Yang Dihadapi

3.3.1 IKU Sekretariat DPRD mengacu pada salah satu fungsi DPRD yaitu Fungsi Legislasi yang pada pelaksanaannya amat lekat dengan dinamika politik yang tidak dapat dikendalikan oleh Sekretariat DPRD.

Hal tersebut menjadikan masalah yang berat dan sulit untuk Sekretariat DPRD untuk memenuhi target kinerja IKU PD agar tercapai.

3.3.2 Dengan terbitnya Perpres 53 Tahun 2023 menjadikan masalah tersendiri bagi Sekretariat DPRD, secara akuntabilitas tidak dapat dibuktikan pertanggungjawabannya, karena tidak melampirkan bukti tiket akomodasi maupun penginapan saat melakukan perjalanan dinas. Dikhawatirkan saat pemeriksaan BPK meminta bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas namun tidak dapat menunjukkan buktinya sehingga pengembalian dana menjadi kesulitan terbesar bagi Sekretariat DPRD dalam meminta kembali anggaran yang telah digunakan ke masing-masing Anggota DPRD.

3.4 Rencana Tindak Lanjut

3.4.1 Mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan ke Perangkat Daerah pengampu dalam hal ini Bappeda, Inspektorat dan Bagian Organisasi;

3.4.2 Mengkomunikasikan ke Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melaksanakan kegiatan yang tertuang dalam DPA Sekretariat DPRD sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

Sekretariat DPRD memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga setiap pelaksanaan kegiatan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus dan memfasilitasi kegiatan DPRD Kabupaten Kudus dapat dipertanggungjawabkan.

3.5 Akuntabilitas Keuangan

A. Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus dan DPRD Kabupaten Kudus pada tahun anggaran 2023, didukung dengan anggaran sebesar Rp.95.182.188.176,- Anggaran tersebut bersumber dari APBD.

Secara ringkas alokasi penggunaan sebagai berikut :

I. BELANJA OPERASI :

Belanja Pegawai : Rp. 39.412.525.000,-
 Belanja Barang dan Jasa : Rp. 48.911.893.690,-

II. BELANJA MODAL :

Belanja Modal Peralatan dan Mesin : Rp. 2.979.387.900,-
 Belanja Modal Gedung dan Bangunan : Rp. 3.870.909.586,-
 Belanja modal jalan,jaringan dan irigasi : Rp. 7.472.000,-

Adapun alokasinya dapat dijelaskan sebagai berikut :

Anggaran pada tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp. 95.182.188.176,- terealisasi sebesar Rp. 75.935.587.850,- atau 79,78%. Pada tahun 2022 terealisasi sebesar Rp. 75.482.332.424,- atau sebesar 77,69%.

Dilihat dari sisi penyerapan anggaran Tahun 2023, apabila dibandingkan tahun 2022 maka terjadi peningkatan sebesar 2 %.

Tabel 3.13

Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Sasaran Tahun 2023

NO	Sasaran	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	Meningkatnya kapasitas lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	80%	100%	125%	39.033.526.000,	23.961.877.857	61,39%	28,61%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	85	Masih dalam proses	Masih dalam proses	56.148.662.176	51.973.709.003	92,56%	-22,23%

Tabel 3.14

Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2023

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran/Kinerja	Realisasi	Persentase
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	56.148.662.176	51.973.709.993	92,56%
	Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Perangkat Daerah			
	Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Perangkat Daerah			
	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran/Kinerja		
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.062.520	9.056.600	90,00 %
	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Sesuai Standar	33 dokumen	33 dokumen	100 %
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.168.760	7.136.500	99,55 %
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19 Dokumen	19 Dokumen	100 %
1.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.893.760	1.920.100	66,35 %
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14 Laporan	14 Laporan	100 %
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.198.768.000	3.945.185.839	93,96 %
	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang sesuai standar	3.140 Laporan	3.667 Laporan	100 %
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.080.313.000	3.838.110.939	94,06 %
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	728 Orang/Bulan	743 Orang/Bulan	100 %
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	113.220.000	101.890.000	89,99 %
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %
1.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.235.000	5.184.900	99,04 %

	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.400 Dokumen	2.914 Dokumen	100 %
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	101.000.000	100.575.000	99,58 %
	Jumlah Dokumen Administrasi BMD sesuai standar	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
1.3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	101.000.000	100.575.000	99,58 %
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	743.240.240	603.823.982	81,24 %
	Jumlah laporan hasil pengelolaan kepegawaian sesuai standar	6 Laporan	9 Laporan	100 %
1.4.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	48.364.240	21.426.000	44,30 %
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	110 Orang	107 Orang	97,27 %
1.4.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	694.876.000	582.397.982	83,81 %
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	5 Laporan	5 Laporan	100 %
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	91 Orang	80 Orang	87,91 %
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.840.382.456	1.267.291.495	68,86 %
	Cakupan Layanan Pendukung Perkantoran sesuai standar	98 Persen	100 Persen	100 %
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	179.057.376	119.582.000	66,78 %
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	32 Paket	32 Paket	100 %
1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	191.612.000	168.140.044	87,75 %
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Paket	32 Paket	100%

1.5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	220.359.600	218.269.615	99,05 %
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	52 Paket	80 Paket	100 %
1.5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	136.545.000	133.926.500	98,08 %
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	91 Paket	91 Paket	100 %
1.5.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	71.603.000	51.654.300	72,14 %
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	21 Paket	21 Paket	100 %
1.5.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	53.400.000	50.220.000	94,04 %
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	24 Dokumen	100 %
1.5.7	Fasilitasi Kaunjungan Tamu	756.740.000	306.980.500	40,57 %
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	94 Laporan	94 Laporan	100 %
1.5.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	231.065.480	218.518.536	94,57 %
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	60 Laporan	100 %
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.035.365.694	5.631.182.232	93,30 %
	Jumlah BMD yang diadakan sesuai ketentuan (perpres pengadaan barjas dan RKBU)	467 Unit	619 Unit	100 %
1.6.1	Pengadaan Mebel	937.358.000	925.931.284	98,78 %
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	157 Unit	157 Unit	100 %
1.6.2	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	680.061.000	640.322.000	94,16 %
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	80 Unit	80 Unit	100 %
1.6.3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.210.056.194	2.976.956.248	92,74 %
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	100 %
1.6.4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.207.890.500	1.087.972.700	90,07 %

	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	377 Unit	377 Unit	100 %
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	2.219.663.707	1.860.974.658	83,84 %
	Jumlah Laporan Penggunaan Jasa Penunjang Urusan yang sesuai ketentuan	266 Laporan	266 Laporan	100 %
1.7.1	Penyediaan Jasa surat menyurat	13.000.000	12.576.500	96,74 %
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17 Laporan	17 Laporan	100 %
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	889.915.707	565.564.091	63,55 %
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 Laporan	100 Laporan	100 %
1.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.316.748.000	1.282.834.067	97,42 %
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	149 Laporan	149 Laporan	100 %
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.866.184.059	3.598.630.258	93,08 %
	Jumlah Unit BMD yang dipelihara sesuai standar	405 Unit	391 unit	96,54 %
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	584.370.000	510.851.589	87,42 %
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	115 Unit	110 unit	95,65 %
1.8.2	Pemeliharaan Mebel	56.570.000	49.095.000	86,79 %
	Jumlah mebel yang dipelihara	80 unit	66 Unit	82,50 %
1.8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	120.709.000	74.810.000	61,98 %
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	73 Unit	73 Unit	100 %
1.8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.655.114.059	2.585.949.223	97,40 %
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14 Unit	14 Unit	100 %
1.8.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarpras Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	449.421.000	377.924.446	84,09 %

	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	128 Unit	128 Unit	100 %
1.9	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	36.225.408.500	34.161.672.298	94,30 %
	Jumlah Fasilitas Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100 %
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	586 Orang/Bulan/Paket	637 Orang/Bulan/Paket	100 %
1.9.1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	35.210.152.000	33.312.579.640	94,61 %
	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	630 Orang/Bulan	540 Orang/Bulan	85,71 %
1.9.2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	890.347.500	796.680.000	89,48 %
	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	225 Paket	225 Paket	100 %
1.9.3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	124.909.000	52.412.658	41,96 %
	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 Orang	23 Orang	51,11 %
10.	Layanan Administrasi DPRD	908.587.000	795.317.631	87,53 %
	Jumlah Layanan Administrasi DPRD	177 Kali	177 Kali	100 %
10.1	Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	908.587.000	795.317.631	87,53 %
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	177 Laporan	177 Laporan	100 %
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	39.033.526.000	23.961.877.857	61,39%
2.1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	5.557.144.000	3.356.186.826	60,39 %
	Jumlah Fasilitas Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	28 Kali	27 Kali	96,43 %
2.1.1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	822.192.000	495.395.960	60,25 %
	Jumlah dokumen hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	8 Dokumen	7 Dokumen	87,50 %
2.1.2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1.592.804.000	418.716.370	26,29 %
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	100 %

2.1.3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	2.542.148.000	1.850.463.496	72,79 %
	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan	7 Dokumen	7 Dokumen	100 %
2.1.4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	600.000.000	591.611.000	98,60 %
	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	6 Dokumen	6 Dokumen	100 %
2.2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	1.715.666.000	709.379.669	41,35 %
	Jumlah Fasilitasi tugas Badan Anggaran yang terealisasi	8 Kali	6 Kali	75,00 %
2.2.1	Pembahasan APBD	1.715.666.000	709.379.669	41,35 %
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	8 Dokumen	6 Dokumen	75,00 %
2.3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	7.648.866.000	4.391.396.617	57,41 %
	Jumlah fasilitasi kegiatan pengawasan Pemerintahan yang dilakukan DPRD	72 Kali	72 Kali	100 %
2.3.1	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	7.648.866.000	4.391.396.617	57,41 %
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	72 Laporan	72 Laporan	100 %
2.4	Peningkatan Kapasitas DPRD	10.308.390.000	8.908.466.834	86,42 %
	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	698 Laporan	684 Laporan	98,56 %
2.4.1	Pendalaman Tugas DPRD	2.961.334.000	1.861.663.834	62,87 %
	Jumlah fasilitasi kegiatan BinteK DPRD	27 Laporan	27 Laporan	100 %
	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	16 Dokumen	16 Dokumen	100 %
2.4.2	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	6.630.206.000	6.528.029.000	98,46 %
	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	624 Dokumen	624 Dokumen	100 %
2.4.3	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	398.850.000	212.774.000	53,35 %
	Jumlah orang dalam kelompok Pakar dan Tim Ahli	36 orang	10 orang	27,78%
2.4.4	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	318.000.000	306.000.000	96,23 %
	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7 Orang	7 Orang	100 %
2.5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.926.249.000	1.708.274.000	88,68 %

	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat	11 Kali	11 Kali	100 %
2.5.1	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	3.750.00	0	0,00 %
	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	8 Laporan	8 Laporan	100 %
2.5.2	Pelaksanaan Reses	1.922.499.000	1.708.274.000	88,86 %
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %
2.6	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	350.634.000	151.507.970	43,21 %
	Jumlah SDM anggota DPRD yang memahami aturan	6 Laporan	6 Laporan	100 %
2.6.1.	Pengawasan Kode Etik DPRD	350.634.000	151.507.970	43,21 %
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	8 Laporan	6 Laporan	75,00 %
2.7	Fasilitasi Tugas DPRD	11.526.577.000	4.736.665.941	41,09 %
	Jumlah SDM anggota DPRD yang memahami aturan	160 Dokumen	136 dokumen	85,00 %
2.7.1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	2.220.168.000	861.271.843	38,79 %
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	34 Laporan	16 Laporan	47,06 %
2.7.2	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	3.066.074.000	1.388.215.518	45,28 %
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	14 Dokumen	12 dokumen	85,71 %
2.7.3	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	6.240.335.000	2.487.178.580	39,86 %
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	112 dokumen	108 dokumen	96,43 %

Capaian realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel 3.14 serta pada lampiran tabel Realisasi Tujuan, Sasaran dan Indikator Utama, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada aplikasi E-Planning sebagaimana terlampir.

Penjelasan capaian realisasi anggaran Program sebagai berikut :

Capaian realisasi anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota tahun 2023 mencapai 92,56%.

Capaian realisasi anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota pada tahun 2022 mencapai 91,94% . Capaian ini mengalami kenaikan 0,62% dari tahun 2022.

Keberhasilan pencapaian sasaran 1.2 tidak terlepas dari dilaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota dengan kegiatan antara lain :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
10. Layanan Administrasi DPRD

Pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD pada tahun 2023 tercapai 61,39% .

Pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD pada tahun 2022 tercapai penyerapan anggaran sebesar 55,05 % . Realisasi anggaran ini mengalami kenaikan persentase capaian sebesar 6,34% dari tahun 2022.

Hal-hal yang mempengaruhi kenaikan pencapaian realisasi anggaran ini disebabkan antara lain :

- a. Adanya perubahan metode pembayaran dari at cost ke metode pembayaran lumpsum berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pada belanja perjalanan dinas Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
- b. Adanya pergeseran anggaran Sub kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD, Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah, Fasilitasi Tugas DPRD, Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah pada Belanja Perjalanan Dinas tiket pesawat yang tidak digunakan.

Hal- hal yang mempengaruhi pencapaian realisasi anggaran yang kurang maksimal pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD ini disebabkan antara lain :

1. Adanya biaya transportasi berupa tiket pesawat pada perjalanan dinas DPRD yang tidak digunakan karena kegiatan kunjungan kerja DPRD menggunakan jalur darat dan pengambilan biaya penginapan 30%.
2. Kegiatan Kunjungan Kerja Dalam Daerah dilaksanakan tanpa menggunakan anggaran.
3. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi dalam Propinsi pada Pimpinan dan Alat Kelengkapan tidak dilaksanakan karena dengan bertambahnya waktu pembahasan Ranperda oleh 3 Pansus mengakibatkan waktu pelaksanaan kegiatan DPRD lainnya terpakai pembahasan dalam Pansus.

4. Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD tercapai 100% dilaksanakan sesuai agenda kerja dalam Badan Musyawarah. Pada Pendalaman Tugas yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD melalui pihak ke 3 terdapat 9 orang DPRD tidak bisa mengikuti kegiatan karena bersamaan waktu dengan kegiatan lain, sedang untuk Bimbingan Teknik undangan partai sebanyak 31 orang tidak mengikuti kegiatan. Dan terdapat efisiensi anggaran karena biaya pendampingan (Perjalanan Dinas dan penginapan tidak digunakan).
5. Anggaran Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli tidak bisa terserap seluruhnya karena anggaran jasa pendampingan kegiatan pada Sekretariat DPRD untuk tim advokasi pembangunan strategis sudah dianggarkan di Bagian Barang Jasa Setda Kabupaten Kudus. Anggaran jasa pendampingan analisa pengkajian komisi A,C,D, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, Bapemperda tidak terserap digunakan karena tidak ada permasalahan hukum pada masing-masing alat kelengkapan.
6. Kegiatan pada Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah pada Kunjungan Kerja Dalam Propinsi tidak terlaksana dua kali.
7. Kegiatan Pembahasan Ranperda pada Belanja Perjalanan Dinas Biasa tidak digunakan karena 8 Ranperda usulan Bupati tidak dikirim ke DPRD sehingga tidak ada pembahasan Ranperda tersebut.
8. Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan sudah selesai dilaksanakan sesuai Rapat pada Badan Musyawarah namun terdapat 46 orang DPRD yang tidak mengikuti kegiatan yang dilaksanakan 7 kali , sehingga anggaran belanja sosialisasi dan perjalanan dinas biasa tidak terserap maksimal.

Hal- hal yang mempengaruhi pencapaian realisasi anggaran yang kurang maksimal pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ini disebabkan antara lain :

1. Pada belanja pengadaan barang dan bangunan gedung kantor terdapat sisa anggaran pada pembayaran kepada pihak penyedia jasa sesuai kontrak.
2. Pada Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik digunakan sesuai kebutuhan dilapangan dan adanya gedung DPRD baru yang belum dipakai / digunakan secara maksimal.
3. Pada belanja rutin kantor seperti Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya, Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya,

Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya, Pemeliharaan Mebel, anggaran digunakan sesuai kebutuhan di lapangan.

4. Pada Belanja Gaji dan Tunjangan ASN terdapat sisa anggaran dikarenakan adanya mutasi pegawai.
5. Pada Belanja Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD tidak terserap maksimal pada tunjangan DPRD.
6. Pada Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD tidak terserap maksimal pada pembayaran kepada pihak penyedia jasa sesuai kontrak.
7. Kegiatan BinteK Implementasi Peraturan Perundang-Undangan tidak terserap maksimal karena padatnya kegiatan di Sekretariat DPRD sehingga pengiriman pegawai disesuaikan dengan jadwal kegiatan.
8. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi dilaksanakan di dalam kantor sehingga uang harian pegawai tidak terserap.
9. Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up tidak terserap karena terdapat 22 orang DPRD tidak melaksanakan Medical check Up dikarenakan padatnya jadwal kegiatan .

B. SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA)

Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus pada tahun 2023 terdapat sisa lebih perhitungan anggaran sebesar Rp. 19.187.827.326,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.15
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2023

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran/Kinerja	Realisasi	Silpa
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	56.148.662.176	51.973.709.993	4.170.956.183,-
	Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Perangkat Daerah			
	Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Perangkat Daerah			
	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran/Kinerja		
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.062.520	9.056.600	1.005.920,-
	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Sesuai Standar	33 dokumen	33 dokumen	

1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.168.760	7.136.500	32.260,-
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19 Dokumen	19 Dokumen	
1.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.893.760	1.920.100	973.660,-
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14 Laporan	14 Laporan	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.198.768.000	3.945.185.839	253.582.161,-
	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang sesuai standar	3.140 Laporan	3.667 Laporan	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.080.313.000	3.838.110.939	242.202.061,-
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	728 Orang/Bulan	743 Orang/Bulan	
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	113.220.000	101.890.000	11.330.000,-
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	
1.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.235.000	5.184.900	50.100,-
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.400 Dokumen	2.914 Dokumen	
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	101.000.000	100.575.000	425.000,-
	Jumlah Dokumen Administrasi BMD sesuai standar	1 Dokumen	1 Dokumen	
1.3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	101.000.000	100.575.000	425.000,-
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	743.240.240	603.823.982	139.416.258,-
	Jumlah laporan hasil pengelolaan kepegawaian sesuai standar	6 Laporan	9 Laporan	
1.4.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	48.364.240	21.426.000	26.938.240,-
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	110 Orang	107 Orang	
1.4.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	694.876.000	582.397.982	112.478.018,-
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	5 Laporan	5 Laporan	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	91 Orang	80 Orang	
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.840.382.456	1.267.291.495	569.094.961,-

	Cakupan Layanan Pendukung Perkantoran sesuai standar	98 Persen	100 Persen	
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	179.057.376	119.582.000	59.475.376,-
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	32 Paket	32 Paket	
1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	191.612.000	168.140.044	23.471.956,-
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Paket	32 Paket	
1.5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	220.359.600	218.269.615	2.089.985,-
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	52 Paket	80 Paket	
1.5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	136.545.000	133.926.500	2.618.500,-
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	91 Paket	91 Paket	
1.5.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	71.603.000	51.654.300	19.948.700,-
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	21 Paket	21 Paket	
1.5.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	53.400.000	50.220.000	3.180.000,-
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	24 Dokumen	
1.5.7	Fasilitasi Kaunjungan Tamu	756.740.000	306.980.500	449.759.500,-
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	94 Laporan	94 Laporan	
1.5.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	231.065.480	218.518.536	12.546.944,-
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	60 Laporan	
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.035.365.694	5.631.182.232	404.183.462,-
	Jumlah BMD yang diadakan sesuai ketentuan (perpres pengadaan barjas dan RKBU)	467 Unit	619 Unit	
1.6.1	Pengadaan Mebel	937.358.000	925.931.284	11.426.716,-
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	157 Unit	157 Unit	
1.6.2	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	680.061.000	640.322.000	39.739.000,-
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	80 Unit	80 Unit	
1.6.3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.210.056.194	2.976.956.248	233.099.946,-
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	
1.6.4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.207.890.500	1.087.972.700	119.917.800,-
	Jumlah Unit Sarana dan	377 Unit	377 Unit	

	Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	2.219.663.707	1.860.974.658	358.689.049,-
	Jumlah Laporan Penggunaan Jasa Penunjang Urusan yang sesuai ketentuan	266 Laporan	266 Laporan	
1.7.1	Penyediaan Jasa surat menyurat	13.000.000	12.576.500	423.500,-
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17 Laporan	17 Laporan	
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	889.915.707	565.564.091	324.351.616,-
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 Laporan	100 Laporan	
1.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.316.748.000	1.282.834.067	33.913.933,-
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	149 Laporan	149 Laporan	
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.866.184.059	3.598.630.258	267.553.801,-
	Jumlah Unit BMD yang dipelihara sesuai standar	405 Unit	391 unit	
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	584.370.000	510.851.589	73.518.411,-
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	115 Unit	110 unit	
1.8.2	Pemeliharaan Mebel	56.570.000	49.095.000	7.475.000,-
	Jumlah mebel yang dipelihara	80 unit	66 Unit	
1.8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	120.709.000	74.810.000	45.899.000,-
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	73 Unit	73 Unit	
1.8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.655.114.059	2.585.949.223	69.164.836,-
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14 Unit	14 Unit	
1.8.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarpras Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	449.421.000	377.924.446	71.496.554,-
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	128 Unit	128 Unit	
1.9	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	36.225.408.500	34.161.672.298	2.063.736.202,-
	Jumlah Fasilitas Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	3 Kegiatan	3 Kegiatan	
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	588 Orang/Bulan/Paket	637 Orang/Bulan/Paket	
1.9.1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	35.210.152.000	33.312.579.640	1.897.572.360,-

	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	630 Orang/Bulan	540 Orang/Bulan	
1.9.2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	890.347.500	796.680.000	93.667.500,-
	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	225 Paket	225 Paket	
1.9.3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	124.909.000	52.412.658	72.496.342,-
	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 Orang	23 Orang	
10.	Layanan Administrasi DPRD	908.587.000	795.317.631	113.269.369,-
	Jumlah Layanan Administarsi DPRD	177 Kali	177 Kali	
10.1	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	908.587.000	795.317.631	113.269.369,-
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	177 Laporan	177 Laporan	
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	39.033.526.000	23.961.877.857	15.071.648.143,-
2.1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	5.557.144.000	3.356.186.826	2.200.957.174,-
	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	28 Kali	27 Kali	
2.1.1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	822.192.000	495.395.960	326.796.040,-
	Jumlah dokumen hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	8 Dokumen	7 Dokumen	
2.1.2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1.592.804.000	418.716.370	1.174.087.630,-
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	
2.1.3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	2.542.148.000	1.850.463.496	691.684.504,-
	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan	7 Dokumen	7 Dokumen	
2.1.4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	600.000.000	591.611.000	8.389.000,-
	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	6 Dokumen	6 Dokumen	
2.2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	1.715.666.000	709.379.669	1.006.286.331,-
	Jumlah Fasilitasi tugas Badan Anggaran yang terealisasi	8 Kali	6 Kali	
2.2.1	Pembahasan APBD	1.715.666.000	709.379.669	1.006.286.331,-
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	8 Dokumen	6 Dokumen	
2.3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	7.648.866.000	4.391.396.617	3.257.469.383,-
	Jumlah fasilitasi kegiatan pengawasan Pemerintahan yang dilakukan DPRD	72 Kali	72 Kali	
2.3.1	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	7.648.866.000	4.391.396.617	3.257.469.383,-
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan	72 Laporan	72 Laporan	

	Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum			
2.4	Peningkatan Kapasitas DPRD	10.308.390.000	8.908.466.834	1.399.923.166,-
	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	698 Laporan	684 Laporan	
2.4.1	Pendalaman Tugas DPRD	2.961.334.000	1.861.663.834	1.099.670.166,-
	Jumlah fasilitasi kegiatan BinteK DPRD	27 Laporan	27 Laporan	
	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	16 Dokumen	16 Dokumen	
2.4.2	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	6.630.206.000	6.528.029.000	102.177.000,-
	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	624 Dokumen	624 Dokumen	
2.4.3	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	398.850.000	212.774.000	186.076.000,-
	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	36 Orang	10 Orang	
2.4.4	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	318.000.000	306.000.000	12.000.000,-
	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7 Orang	7 Orang	
2.5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.926.249.000	1.708.274.000	217.975.000,-
	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat	11 Kali	11 Kali	
2.5.1	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	3.750.00	0	3.750.000,-
	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	8 Laporan	8 Laporan	
2.5.2	Pelaksanaan Reses	1.922.499.000	1.708.274.000	214.225.000,-
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	3 Dokumen	
2.6	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	350.634.000	151.507.970	199.126.030,-
	Jumlah SDM anggota DPRD yang memahami aturan	6 Laporan	6 Laporan	
2.6.1	Pengawasan Kode Etik DPRD	350.634.000	151.507.970	199.126.030,-
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	8 Laporan	6 Laporan	
2.7	Fasilitasi Tugas DPRD	11.526.577.000	4.736.665.941	6.789.911.059,-
	Jumlah SDM anggota DPRD yang memahami aturan	160 Dokumen	136 dokumen	
2.7.1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	2.220.168.000	861.271.843	1.358.896.157,-
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	34 Laporan	16 Laporan	
2.7.2	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	3.066.074.000	1.388.215.518	1.677.858.482,-
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	14 Dokumen	12 dokumen	
2.7.3	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	6.240.335.000	2.487.178.580	3.753.156.420,-
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPR	112 dokumen	108 dokumen	

Penjabaran Laporan realisasi anggaran dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) bisa dilihat pada laporan LKJIP terlampir.

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus Tahun 2023, disimpulkan bahwa secara umum Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus telah memperlihatkan pencapaian kinerja atas sasaran strategisnya.

Sesuai dengan ikhtisar hasil pengukuran capaian kinerja terhadap 2 (dua) sasaran strategis sebagai berikut :

Angka Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2023 sebesar 125%. Capaian kinerja ini termasuk kategori sangat baik.

Faktor pendukung keberhasilan capaian sasaran adalah :

1. DPRD telah melaksanakan kegiatan pembahasan Ranperda sesuai hasil Badan Musyawarah yang disepakati dalam Rapat Badan Musyawarah
2. Adanya perubahan Propemperda tahun 2023 yang semula 22 Ranperda menjadi 14 Ranperda. Perubahan ini disebabkan karena sampai akhir bulan Desember 2023, Ranperda yang diusulkan oleh Bupati belum dikirimkan ke DPRD, sehingga ke-14 Ranperda bisa dibahas semua.

Angka Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023 masih dalam proses penilaian. Angka capaian kinerja Sasaran Tahun 2022 sebesar 87%. Dan angka tersebut mengalami penurunan sebesar 23,9% dari capaian kinerja Tahun 2021 sebesar 110,90%. Capaian kinerja tersebut termasuk kategori baik.

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja sasaran adalah :

Meningkatnya kualitas kinerja Perangkat Daerah meliputi Implementasi SAKIP, Reformasi Birokrasi, Kematangan Kelembagaan, Realisasi Renja dan Realisasi Anggaran.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD dan DPRD Kabupaten Kudus pada Tahun Anggaran 2023, berikut ini akan kami sampaikan hal – hal Pelaksanaan APBD Tahun 2023.

Pada Tahun 2023 Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus mendapatkan anggaran sebesar Rp.95.182.188.176,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.75.935587.850 ,- atau sebesar 79,78%. Anggaran tersebut terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai dan

Belanja Barang dan Jasa. Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin , Belanja Modal Gedung dan Bangunan dan Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi.

Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran realisasi anggaran dicapai dengan rincian 2 program sebagai berikut ;

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 92,56%
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD sebesar 61,39%

A. PERMASALAHAN ATAU KENDALA YANG BERKAITAN DENGAN PENCAPAIAN EVALUASI KINERJA

Permasalahan atau kendala yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus selama tahun 2023 antara lain :

- Penganggaran yang berkaitan dengan kegiatan agenda kerja DPRD harus difasilitasi semuanya sehingga berpengaruh terhadap capaian kinerja yang ada pada Sekretariat DPRD.

B. PENYESUAIAN PERENCANAAN KINERJA YANG AKAN DIHADAPI BERIKUTNYA

Penyesuaian yang dilakukan sehubungan dengan perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya :

- Pelaporan kinerja tahun 2023 sebagai dasar pengalokasian RAPBD tahun 2024 dan tahun 2025.
- Informasi dalam laporan kinerja dimanfaatkan sebagai strategi pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target kinerja.

C. PERUBAHAN BUDAYA KINERJA ORGANISASI

Pemahaman oleh pengampu kegiatan mengenai perencanaan kinerja yang baik meliputi perencanaan anggaran, target indikator serta outcome kegiatan.

4.2 SARAN

Terhadap kondisi tersebut, strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus di masa mendatang antara lain :

1. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus terkait perencanaan kinerja.
2. Peningkatan Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah Anggota DPRD
3. Meningkatkan koordinasi antar bagian diintern Sekretariat DPRD.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 untuk Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang.

Kudus, Januari 2024
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN KUDUS



Drs. AGUS BUDI SATRIYO, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 196408251986031029

LAMPIRAN- LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl.R.Agil Kusumadya No. 44 Kudus Kode Pos 59343
Telp (0291) 435111 Fax (0291) 435594
email : dprd@kuduskab.go.id Website : dprd.kuduskab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. AGUS BUDI SATRIYO, MH
Jabatan : SEKRETARIS DPRD KABUPATEN KUDUS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : Dr. HM. HARTOPO, ST, MM, MH
Jabatan : BUPATI KUDUS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kudus, 1 September 2023

Pihak Pertama,

Pihak Kedua

Dr. HM. HARTOPO, ST, MM, MH


Drs. AGUS BUDI SATRIYO, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19640825 198603 1 029

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUDUS

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	83,00 Nilai
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase jumlah ranperda yang disahkan dari jumlah ranperda yang dibahas	80,00 %

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	55.048.113.164	
2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	29.468.195.000	
TOTAL		84.516.308.164	



Dr. HM. HARTOPO, ST, MM, MH

Kudus, 1 September 2023
 SEKRETARIS DPRD,



Drs. AGUS HADI SATRIYO, MH
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19640825 198603 1 029



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl.R.Agil Kusumadya No. 44 Kudus Kode Pos 59343
Telp (0291) 435111 Fax (0291) 435594
email : dprd@kuduskab.go.id Website : dprd.kuduskab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. AGUS BUDI SATRIYO, MH
Jabatan : SEKRETARIS DPRD KABUPATEN KUDUS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama:


Nama : BERGAS C PENANGGUNGAN, S.SOS, M.Si
Jabatan : Pj. BUPATI KUDUS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua:

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua,
BERGAS C PENANGGUNGAN, S.SOS, M.Si

Kudus, 20 Oktober 2023
Pihak Pertama,

Drs. AGUS BUDI SATRIYO, MH
-Pembina Utama Muda
NIP. 19640825 198603 1 029

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUDUS**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	83,00 Nilai
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase jumlah ranperda yang disahkan dari jumlah ranperda yang dibahas	80,00 %

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	56.148.662.176	
2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	39.033.526.000	
TOTAL		95.182.188.176	


 BUPATI KUDUS,

 BERGAS C. PERANGGUNGAN, S.SOS, M.Si

Kudus, 20 Oktober 2023
 SEKRETARIS DPRD,


 Drs. AGUS BUDI SATRIYO, MH
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19640825 198603 1 029



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl.R.Agil Kusumadya No. 44 Kudus Kode Pos 59343
Telp (0291) 435111 Fax (0291) 435594
email : dprd@kuduskab.go.id Website : dprd.kuduskab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IMAM SOFWAN, SH
Jabatan : KEPALA BAGIAN UMUM DAN HUMAS SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUDUS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : Drs. AGUS BUDI SATRIYO, MH
Jabatan : SEKRETARIS DPRD KABUPATEN KUDUS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua;


Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Drs. AGUS BUDI SATRIYO, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19640825 198603 1 029

Kudus, 20 Oktober 2023
Pihak Pertama,


IMAM SOFWAN, SH
Pembina
NIP. 197804222005011012

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUDUS

KEPALA BAGIAN UMUM DAN HUMAS

No.	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan)	Target
1	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Perangkat Daerah	85 Indeks
2	Persentase Pelaksanaan Program Kerja DPRD yang telah disahkan	100 persen
	Jumlah Dokumen Administrasi BMD sesuai standar	1 Dokumen
	Jumlah laporan hasil pengelolaan kepegawaian sesuai standar	6 Laporan
	Cakupan Layanan Pendukung Perkantoran sesuai standar	98 Persen
	Jumlah BMD yang diadakan sesuai ketentuan (perpres pengadaan barjas dan RKBK)	467 Unit
	Jumlah Laporan Penggunaan Jasa Penunjang Urusan yang sesuai ketentuan	266 Laporan
	Jumlah Unit BMD yang dipelihara sesuai standar	405 Unit
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	586 Orang/bulan /paket
	Jumlah Layanan Administrasi DPRD	177 Kali
	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	694 Laporan
	Jumlah SDM anggota DPRD yang memahami aturan	160 Dokumen

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.604.770.656	
1	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	101.000.000	
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	743.240.240	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.840.382.456	
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.035.365.694	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.219.663.707	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.866.184.059	
7	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	890.347.500	
8	Layanan Administrasi DPRD	908.587.000	
2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	12.870.541.000	
1	Peningkatan Kapasitas DPRD	6.630.206.000	
2	Fasilitasi Tugas DPRD	6.240.335.000	
TOTAL		29.475.311.656	


Kudus, 20 November 2023

Kepala Bagian Umum dan Humas SEKRETARIAT
DPRD

SEKRETARIS DPRD



Drs. AGUS ADI SATRIYO, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19640825 198603 1 029



IMAM SOFWAN, SH
Pembina
NIP. 197804222005011012



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl.R.Agil Kusumadya No. 44 Kudus Kode Pos 59343
Telp (0291) 435111 Fax (0291) 435594
email : dprd@kuduskab.go.id Website : dprd.kuduskab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DIDIK PRAYITNO, SH
Jabatan : KASUBBAG.RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUDUS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

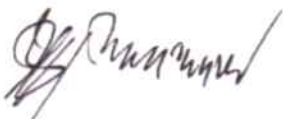
Nama : IMAM SOFWAN, SH
Jabatan : KEPALA BAGIAN UMUM DAN HUMAS SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUDUS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua;


Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


IMAM SOFWAN, SH
Pembina
NIP. 197804222005011012

Kudus, 20 Oktober 2023
Pihak Pertama,


DIDIK PRAYITNO, SH
Penata Tk. I
NIP. 198109132005021002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUDUS

KASUBBAG.RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN

No.	Indikator Kinerja	Target
1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	32 Paket
2	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	52 paket
3	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	157 unit
4	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	80 unit
5	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 unit
6	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	377 unit
7	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 Laporan
8	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	115 unit
9	Jumlah mebel yang dipelihara	80 unit
10	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	73 unit
11	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	14 unit
12	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	128 unit


No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	179.057.376	
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	220.359.600	
3	Pengadaan Mebel	937.358.000	
4	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	680.061.000	
5	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.210.056.194	
6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.207.890.500	
7	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	889.915.707	
8	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	584.370.000	
9	Pemeliharaan Mebel	56.570.000	
10	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	120.709.000	
11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.655.114.059	
12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	449.421.000	
TOTAL		11.190.882.436	

Kudus, 20 Oktober 2023

KEPALA BAGIAN UMUM DAN HUMAS
 SEKRETARIAT DPRD

KASUBBAG.RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN
 SEKRETARIAT DPRD


IMAM SOFWAN, SH
 Pembina
 NIP. 197804222005011012


DIDIK PRAYITNO, SH
 Penata Tk. I
 NIP. 198109132005021002



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl.R.Agil Kusumadya No. 44 Kudus Kode Pos 59343
Telp (0291) 435111 Fax (0291) 435594
email : dprd@kuduskab.go.id Website : dprd.kuduskab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FIRDAUS KURNIAWAN, S.IP
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN TU DAN KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUDUS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : IMAM SOFWAN, SH
Jabatan : KEPALA BAGIAN UMUM DAN HUMAS SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUDUS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua;


Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


IMAM SOFWAN, SH
Pembina
NIP. 197804222005011012

Kudus, 20 Oktober 2023
Pihak Pertama,


FIRDAUS KURNIAWAN, S.IP
Penata
NIP. 19790606 200604 1 024

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUDUS

KEPALA SUB BAGIAN TU DAN KEPEGAWAIAN

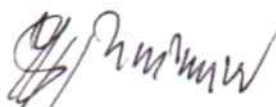
No.	Indikator Kinerja	Target
1	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen
2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	110 Orang
3	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	5 Laporan
4	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	91 Orang
5	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Paket
6	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	91 paket
7	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	21 Paket
8	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 dokumen
9	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan
10	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17 Laporan
11	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	149 Laporan
12	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	225 Paket
13	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	177 Laporan

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	101.000.000	
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	48.364.240	
3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	694.876.000	
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	191.612.000	
5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	136.545.000	
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	71.603.000	
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	53.400.000	
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	231.065.480	
9	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.000.000	
10	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.316.748.000	
11	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	890.347.500	
12	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	908.587.000	
TOTAL		4.657.148.220	

Kudus, 20 November 2023

KEPALA BAGIAN UMUM DAN HUMAS
 SEKRETARIAT DPRD

KEPALA SUB BAGIAN TU DAN KEPEGAWAIAN
 SEKRETARIAT DPRD



IMAM SOFWAN, SH
 Pembina
 NIP. 197804222005011012



FIRDAUS KURNIAWAN, S.IP
 Penata
 NIP. 19790606 200604 1 024



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl.R.Agil Kusumadya No. 44 Kudus Kode Pos 59343
Telp (0291) 435111 Fax (0291) 435594
email : dprd@kuduskab.go.id Website : dprd.kuduskab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AGUNG EKO RAHARJO, SH
Jabatan : KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN SEKRETARIAT
DPRD KABUPATEN KUDUS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : Drs. AGUS BUDI SATRIYO, MH
Jabatan : SEKRETARIS DPRD KABUPATEN KUDUS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kudus, 20 Oktober 2023

Pihak Pertama,

AGUNG EKO RAHARJO, SH
Pembina

NIP. 19710425 199303 1 004

Pihak Kedua,

Drs. AGUS BUDI SATRIYO, MH
Pembina-Utama Muda
NIP. 19640825 198603 1 029

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUDUS

KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

No.	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan)	Target
1	Persentase Pelaksanaan Program Kerja DPRD yang telah disahkan	100 persen
2	Presentase Fasilitasi Pembahasan Ranperda	100 persen
	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	28 Kali
	Jumlah Fasilitasi tugas Badan Anggaran yang terealisasi	8 Kali
	Jumlah fasilitasi kegiatan pengawasan Pemerintahan yang dilakukan DPRD	72 Kali
	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	694 Laporan
	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat	11 Kali
	Jumlah SDM anggota DPRD yang memahami aturan	6 Laporan
	Jumlah SDM anggota DPRD yang memahami aturan	160 Dokumen

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	26.162.985.000	
1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	5.557.144.000	
2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	1.715.666.000	
3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	7.648.866.000	
4	Peningkatan Kapasitas DPRD	3.678.184.000	
5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.926.249.000	
6	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	350.634.000	
7	Fasilitasi Tugas DPRD	5.286.242.000	
	TOTAL	26.162.985.000	

Kudus, 20 November 2023

Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-
Undangan SEKRETARIAT DPRD



Drs. AGUS BUDI SATRIYO, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19640825 198603 1 029

AGUNG EKO RAHARJO, SH
Pembina
NIP. 19710425 199303 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl.R.Agil Kusumadya No. 44 Kudus Kode Pos 59343
Telp (0291) 435111 Fax (0291) 435594
email : dprd@kuduskab.go.id Website : dprd.kuduskab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DWI MIRA, S.IP
Jabatan : ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUDUS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : AGUNG EKO RAHARJO, SH
Jabatan : KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUDUS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

AGUNG EKO RAHARJO, SH
Pembina
NIP. 19710425 199303 1 004

Kudus, 20 Oktober 2023
Pihak Pertama,

DWI MIRA, S.IP
Penata Tk.I
NIP. 197711271997032002

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUDUS**

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

No.	Indikator Kinerja	Target
1	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	8 Laporan
2	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen
3	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	8 Laporan
4	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	14 Dokumen

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	3.750.000	
2	Pelaksanaan Reses	1.922.499.000	
3	Pengawasan Kode Etik DPRD	350.634.000	
4	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	3.066.074.000	
TOTAL		5.342.957.000	

KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-
UNDANGAN
SEKRETARIAT DPRD


AGUNG EKO RAHARJO, SH
Pembina
NIP. 19710425 199303 1 004

Kudus, 20 Oktober 2023
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
SEKRETARIAT DPRD


DWI MIRA, S.IP
Penata Tk.I
NIP. 197711271997032002



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl.R.Agil Kusumadya No. 44 Kudus Kode Pos 59343
Telp (0291) 435111 Fax (0291) 435594
email : dprd@kuduskab.go.id Website : dprd.kuduskab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DEWI UMAROH, SH

Jabatan : ANALIS HUKUM AHLI MUDA / MUDA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUDUS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama:

Nama : AGUNG EKO RAHARJO, SH

Jabatan : KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN SEKRETARIAT
DPRD KABUPATEN KUDUS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua:

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

AGUNG EKO RAHARJO, SH
Pembina
NIP. 19710425 199303 1 004

Kudus, 20 Oktober 2023

Pihak Pertama,

DEWI UMAROH, SH
Penata Tk.I
NIP. 197306021992032004

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUDUS**

ANALIS HUKUM AHLI MUDA / MUDA

No.	Indikator Kinerja	Target
1	Jumlah dokumen hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	8 Dokumen
2	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	7 Dokumen
3	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan	7 Dokumen
4	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	6 Dokumen
5	Jumlah fasilitasi kegiatan Bintek DPRD	27 Laporan
6	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	16 Dokumen
7	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	36 orang
8	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7 orang

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	822.192.000	
2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1.592.804.000	
3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	2.542.148.000	
4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	600.000.000	
5	Pendalaman Tugas DPRD	2.961.334.000	
6	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	398.850.000	
7	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	318.000.000	
TOTAL		9.235.328.000	

KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-
UNDANGAN
SEKRETARIAT DPRD


AGUNG EKO RAHARJO, SH
Pembina
NIP. 19710425 199303 1 004

Kudus, 20 Oktober 2023
ANALIS HUKUM AHLI MUDA / MUDA
SEKRETARIAT DPRD


DEWI UMAROH, SH
Penata Tk.I
NIP. 197306021992032004



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl.R.Agil Kusumadya No. 44 Kudus Kode Pos 59343
Telp (0291) 435111 Fax (0291) 435594
email : dprd@kuduskab.go.id Website : dprd.kuduskab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NURATRI SULISTYANI, SH

Jabatan : KEPALA BAGIAN KEUANGAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUDUS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : Drs. AGUS BUDI SATRIYO, MH

Jabatan : SEKRETARIS DPRD KABUPATEN KUDUS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua,



Drs. AGUS BUDI SATRIYO, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19640825 198603 1 029

Kudus, 20 Oktober 2023

Pihak Pertama,



NURATRI SULISTYANI, SH
Pembina
NIP. 196605121993102001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUDUS**

KEPALA BAGIAN KEUANGAN

No.	Indikator Kinerja (Program/Kegiatan)	Target
1	Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja Perangkat Daerah (Bagian Keuangan)	85 Indeks
	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Sesuai Standar	33 Dokumen
	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang sesuai standar	3140 Orang/Bulan
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	586 Orang/bulan /paket

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	39.543.891.520	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.062.520	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.198.768.000	
3	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	35.335.061.000	
TOTAL		39.543.891.520	

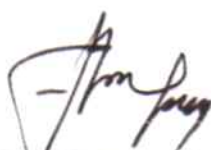
Kudus, 20 November 2023

Kepala Bagian Keuangan SEKRETARIAT DPRD

SEKRETARIS DPRD



Drs. AGUS BUDI SATRIYO, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19640825 198603 1 029



NURATRI SULISTYANI, SH
Pembina
NIP. 196605121993101001



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl.R.Agil Kusumadya No. 44 Kudus Kode Pos 59343
Telp (0291) 435111 Fax (0291) 435594
email : dprd@kuduskab.go.id Website : dprd.kuduskab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RIYANTI, S.IP
Jabatan : KASUBBAG AKUNTANSI DAN PERBENDAHARAAN SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUDUS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : NURATRI SULISTYANI, SH
Jabatan : KEPALA BAGIAN KEUANGAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUDUS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

NURATRI SULISTYANI, SH
Pembina
NIP. 196605121993102001

Kudus, 20 Oktober 2023

Pihak Pertama,

RIYANTI, S.IP
Penata Tk.I
NIP. 197004071994032005

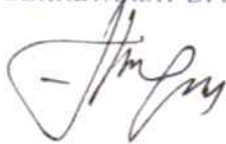
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUDUS

KASUBBAG AKUNTANSI DAN PERBENDAHARAAN

No.	Indikator Kinerja	Target
1	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	728 Orang/Bulan
2	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen
3	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2400 Dokumen
4	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	630 orang/bulan
5	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 orang

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.080.313.000	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	113.220.000	
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.235.000	
4	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	35.210.152.000	
5	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	124.909.000	
TOTAL		39.533.829.000	

KEPALA BAGIAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DPRD



NURATRI SULISTYANI, SH
Pembina
NIP. 196605121993102001

Kudus, 20 Oktober 2023
KASUBBAG AKUNTANSI DAN PERBENDAHARAAN
SEKRETARIAT DPRD



RIYANTI, S.IP
Penata Tk.I
NIP. 197004071994032005



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl.R.Agil Kusumadya No. 44 Kudus Kode Pos 59343
Telp (0291) 435111 Fax (0291) 435594
email : dprd@kuduskab.go.id Website : dprd.kuduskab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. RINA KURNIYATI UTAMI
Jabatan : KASUBBAG.PERENCANAAN DAN ANGGARAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUDUS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama;

Nama : NURATRI SULISTYANI, SH
Jabatan : KEPALA BAGIAN KEUANGAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUDUS

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua berjanji akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

NURATRI SULISTYANI, SH
Pembina
NIP. 196605121993102001

Kudus, 20 Oktober 2023
Pihak Pertama,

Ir. RINA KURNIYATI UTAMI
Penata Tk.1
NIP. 196802131998032002

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KUDUS**

KASUBBAG.PERENCANAAN DAN ANGGARAN

No.	Indikator Kinerja	Target
1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19 dokumen
2	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14 Laporan

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.168.760	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.893.760	
TOTAL		10.062.520	

KEPALA BAGIAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DPRD



NURATRI SULISTYANI, SH
Pembina
NIP. 196605121993102001

Kudus, 20 Oktober 2023
KASUBBAG.PERENCANAAN DAN ANGGARAN
SEKRETARIAT DPRD



Ir. RINA KURNIYATI UTAMI
Penata Tk.I
NIP. 196802131998032002

**RENCANA KERJA TAHUNAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2023**

No_Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Perangkat Daerah</i>	85,00 Indeks	56.148.662.176	KEPALA BAGIAN UMUM DAN HUMAS
		<i>Persentase Dokumen Perencanaan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tersusun sesuai aturan</i>	100,00 Persen		
		<i>Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja Perangkat Daerah (Eagian Keuangan)</i>	85,00 Indeks		
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Sesuai Standar	33,00 Dokumen	10.062.520	KEPALA BAGIAN KEUANGAN
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19,00 dokumen	7.168.760	KASUBBAG.PERENCANAAN DAN ANGGARAN
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14,00 Laporan	2.893.760	KASUBBAG.PERENCANAAN DAN ANGGARAN
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang sesuai standar	3.140,00 laporan	4.198.768.000	KEPALA BAGIAN KEUANGAN
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	728,00 Orang/Bulan	4.080.313.000	KASUBBAG AKUNTANSI DAN PERBENDAHARAAN
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12,00 Dokumen	113.220.000	KASUBBAG AKUNTANSI DAN PERBENDAHARAAN
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.400,00 Dokumen	5.235.000	KASUBBAG AKUNTANSI DAN PERBENDAHARAAN
X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi BMD sesuai standar	1,00 Dokumen	101.000.000	KEPALA BAGIAN UMUM DAN HUMAS
X.XX.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1,00 Dokumen	101.000.000	KEPALA SUB BAGIAN TU DAN KEPEGAWAIAN
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan administrasi Kepegawaian sesuai standar	0,00 Laporan/dokumen setiap layanan yang diberikan	743.240.240	
		Jumlah laporan hasil pengelolaan kepegawaian sesuai standar	6,00 Laporan		
X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	110,00 Orang	48.364.240	KEPALA SUB BAGIAN TU DAN KEPEGAWAIAN
X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bintek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0,00 laporan	694.876.000	KEPALA SUB BAGIAN TU DAN KEPEGAWAIAN
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	5,00 Laporan		
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	91,00 Orang		
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Pendukung Perkantoran sesuai standar	98,00 Persen	1.840.382.456	KEPALA BAGIAN UMUM DAN HUMAS

No_Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	32,00 Paket	179.057.376	KASUBBAG.RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24,00 Paket	191.612.000	KEPALA SUB BAGIAN TU DAN KEPEGAWAIAN
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	52,00 paket	220.359.600	KASUBBAG.RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	91,00 paket	136.545.000	KEPALA SUB BAGIAN TU DAN KEPEGAWAIAN
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	21,00 Paket	71.603.000	KEPALA SUB BAGIAN TU DAN KEPEGAWAIAN
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24,00 dokumen	53.400.000	KEPALA SUB BAGIAN TU DAN KEPEGAWAIAN
X.XX.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	94,00 Laporan	756.740.000	KEPALA BAGIAN UMUM DAN HUMAS
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60,00 Laporan	231.065.480	KEPALA BAGIAN UMUM DAN HUMAS
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang diadakan sesuai ketentuan (perpres pengadaan barjas dan RKBU)	467,00 Unit	6.035.365.694	KEPALA BAGIAN UMUM DAN HUMAS
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	157,00 unit	937.358.000	KASUBBAG.RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	80,00 unit	680.061.000	KASUBBAG.RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN
X.XX.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5,00 unit	3.210.056.194	KASUBBAG.RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	377,00 unit	1.207.890.500	KASUBBAG.RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penggunaan Jasa Penunjang Urusan yang sesuai ketentuan	266,00 Laporan	2.219.663.707	KEPALA BAGIAN UMUM DAN HUMAS
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17,00 Laporan	13.000.000	KEPALA SUB BAGIAN TU DAN KEPEGAWAIAN
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100,00 Laporan	889.915.707	KASUBBAG.RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	149,00 Laporan	1.316.748.000	KEPALA SUB BAGIAN TU DAN KEPEGAWAIAN
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit BMD yang dipelihara sesuai standar	405,00 Unit	3.866.184.059	KEPALA BAGIAN UMUM DAN HUMAS
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	115,00 unit	584.370.000	KASUBBAG.RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	80,00 unit	56.570.000	KASUBBAG.RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	73,00 unit	120.709.000	KASUBBAG.RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	14,00 unit	2.655.114.059	KASUBBAG.RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/	128,00 unit	449.421.000	KASUBBAG.RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN

No_Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
		Direhabilitasi			
X.XX.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Fasilitas Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	3,00 Kegiatan	36.225.408.500	
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	586,00 Orang/bulan/paket		
X.XX.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	630,00 orang/bulan	35.210.152.000	KASUBBAG AKUNTANSI DAN PERBENDAHARAAN
X.XX.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	225,00 Paket	890.347.500	KEPALA SUB BAGIAN TU DAN KEPEGAWAIAN
X.XX.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45,00 orang	124.909.000	KASUBBAG AKUNTANSI DAN PERBENDAHARAAN
X.XX.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Layanan Administrasi DPRD	177,00 Kali	908.587.000	KEPALA BAGIAN UMUM DAN HUMAS
X.XX.01.2.16.03	Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	177,00 Laporan	908.587.000	KEPALA BAGIAN UMUM DAN HUMAS
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Pelaksanaan Program Kerja DPRD yang telah disahkan	100,00 persen	39.033.526.000	KEPALA BAGIAN UMUM DAN HUMAS ,KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN
		Persentase Fasilitas Pembahasan Ranperda	100,00 persen		
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Fasilitas Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	28,00 Kali	5.557.144.000	KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	8,00 Dokumen	822.192.000	ANALIS HUKUM AHLI MUJDA / MUDA
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	7,00 Dokumen	1.592.804.000	ANALIS HUKUM AHLI MUJDA / MUDA
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan	7,00 Dokumen	2.542.148.000	ANALIS HUKUM AHLI MUJDA / MUDA
4.02.02.2.01.04	Fasilitas Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	6,00 Dokumen	600.000.000	ANALIS HUKUM AHLI MUJDA / MUDA
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Fasilitas tugas Badan Anggaran yang terealisasi	8,00 Kali	1.715.666.000	KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	8,00 Dokumen	1.715.666.000	KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah fasilitas kegiatan pengawasan Pemerintahan yang dilakukan DPRD	72,00 Kali	7.648.866.000	KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	72,00 Laporan	7.648.866.000	KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Fasilitas Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	694,00 Laporan	10.308.390.000	KEPALA BAGIAN UMUM DAN HUMAS ,KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah fasilitas kegiatan BinteK DPRD	27,00 Laporan	2.961.334.000	ANALIS HUKUM AHLI MUJDA / MUDA
		Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	16,00 Dokumen		
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	624,00 Dokumen	6.630.206.000	KEPALA BAGIAN UMUM DAN HUMAS

No_Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	36,00 orang	398.850.000	ANALIS HUKUM AHLI MUJDA / MUJDA
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7,00 orang	318.000.000	ANALIS HUKUM AHLI MUJDA / MUJDA
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat	11,00 Kali	1.926.249.000	KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	8,00 Laporan	3.750.000	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUJDA
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3,00 Dokumen	1.922.499.000	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUJDA
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah SDM anggota DPRD yang memahami aturan	6,00 Laporan	350.634.000	KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN
4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	8,00 Laporan	350.634.000	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUJDA
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah SDM anggota DPRD yang memahami aturan	160,00 Dokumen	11.526.577.000	KEPALA BAGIAN UMUM DAN HUMAS ,KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	34,00 Laporan	2.220.168.000	KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN
4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	14,00 Dokumen	3.066.074.000	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUJDA
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	112,00 Dokumen	6.240.335.000	KEPALA BAGIAN UMUM DAN HUMAS

No	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output dan Kegiatan) Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (2023) yang Di realisasi										Realisasi 2023 K Rp	Realisasi 2023 K Rp	Tingkat Capaian Kerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD tahun Berjalan 2023 %		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	%
X.XX.01.2.02.02	Penyelesaian Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Jumlah Hasil Penyusunan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	113.220	3	15.120	34.110	3.000	25.830	100	30	99,99	11				
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penulisan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Jumlah Penulisan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2400 Dokumen	5.235	1.102	879	2.668	99,04	99,04	100	99,04	99,04	11				
X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi BMD sesuai standar	1 Dokumen	101.000	0,00	0,00	100,575	99,58	99,58	100	99,58	99,58	11				
X.XX.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	101.000	0,00	0,00	100,575	99,58	99,58	100	99,58	99,58	11				
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepengawain Perangkat Daerah	Jumlah laporan hasil pengelmbaan kepengawain sesuai standar	6 Laporan	743.240	148.415	54.200	69.990	331.219	81,24	100	81,24	81,24	11				
X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	110 Orang	48.354	0,00	0,00	21.426	44,3	44,3	100	44,3	44,3	11				
X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	5 Laporan	694.676	148.415	54.200	59.990	309.793	83,81	100	83,81	83,81	11				
X.XX.01.2.06	Administrasi Urum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Pendukung Perkantoran sesuai standar	98 Porsen	1.840.392	238.022	235.440	342.080	451.750	68,86	100	68,86	68,86	11				

No	Kategori Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) Sub Kegiatan	Tercapai/ Tidak Tercapai										Realisasi Kinerja pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana OPD yang Dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana OPD pada Tahun 2023 (%)									
			1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14						
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik, pemeliharaan berkala, pemeliharaan bangunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik, Peningkatan Bangunan Kantor yang Disediakan	24 Paket	10	5.00	27.208	14.243	10	5.00	10	5.00	10	5.00	10	5.00	10	5.00	10	5.00	10	5.00	10	5.00	10	5.00	10	5.00	10	5.00	10	5.00	100	66,78	100	
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Pengkaban Kantor yang Disediakan	24 Paket	9	5.00	25.862	21.531	9	5.00	9	5.00	9	5.00	9	5.00	9	5.00	9	5.00	9	5.00	9	5.00	9	5.00	9	5.00	9	5.00	9	5.00	100	87,75	100	
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	50 paket	14	18.00	19.690	33.625	14	18.00	14	18.00	14	18.00	14	18.00	14	18.00	14	18.00	14	18.00	14	18.00	14	18.00	14	18.00	14	18.00	14	18.00	100	99,05	100	
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	91 paket	23	18.00	30.751	21.677	23	18.00	23	18.00	23	18.00	23	18.00	23	18.00	23	18.00	23	18.00	23	18.00	23	18.00	23	18.00	23	18.00	23	18.00	100	98,08	100	
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	21 Paket	2	1.00	2.250	1.850	2	1.00	2	1.00	2	1.00	2	1.00	2	1.00	2	1.00	2	1.00	2	1.00	2	1.00	2	1.00	2	1.00	2	1.00	100	72,14	100	
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	24 dokumen	6	8.00	9.800	15.310	6	8.00	6	8.00	6	8.00	6	8.00	6	8.00	6	8.00	6	8.00	6	8.00	6	8.00	6	8.00	6	8.00	6	8.00	100	94,04	100	
X.XX.01.2.06.08	Facilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	94 Laporan	22	19.00	92.850	49.988	22	19.00	22	19.00	22	19.00	22	19.00	22	19.00	22	19.00	22	19.00	22	19.00	22	19.00	22	19.00	22	19.00	22	19.00	100	40,57	100	
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	17	11.00	30.582	77.217	17	11.00	17	11.00	17	11.00	17	11.00	17	11.00	17	11.00	17	11.00	17	11.00	17	11.00	17	11.00	17	11.00	17	11.00	100	94,57	100	
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang diadakan sesuai ketentuan (perpres pengadaan barang dan RKBU)	467 Unit	255,00	72,00	1.551.462	316.655	255,00	72,00	255,00	72,00	255,00	72,00	255,00	72,00	255,00	72,00	255,00	72,00	255,00	72,00	255,00	72,00	255,00	72,00	255,00	72,00	255,00	72,00	255,00	72,00	255,00	100	93,3	100

No	Judul Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja pada Triwulan										Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renc. OPD yang Ditinjau 2023 (%)		
			I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renc. OPD yang Dievaluasi			K	Rp
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
X.XX.01.2.05.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diperbaiki dan dibayarkan Pajak dan Perizainannya	27	19.00	25.00	19.00	19.00	19.00	19.00	110	95.65	110	95.65	11	
X.XX.01.2.05.06	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang diperbaiki	0	30.00	25.00	30.00	30.00	30.00	30.00	66	82.5	66	82.5		
X.XX.01.2.05.07	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diperbaiki	7	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	73	100	73	100		
X.XX.01.2.05.08	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/ Direhabilitasi	0	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14	100	14	100		
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/ Direhabilitasi	21	20.00	22.00	20.00	20.00	20.00	20.00	128	100	128	100		
X.XX.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Fasilitas Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	135,00	136,00	-271,00	136,00	136,00	136,00	136,00	3	100	3	100		
X.XX.01.2.15.01	Penyenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	0,00	0,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637	100	637	100		
X.XX.01.2.15.02	Pemeliharaan Pakaran Dinas dan Alat/DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Pak Keuangan DPRD	135	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	540	85.71	540	85.71		
X.XX.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Paket Pakaran Dinas dan Alat/DPRD yang Disediakan	0	1,00	0	1,00	1,00	1,00	1,00	225	100	225	100		
X.XX.01.2.15.04	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	0	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23	51.11	23	51.11		

Masih terdapat beberapa yang belum perlu membiayai biaya perawatan

Pelaksanaan Medical Check Up oleh DPRD terkendala agenda kerja DPRD yang padat

No	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) Sub Kegiatan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034
----	--	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

**PENGUKURAN TUJUAN, SASARAN, DAN INDIKATOR UTAMA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUDUS
PERIODE 2019 - 2023**

Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator Kinerja Utama	Formula	Satuan	Target Kinerja setiap Tahun					
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Meningkatkan kepuasan pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mewujudkan hubungan yang harmonis antara Eksekutif dan Legislatif	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kudus	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat DPRD kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	Hasil survei Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD	Indeks	81,07	82,00	82,50	82,70	0,00	
Meningkatkan dukungan dan kualitas pelayanan terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Hasil penilaian evaluasi kinerja pemerintah daerah dari Inspektorat	Nilai	70,50	73,00	75,00	81,00	83,00	
	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase jumlah ranperda yang disahkan dari jumlah ranperda yang dibahas	Ranperda yang dibahas dibagi dengan ranperda yang diajukan x 100%	persen	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	

**REALISASI PROGRAM ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUDUS
BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2023**

No Rekening	Program	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja Bulan Desember Tahun 2023	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			56.148.662.176	51.973.709.993		92,56 %	-22,23 %
		Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Perangkat Daerah	85 Indeks		94,34	Kepala Bagian Umum dan Humas	110,99 %	
		Persentase Dokumen Perencanaan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tersusun sesuai aturan	100 Persen		0,00		0,00 %	
		Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja Perangkat Daerah (Bagian Keuangan)	85 Indeks		85,00	Kepala Bagian Keuangan	100,00 %	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			39.033.526.000	23.961.877.857		61,39 %	28,61 %
		Persentase Pelaksanaan Program Kerja DPRD yang telah disahkan	100 persen		80,00	Kepala Bagian Umum dan Humas	80,00 %	
		Presentase Fasilitasi Pembahasan Ranperda	100 persen		100,00	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	100,00 %	

**REALISASI KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUDUS
BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2023**

No_Rekening	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja Bulan Desember Tahun 2023	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			10.062.520	9.056.600		90,00 %	10,00 %
X XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Sesuai Standar	33 Dokumen	4.198.788.000	33.00	Kepala Bagian Keuangan	100,00 %	6,04 %
X XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang sesuai standar	3140 laporan	101.000.000	3.667.00	Kepala Bagian Keuangan	100,00 %	0,42 %
X XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi BMD sesuai standar	1 Dokumen	743.240.240	1.00	Kepala Bagian Umum dan Humas	100,00 %	-31,24 %
		Jumlah Layanan administrasi: Kepegawaian sesuai standar	0 Laporan/dokumen setiap layanan yang dibenarkan		0.00		0,00 %	
		Jumlah laporan hasil pengelolaan kepegawaian sesuai standar	6 Laporan		9.00	Kepala Bagian Umum dan Humas	100,00 %	
X XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Pendukung Perkantoran sesuai standar	98 Persen	1.840.382.466	1.267.291.495		68,86 %	31,14 %
X XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang diadakan sesuai ketentuan (perpres pengadaan barang dan RKBU)	467 Unit	6.035.365.694	5.631.182.232	Kepala Bagian Umum dan Humas	93,30 %	6,70 %
X XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penggunaan Jasa Penunjang Urusan yang sesuai ketentuan	266 Laporan	2.219.663.707	1.860.974.658	Kepala Bagian Umum dan Humas	83,84 %	16,16 %
X XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit BMD yang dipelihara sesuai standar	405 Unit	3.886.184.059	3.598.030.258	Kepala Bagian Umum dan Humas	93,08 %	3,46 %
X XX.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Fasilitas: Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	3 Kegiatan	36.225.408.500	391.00		94,30 %	5,70 %
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitas: Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	586 Orang/bulan/paket		637.00	Kepala Bagian Keuangan	100,00 %	
X XX.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Layanan Administrasi DPRD	177 Kali	908.587.000	795.317.631		87,63 %	12,47 %
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Fasilitas Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	28 Kali	5.557.144.000	3.356.186.826	Kepala Bagian Umum dan Humas	100,00 %	36,03 %
					27.00	Kepala Bagian Persandangan dan Perundang-Undangan	96,43 %	

No. Rekening	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja Bulan Desember Tahun 2023	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisien
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.02.02.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Fasilitas: tugas Badan Anggaran yang terlaksana	8 Kali	1.715.866.000	709.379.669	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	41,35 %	33,65 %
4.02.02.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah fasilitas kegiatan pengawasan Pemerintahan yang dilakukan DPRD	72 Kali	7.648.866.000	4.391.396.617	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	57,41 %	42,59 %
4.02.02.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Fasilitas: Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	694 Laporan	10.308.360.000	8.608.466.834	Kepala Bagian Umum dan Humas	86,42 %	12,14 %
4.02.02.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Fasilitas: Kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat	11 Kali	1.926.249.000	1.708.274.000		88,66 %	11,32 %
4.02.02.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah SDM anggota DPRD yang memahami aturan	6 Laporan	350.634.000	151.507.970	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	43,21 %	56,79 %
4.02.02.08	Fasilitas: Tugas DPRD	Jumlah SDM anggota DPRD yang memahami aturan	160 Dokumen	11.528.577.000	4.736.665.941	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	100,00 %	43,91 %
					136.000	Kepala Bagian Umum dan Humas	41,09 %	85,00 %

**REALISASI SUB KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2023**

No_Rekening	Kegiatan	Indikator	TARGET KINERJA	Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja Bulan Desember Tahun 2023	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			7.168.760	7.136.500	Kasubbag Perencanaan dan Anggaran	99,55 %	0,45 %
X XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19 dokumen	2.893.760	19.000	Kasubbag Perencanaan dan Anggaran	100,00 %	33,65 %
X XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14 Laporan	4.080.313.000	3.838.110.939	Kasubbag Akuntansi dan Perbendaharaan	100,00 %	5,84 %
X XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	726 Orang/Bulan	113.220.000	743.000	Kasubbag Akuntansi dan Perbendaharaan	69,99 %	10,01 %
X XX.01.2.02.03	Penyediaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	5.235.000	101.890.000	Kasubbag Akuntansi dan Perbendaharaan	100,00 %	0,86 %
X XX.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2400 Dokumen	101.000.000	2.914.000	Kepala Sub Bagian TU dan Kepegawaian	100,00 %	0,42 %
X XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	48.364.240	1.000	Kepala Sub Bagian TU dan Kepegawaian	44,30 %	52,97 %
X XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	110 Orang	694.876.000	107.000	Kepala Sub Bagian TU dan Kepegawaian	97,27 %	10,14 %
X XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	5 Laporan	179.057.376	582.397.982	Kasubbag Rumah Tangga dan Perengkingan	66,78 %	33,22 %
X XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perengkingan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	32 Paket	191.612.000	32.000	Kasubbag Rumah Tangga dan Perengkingan	100,00 %	12,25 %
X XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan dan Perengkingan Kantor yang Disediakan	24 Paket	220.359.600	218.269.615	Kasubbag Rumah Tangga dan Perengkingan	100,00 %	0,95 %

No. Rekening	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja Bulan Desember Tahun 2023	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	52 paket		80,00		100,00 %	
X XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			136.545.000	133.926.500	Kepala Sub Bagian TU dan Kepegawaian	96,08 %	1,92 %
X XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	91 paket	71.603.000	91,00	Kepala Sub Bagian TU dan Kepegawaian	100,00 %	27,86 %
X XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	21 Paket	53.400.000	21,00	Kepala Sub Bagian TU dan Kepegawaian	100,00 %	5,96 %
X XX.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	24 dokumen	24,00			100,00 %	
X XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	94 Laporan	756.740.000	306.980.500	Kepala Bagian Umum dan Humas	40,57 %	59,43 %
X XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	231.065.480	94,00	Kepala Bagian Umum dan Humas	100,00 %	5,43 %
X XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	157 unit	937.358.000	157,00	Kasubbag Rumah Tangga dan Perengkapian	100,00 %	1,22 %
X XX.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	80 unit	680.061.000	80,00	Kasubbag Rumah Tangga dan Perengkapian	100,00 %	5,84 %
X XX.01.2.07.10	Pengadaan Strana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 unit	3.210.056.194	2.976.956.248	Kasubbag Rumah Tangga dan Perengkapian	92,74 %	7,26 %
X XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17 Laporan	13.000.000	17,00	Kepala Sub Bagian TU dan Kepegawaian	100,00 %	3,26 %
X XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 Laporan	889.915.707	565.564.091	Kasubbag Rumah Tangga dan Perengkapian	63,55 %	36,45 %
X XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	149 Laporan	1.316.748.000	149,00	Kepala Sub Bagian TU dan Kepegawaian	100,00 %	2,58 %
X XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pengiran Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	149 Laporan	584.370.000	510.851.589	Kasubbag Rumah Tangga dan Perengkapian	87,42 %	8,23 %

No. Rekening	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja Bulan Desember Tahun 2023	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	115 unit	56.570.000	49.065.000	Kasubag Rumah Tangga dan Perengkap	95,65 %	-4,29 %
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah mebel yang dipelihara	80 unit	120.709.000	68.000	Kasubag Rumah Tangga dan Perengkap	52,50 %	38,02 %
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	73 unit	2.655.114.059	73.000	Kasubag Rumah Tangga dan Perengkap	100,00 %	2,50 %
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	14 unit	449.421.000	377.924.446	Kasubag Rumah Tangga dan Perengkap	84,09 %	15,91 %
X.XX.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	128 unit	35.210.152.000	128.000	Kasubag Akuntansi dan Perbendaharaan	100,00 %	8,90 %
X.XX.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	630 orang/bulan	890.347.500	796.680.000	Kepala Sub Bagian TU dan Kepegawaian	89,48 %	10,52 %
X.XX.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	225 Paket	124.909.000	225.000	Kasubag Akuntansi dan Perbendaharaan	100,00 %	9,15 %
X.XX.01.2.16.03	Fasilitas, Rapat Koordinasi, dan Konsultasi DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 orang	908.587.000	23.000	Kepala Bagian Umum dan Humas	51,11 %	12,47 %
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas, Rapat Koordinasi, dan Konsultasi DPRD	177 Laporan	822.192.000	177.000	Analisis Hukum Ahli Muda / Muda	100,00 %	27,25 %
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	6 Dokumen	1.592.804.000	7.000	Analisis Hukum Ahli Muda / Muda	87,60 %	73,71 %
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	7 Dokumen	2.542.149.000	1.850.463.496	Analisis Hukum Ahli Muda / Muda	72,79 %	27,21 %
4.02.02.2.01.04	Fasilitas, Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan	7 Dokumen	600.000.000	591.611.000	Analisis Hukum Ahli Muda / Muda	100,00 %	1,40 %
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	6 Dokumen	1.715.666.000	709.379.669	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	41,35 %	33,65 %
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	6 Dokumen		6.000		75,00 %	

No. Renging	Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	Anggaran	Capaian Anggaran/Kinerja Bulan Desember Tahun 2023	Penanggungjawab	Persentase Capaian	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum			7.648.866.000	4.381.396.617	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	57,41 %	42,59 %
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	72 Laporan		72,00		100,00 %	
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD			2.961.334.000	1.861.663.834	Analisis Hukum Ahli Muda / Muda	62,87 %	37,13 %
		Jumlah fasilitas kegiatan Bantek DPRD	27 Laporan		27,00		100,00 %	
		Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	16 Dokumen		16,00		100,00 %	
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan			6.630.206.000	6.528.026.000	Kepala Bagian Umum dan Humas	98,46 %	1,54 %
		Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi, dan Dokumentasi Dewan	624 Dokumen		624,00		100,00 %	
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli			368.850.000	212.774.000	Analisis Hukum Ahli Muda / Muda	53,35 %	-25,57 %
		Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	36 orang		10,00		27,78 %	
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi			318.000.000	306.000.000	Analisis Hukum Ahli Muda / Muda	96,23 %	3,77 %
		Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7 orang		7,00		100,00 %	
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah			3.750.000	0	Analisis Kebijakan Ahli Muda	0,00 %	100,00 %
		Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	6 Laporan		8,00		100,00 %	
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses			1.922.499.000	1.708.274.000	Analisis Kebijakan Ahli Muda	88,88 %	11,14 %
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen		3,00		100,00 %	
4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD			350.634.000	151.507.970	Analisis Kebijakan Ahli Muda	43,21 %	31,79 %
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	6 Laporan		6,00		75,00 %	
4.02.02.2.06.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD			2.220.198.000	861.271.843	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	38,79 %	8,27 %
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	34 Laporan		16,00		47,06 %	
4.02.02.2.08.03	Fasilitas Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah			3.066.074.000	1.388.215.518	Analisis Kebijakan Ahli Muda	45,28 %	40,44 %
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	14 Dokumen		12,00		85,71 %	
4.02.02.2.08.04	Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD			6.240.335.000	2.487.178.580	Kepala Bagian Umum dan Humas	39,86 %	56,57 %
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD	112 Dokumen		108,00		96,43 %	



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD
SKPD : 4-02.0-00.0-00.01 SEKRETARIAT DPRD
Unit Organisasi : 4-02.0-00.0-00.01.000 SEKRETARIAT DPRD
Sub Unit Organisasi : 4-02.0-00.0-00.01.000.000 SEKRETARIAT DPRD

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		REALISASI	BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	PERUBAHAN		(Rp)	(%)	
00.0.00.00.5	BELANJA DAERAH	95.182.188.176,00		75.935.587.850,00	(19.246.600.326,00)	79,78	
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	56.148.662.176,00		51.973.709.993,00	(4.174.952.183,00)	92,56	
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.062.520,00		9.056.600,00	(1.005.920,00)	90,00	
01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.168.760,00		7.136.500,00	(32.260,00)	99,55	
01.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	7.168.760,00		7.136.500,00	(32.260,00)	99,55	
01.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.168.760,00		7.136.500,00	(32.260,00)	99,55	
01.2.01.01.5.1.02.01	Belanja Barang	6.037.000,00		6.016.500,00	(20.500,00)	99,66	
01.2.01.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.037.000,00		6.016.500,00	(20.500,00)	99,66	
01.2.01.01.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.037.000,00		6.016.500,00	(20.500,00)	99,66	
01.2.01.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.131.760,00		1.120.000,00	(11.760,00)	98,96	
01.2.01.01.5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.131.760,00		1.120.000,00	(11.760,00)	98,96	
01.2.01.01.5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	1.131.760,00		1.120.000,00	(11.760,00)	98,96	
01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.893.760,00		1.920.100,00	(973.660,00)	66,35	
01.2.01.07.5.1	BELANJA OPERASI	2.893.760,00		1.920.100,00	(973.660,00)	66,35	
01.2.01.07.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.893.760,00		1.920.100,00	(973.660,00)	66,35	
01.2.01.07.5.1.02.01	Belanja Barang	1.762.000,00		984.100,00	(777.900,00)	55,85	
01.2.01.07.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.762.000,00		984.100,00	(777.900,00)	55,85	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.01.07.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.762.000,00	984.100,00	(777.900,00)	55,85	
01.2.01.07.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.131.760,00	936.000,00	(195.760,00)	82,70	
01.2.01.07.5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.131.760,00	936.000,00	(195.760,00)	82,70	
01.2.01.07.5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	1.131.760,00	936.000,00	(195.760,00)	82,70	
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.198.768.000,00	3.945.185.839,00	(253.582.161,00)	93,96	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.080.313.000,00	3.838.110.939,00	(242.202.061,00)	94,06	
01.2.02.01.5.1	BELANJA OPERASI	4.080.313.000,00	3.838.110.939,00	(242.202.061,00)	94,06	
01.2.02.01.5.1.01	Belanja Pegawai	4.080.313.000,00	3.838.110.939,00	(242.202.061,00)	94,06	
01.2.02.01.5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.084.011.000,00	1.877.815.533,00	(206.195.467,00)	90,11	
01.2.02.01.5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok PNS	1.465.366.000,00	1.361.569.340,00	(103.796.660,00)	92,92	
01.2.02.01.5.1.01.01.01.0001	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	1.465.366.000,00	1.361.569.340,00	(103.796.660,00)	92,92	
01.2.02.01.5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	147.924.000,00	133.699.046,00	(14.224.954,00)	90,38	
01.2.02.01.5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	147.924.000,00	133.699.046,00	(14.224.954,00)	90,38	
01.2.02.01.5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	141.750.000,00	127.890.000,00	(13.860.000,00)	90,22	
01.2.02.01.5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	141.750.000,00	127.890.000,00	(13.860.000,00)	90,22	
01.2.02.01.5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	0,00	0,00	0,00	0	
01.2.02.01.5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	0,00	0,00	0,00	0	
01.2.02.01.5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	43.470.000,00	41.990.000,00	(1.480.000,00)	96,60	
01.2.02.01.5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Beras ASN	43.470.000,00	41.990.000,00	(1.480.000,00)	96,60	
01.2.02.01.5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras PNS	92.960.000,00	81.327.660,00	(11.632.340,00)	87,49	
01.2.02.01.5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	92.960.000,00	81.327.660,00	(11.632.340,00)	87,49	
01.2.02.01.5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	13.324.000,00	5.400.183,00	(7.923.817,00)	40,53	
01.2.02.01.5.1.01.01.07.0001	Belanja Pembulatan Gaji ASN	13.324.000,00	5.400.183,00	(7.923.817,00)	40,53	
01.2.02.01.5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji PNS	3.485.000,00	15.260,00	(3.469.740,00)	0,44	
01.2.02.01.5.1.01.01.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	3.485.000,00	15.260,00	(3.469.740,00)	0,44	
01.2.02.01.5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	151.253.000,00	114.910.644,00	(36.342.356,00)	75,97	
01.2.02.01.5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	151.253.000,00	114.910.644,00	(36.342.356,00)	75,97	
01.2.02.01.5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.872.000,00	2.753.343,00	(1.118.657,00)	71,11	
01.2.02.01.5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.872.000,00	2.753.343,00	(1.118.657,00)	71,11	
01.2.02.01.5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	11.615.000,00	8.260.057,00	(3.354.943,00)	71,12	
01.2.02.01.5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	11.615.000,00	8.260.057,00	(3.354.943,00)	71,12	
01.2.02.01.5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	8.992.000,00	0,00	(8.992.000,00)	0	
01.2.02.01.5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	8.992.000,00	0,00	(8.992.000,00)	0	
01.2.02.01.5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.996.302.000,00	1.960.295.406,00	(36.006.594,00)	98,20	
01.2.02.01.5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.268.228.000,00	1.223.371.033,00	(44.856.967,00)	96,46	



KODE	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubah	Realisasi	(Rp)	(%)	
01.2.02.01.5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.268.228.000,00	1.223.371.033,00	(44.856.967,00)	96,46	
01.2.02.01.5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	728.074.000,00	736.924.373,00	8.850.373,00	101,22	
01.2.02.01.5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	728.074.000,00	736.924.373,00	8.850.373,00	101,22	
01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	113.220.000,00	101.890.000,00	(11.330.000,00)	89,99	
01.2.02.02.5.1	BELANJA OPERASI	113.220.000,00	101.890.000,00	(11.330.000,00)	89,99	
01.2.02.02.5.1.01	Belanja Pegawai	113.220.000,00	101.890.000,00	(11.330.000,00)	89,99	
01.2.02.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Perimbangan Objekif Lainnya ASN	113.220.000,00	101.890.000,00	(11.330.000,00)	89,99	
01.2.02.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	113.220.000,00	101.890.000,00	(11.330.000,00)	89,99	
01.2.02.02.5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	113.220.000,00	101.890.000,00	(11.330.000,00)	89,99	
01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.235.000,00	5.184.900,00	(50.100,00)	99,04	
01.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	5.235.000,00	5.184.900,00	(50.100,00)	99,04	
01.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.235.000,00	5.184.900,00	(50.100,00)	99,04	
01.2.02.03.5.1.02.01	Belanja Barang	5.235.000,00	5.184.900,00	(50.100,00)	99,04	
01.2.02.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.235.000,00	5.184.900,00	(50.100,00)	99,04	
01.2.02.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.235.000,00	5.184.900,00	(50.100,00)	99,04	
01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	101.000.000,00	100.575.000,00	(425.000,00)	99,58	
01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	101.000.000,00	100.575.000,00	(425.000,00)	99,58	
01.2.03.02.5.1	BELANJA OPERASI	101.000.000,00	100.575.000,00	(425.000,00)	99,58	
01.2.03.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.000.000,00	100.575.000,00	(425.000,00)	99,58	
01.2.03.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	101.000.000,00	100.575.000,00	(425.000,00)	99,58	
01.2.03.02.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	101.000.000,00	100.575.000,00	(425.000,00)	99,58	
01.2.03.02.5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	101.000.000,00	100.575.000,00	(425.000,00)	99,58	
01.2.05	Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	743.240.240,00	603.823.982,00	(139.416.258,00)	81,24	
01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	48.364.240,00	21.426.000,00	(26.938.240,00)	44,30	
01.2.05.09.5.1	BELANJA OPERASI	48.364.240,00	21.426.000,00	(26.938.240,00)	44,30	
01.2.05.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.364.240,00	21.426.000,00	(26.938.240,00)	44,30	
01.2.05.09.5.1.02.02	Belanja Jasa	24.164.240,00	21.426.000,00	(2.738.240,00)	88,67	
01.2.05.09.5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	24.164.240,00	21.426.000,00	(2.738.240,00)	88,67	
01.2.05.09.5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	24.164.240,00	21.426.000,00	(2.738.240,00)	88,67	
01.2.05.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	24.200.000,00	0,00	(24.200.000,00)	0	
01.2.05.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	24.200.000,00	0,00	(24.200.000,00)	0	
01.2.05.09.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	24.200.000,00	0,00	(24.200.000,00)	0	



KODE	URAIAN	Jumlah (Rp)		REALISASI	BERTAMBAH / BERKURANG		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN			(Rp)	(%)	
01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi: Peraturan Perundang-Undangan	694.876.000,00		582.397.982,00	(112.478.018,00)	83,81	
01.2.05.11.5.1	BELANJA OPERASI	694.876.000,00		582.397.982,00	(112.478.018,00)	83,81	
01.2.05.11.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	694.876.000,00		582.397.982,00	(112.478.018,00)	83,81	
01.2.05.11.5.1.02.02	Belanja Jasa	455.000.000,00		391.675.000,00	(63.325.000,00)	86,08	
01.2.05.11.5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	455.000.000,00		391.675.000,00	(63.325.000,00)	86,08	
01.2.05.11.5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	455.000.000,00		391.675.000,00	(63.325.000,00)	86,08	
01.2.05.11.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	239.876.000,00		190.722.982,00	(49.153.018,00)	79,51	
01.2.05.11.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	239.876.000,00		190.722.982,00	(49.153.018,00)	79,51	
01.2.05.11.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	239.876.000,00		190.722.982,00	(49.153.018,00)	79,51	
01.2.05.11.5.1.02.04.01.0001.0001	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.840.382.456,00		1.267.291.495,00	(573.090.961,00)	68,86	
01.2.05.11.5.1.02.04.01.0001.0001.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	179.057.376,00		119.582.000,00	(59.475.376,00)	66,78	
01.2.05.11.5.1.02.04.01.0001.0001.0001.0001	BELANJA OPERASI	171.585.376,00		112.153.000,00	(59.432.376,00)	65,36	
01.2.05.11.5.1.02.04.01.0001.0001.0001.0001.0001	Belanja Barang dan Jasa	171.585.376,00		112.153.000,00	(59.432.376,00)	65,36	
01.2.05.11.5.1.02.04.01.0001.0001.0001.0001.0001.0001	Belanja Barang	171.585.376,00		112.153.000,00	(59.432.376,00)	65,36	
01.2.05.11.5.1.02.04.01.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001	Belanja Barang Pakai Habis	171.585.376,00		112.153.000,00	(59.432.376,00)	65,36	
01.2.05.11.5.1.02.04.01.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001	Belanja Bahan-beli Tabung Gas	900.000,00		0,00	(900.000,00)	0	
01.2.05.11.5.1.02.04.01.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	5.000.000,00		5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.11.5.1.02.04.01.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	765.000,00		200.000,00	(565.000,00)	26,14	
01.2.05.11.5.1.02.04.01.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	164.920.376,00		106.953.000,00	(57.967.376,00)	64,85	
01.2.05.11.5.1.02.04.01.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001	BELANJA MODAL	7.472.000,00		7.429.000,00	(43.000,00)	99,42	
01.2.05.11.5.1.02.04.01.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.472.000,00		7.429.000,00	(43.000,00)	99,42	
01.2.05.11.5.1.02.04.01.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001	Belanja Modal Jaringan	7.472.000,00		7.429.000,00	(43.000,00)	99,42	
01.2.05.11.5.1.02.04.01.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001	Belanja Modal Jaringan Listrik	7.472.000,00		7.429.000,00	(43.000,00)	99,42	
01.2.05.11.5.1.02.04.01.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	7.472.000,00		7.429.000,00	(43.000,00)	99,42	
01.2.05.11.5.1.02.04.01.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	191.612.000,00		168.140.044,00	(23.471.956,00)	87,75	
01.2.05.11.5.1.02.04.01.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001	BELANJA OPERASI	185.498.800,00		162.140.044,00	(23.358.756,00)	87,41	
01.2.05.11.5.1.02.04.01.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001.0001	Belanja Barang dan Jasa	185.498.800,00		162.140.044,00	(23.358.756,00)	87,41	
01.2.05.11.5.1.02.04.01.0001	Belanja Barang	185.498.800,00		162.140.044,00	(23.358.756,00)	87,41	
01.2.05.11.5.1.02.04.01.0001	Belanja Barang Pakai Habis	185.498.800,00		162.140.044,00	(23.358.756,00)	87,41	
01.2.05.11.5.1.02.04.01.0001	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	47.497.800,00		41.430.500,00	(6.067.300,00)	87,23	
01.2.05.11.5.1.02.04.01.0001	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kerias dan Cover	75.364.000,00		74.846.000,00	(518.000,00)	99,31	
01.2.05.11.5.1.02.04.01.0001	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	60.535.000,00		44.300.544,00	(16.234.456,00)	73,18	
01.2.05.11.5.1.02.04.01.0001	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	170.000,00		0,00	(170.000,00)	0	





KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.02.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.932.000,00	1.563.000,00	(369.000,00)	80,90	
01.2.06.02.5.2	BELANJA MODAL					
01.2.06.02.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.113.200,00	6.000.000,00	(113.200,00)	98,15	
01.2.06.02.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	6.113.200,00	6.000.000,00	(113.200,00)	98,15	
01.2.06.02.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	6.113.200,00	6.000.000,00	(113.200,00)	98,15	
01.2.06.02.5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6.113.200,00	6.000.000,00	(113.200,00)	98,15	
01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	220.359.600,00	218.269.615,00	(2.089.985,00)	99,05	
01.2.06.03.5.1	BELANJA OPERASI	180.382.600,00	179.702.615,00	(679.985,00)	99,62	
01.2.06.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.382.600,00	179.702.615,00	(679.985,00)	99,62	
01.2.06.03.5.1.02.01	Belanja Barang	180.382.600,00	179.702.615,00	(679.985,00)	99,62	
01.2.06.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	180.382.600,00	179.702.615,00	(679.985,00)	99,62	
01.2.06.03.5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	17.524.600,00	17.200.115,00	(324.485,00)	98,15	
01.2.06.03.5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	400.000,00	390.000,00	(10.000,00)	97,50	
01.2.06.03.5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	17.160.000,00	17.000.000,00	(160.000,00)	99,07	
01.2.06.03.5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.03.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.155.000,00	975.000,00	(180.000,00)	84,42	
01.2.06.03.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	123.502.000,00	123.501.500,00	(500,00)	100,00	
01.2.06.03.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	19.741.000,00	19.736.000,00	(5.000,00)	99,97	
01.2.06.03.5.2	BELANJA MODAL	39.977.000,00	38.567.000,00	(1.410.000,00)	96,47	
01.2.06.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.977.000,00	38.567.000,00	(1.410.000,00)	96,47	
01.2.06.03.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	39.977.000,00	38.567.000,00	(1.410.000,00)	96,47	
01.2.06.03.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	39.977.000,00	38.567.000,00	(1.410.000,00)	96,47	
01.2.06.03.5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	39.977.000,00	38.567.000,00	(1.410.000,00)	96,47	
01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	136.545.000,00	133.926.500,00	(2.618.500,00)	98,08	
01.2.06.04.5.1	BELANJA OPERASI	136.545.000,00	133.926.500,00	(2.618.500,00)	98,08	
01.2.06.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.545.000,00	133.926.500,00	(2.618.500,00)	98,08	
01.2.06.04.5.1.02.01	Belanja Barang	136.545.000,00	133.926.500,00	(2.618.500,00)	98,08	
01.2.06.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	136.545.000,00	133.926.500,00	(2.618.500,00)	98,08	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	109.474.000,00	109.448.000,00	(26.000,00)	99,98	
01.2.06.04.5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	27.071.000,00	24.478.500,00	(2.592.500,00)	90,42	
01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	71.603.000,00	51.654.300,00	(19.948.700,00)	72,14	
01.2.06.05.5.1	BELANJA OPERASI	71.603.000,00	51.654.300,00	(19.948.700,00)	72,14	
01.2.06.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.603.000,00	51.654.300,00	(19.948.700,00)	72,14	

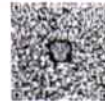
KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.06.05.5.1.02.01	Belanja Barang	71.603.000,00	51.654.300,00	(19.948.700,00)	72,14	
01.2.06.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	71.603.000,00	51.654.300,00	(19.948.700,00)	72,14	
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	54.273.000,00	43.054.300,00	(11.218.700,00)	79,33	
01.2.06.05.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	17.330.000,00	8.600.000,00	(8.730.000,00)	49,62	
01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	53.400.000,00	50.220.000,00	(3.180.000,00)	94,04	
01.2.06.06.5.1	BELANJA OPERASI	53.400.000,00	50.220.000,00	(3.180.000,00)	94,04	
01.2.06.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.400.000,00	50.220.000,00	(3.180.000,00)	94,04	
01.2.06.06.5.1.02.01	Belanja Jasa	53.400.000,00	50.220.000,00	(3.180.000,00)	94,04	
01.2.06.06.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	53.400.000,00	50.220.000,00	(3.180.000,00)	94,04	
01.2.06.06.5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnai/Surat Kabar/Majalah	53.400.000,00	50.220.000,00	(3.180.000,00)	94,04	
01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	756.740.000,00	306.980.500,00	(449.759.500,00)	40,57	
01.2.06.08.5.1	BELANJA OPERASI	756.740.000,00	306.980.500,00	(449.759.500,00)	40,57	
01.2.06.08.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	756.740.000,00	306.980.500,00	(449.759.500,00)	40,57	
01.2.06.08.5.1.02.01	Belanja Barang	756.740.000,00	306.980.500,00	(449.759.500,00)	40,57	
01.2.06.08.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	756.740.000,00	306.980.500,00	(449.759.500,00)	40,57	
01.2.06.08.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9.000,00	0,00	(9.000,00)	0	
01.2.06.08.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	756.731.000,00	306.980.500,00	(449.750.500,00)	40,57	
01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	231.065.480,00	218.518.536,00	(12.546.944,00)	94,57	
01.2.06.09.5.1	BELANJA OPERASI	231.065.480,00	218.518.536,00	(12.546.944,00)	94,57	
01.2.06.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	231.065.480,00	218.518.536,00	(12.546.944,00)	94,57	
01.2.06.09.5.1.02.01	Belanja Jasa	13.883.480,00	2.125.000,00	(11.758.480,00)	15,31	
01.2.06.09.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	50,00	
01.2.06.09.5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	50,00	
01.2.06.09.5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	11.883.480,00	1.125.000,00	(10.758.480,00)	9,47	
01.2.06.09.5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	11.883.480,00	1.125.000,00	(10.758.480,00)	9,47	
01.2.06.09.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	217.182.000,00	216.393.536,00	(788.464,00)	99,64	
01.2.06.09.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	217.182.000,00	216.393.536,00	(788.464,00)	99,64	
01.2.06.09.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	217.182.000,00	216.393.536,00	(788.464,00)	99,64	
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Unsur Pemerintah Daerah	6.035.365.694,00	5.631.182.232,00	(404.183.462,00)	93,30	
01.2.07.05	Pengadaan Mebel	937.358.000,00	925.931.284,00	(11.426.716,00)	98,78	
01.2.07.05.5.1	BELANJA OPERASI	2.542.000,00	2.542.000,00	0,00	100,00	





KODE	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	(%)	
01.2.07.05.5.1.01	Belanja Pegawai	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	100,00	
01.2.07.05.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	100,00	
01.2.07.05.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	100,00	
01.2.07.05.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	100,00	
01.2.07.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.182.000,00	1.182.000,00	0,00	100,00	
01.2.07.05.5.1.02.01	Belanja Barang	1.182.000,00	1.182.000,00	0,00	100,00	
01.2.07.05.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.182.000,00	1.182.000,00	0,00	100,00	
01.2.07.05.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.182.000,00	1.182.000,00	0,00	100,00	
01.2.07.05.5.2	BELANJA MODAL	934.816.000,00	923.389.284,00	(11.426.716,00)	98,78	
01.2.07.05.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	934.816.000,00	923.389.284,00	(11.426.716,00)	98,78	
01.2.07.05.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	934.816.000,00	923.389.284,00	(11.426.716,00)	98,78	
01.2.07.05.5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	14.751.000,00	14.700.000,00	(51.000,00)	99,65	
01.2.07.05.5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpanan Perengkapan Kantor	14.751.000,00	14.700.000,00	(51.000,00)	99,65	
01.2.07.05.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	648.149.000,00	644.139.284,00	(4.009.716,00)	99,38	
01.2.07.05.5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	648.149.000,00	644.139.284,00	(4.009.716,00)	99,38	
01.2.07.05.5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	271.916.000,00	264.550.000,00	(7.366.000,00)	97,29	
01.2.07.05.5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	13.238.000,00	13.200.000,00	(38.000,00)	99,71	
01.2.07.05.5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	258.678.000,00	251.350.000,00	(7.328.000,00)	97,17	
01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	680.061.000,00	640.322.000,00	(39.739.000,00)	94,16	
01.2.07.06.5.1	BELANJA OPERASI	83.012.000,00	79.432.000,00	(3.580.000,00)	95,69	
01.2.07.06.5.1.01	Belanja Pegawai	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	100,00	
01.2.07.06.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	100,00	
01.2.07.06.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	100,00	
01.2.07.06.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	100,00	
01.2.07.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.972.000,00	77.392.000,00	(3.580.000,00)	95,58	
01.2.07.06.5.1.02.01	Belanja Barang	80.972.000,00	77.392.000,00	(3.580.000,00)	95,58	
01.2.07.06.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	80.972.000,00	77.392.000,00	(3.580.000,00)	95,58	
01.2.07.06.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	2.892.000,00	(108.000,00)	96,40	
01.2.07.06.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	77.972.000,00	74.500.000,00	(3.472.000,00)	95,55	
01.2.07.06.5.2	BELANJA MODAL	597.049.000,00	560.890.000,00	(36.159.000,00)	93,94	
01.2.07.06.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	597.049.000,00	560.890.000,00	(36.159.000,00)	93,94	
01.2.07.06.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	135.782.000,00	123.100.000,00	(12.682.000,00)	90,66	
01.2.07.06.5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	115.916.000,00	109.200.000,00	(6.716.000,00)	94,21	
01.2.07.06.5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpanan Perengkapan Kantor	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		JUMLAH (Rp)	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.07.06.5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	112.316.000,00	105.600.000,00	(6.716.000,00)	94,02	
01.2.07.06.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	19.866.000,00	13.900.000,00	(5.966.000,00)	69,97	
01.2.07.06.5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	19.866.000,00	13.900.000,00	(5.966.000,00)	69,97	
01.2.07.06.5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	461.267.000,00	437.790.000,00	(23.477.000,00)	94,91	
01.2.07.06.5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	314.667.000,00	305.940.000,00	(8.727.000,00)	97,23	
01.2.07.06.5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	314.667.000,00	305.940.000,00	(8.727.000,00)	97,23	
01.2.07.06.5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	146.600.000,00	131.850.000,00	(14.750.000,00)	89,94	
01.2.07.06.5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	146.600.000,00	131.850.000,00	(14.750.000,00)	89,94	
01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.210.056.194,00	2.976.956.248,00	(233.099.946,00)	92,74	
01.2.07.09.5.1	BELANJA OPERASI	481.500,00	471.800,00	(9.700,00)	97,99	
01.2.07.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	481.500,00	471.800,00	(9.700,00)	97,99	
01.2.07.09.5.1.02.01	Belanja Barang	481.500,00	471.800,00	(9.700,00)	97,99	
01.2.07.09.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	481.500,00	471.800,00	(9.700,00)	97,99	
01.2.07.09.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	481.500,00	471.800,00	(9.700,00)	97,99	
01.2.07.09.5.2	BELANJA MODAL	3.209.574.694,00	2.976.484.448,00	(233.090.246,00)	92,74	
01.2.07.09.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.209.574.694,00	2.976.484.448,00	(233.090.246,00)	92,74	
01.2.07.09.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	3.179.189.520,00	2.951.771.448,00	(227.418.072,00)	92,85	
01.2.07.09.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.179.189.520,00	2.951.771.448,00	(227.418.072,00)	92,85	
01.2.07.09.5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	679.429.277,00	498.087.400,00	(181.341.877,00)	73,31	
01.2.07.09.5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	2.081.134.723,00	2.038.748.293,00	(42.386.430,00)	97,96	
01.2.07.09.5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	213.294.730,00	211.785.755,00	(1.508.975,00)	99,29	
01.2.07.09.5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	205.330.790,00	203.150.000,00	(2.180.790,00)	96,94	
01.2.07.09.5.2.03.04	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	30.385.174,00	24.713.000,00	(5.672.174,00)	81,33	
01.2.07.09.5.2.03.04.01	Belanja Modal Pagar	30.385.174,00	24.713.000,00	(5.672.174,00)	81,33	
01.2.07.09.5.2.03.04.01.0004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.207.890.500,00	1.087.972.700,00	(119.917.800,00)	90,07	
01.2.07.10.5.1	BELANJA OPERASI	33.938.800,00	33.487.700,00	(451.100,00)	98,67	
01.2.07.10.5.1.01	Belanja Pegawai	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	100,00	
01.2.07.10.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	100,00	
01.2.07.10.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	100,00	
01.2.07.10.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	100,00	
01.2.07.10.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.578.800,00	32.127.700,00	(451.100,00)	98,62	
01.2.07.10.5.1.02.01	Belanja Barang	20.002.700,00	19.629.700,00	(373.000,00)	98,14	
01.2.07.10.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	20.002.700,00	19.629.700,00	(373.000,00)	98,14	
01.2.07.10.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.919.700,00	1.879.700,00	(40.000,00)	97,92	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.07.10.5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	18.083.000,00	17.750.000,00	(333.000,00)	98,16	
01.2.07.10.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	12.576.100,00	12.498.000,00	(78.100,00)	99,38	
01.2.07.10.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.576.100,00	12.498.000,00	(78.100,00)	99,38	
01.2.07.10.5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat	12.576.100,00	12.498.000,00	(78.100,00)	99,38	
01.2.07.10.5.2	Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					
01.2.07.10.5.2	BELANJA MODAL	1.173.951.700,00	1.054.485.000,00	(119.466.700,00)	89,82	
01.2.07.10.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.173.951.700,00	1.054.485.000,00	(119.466.700,00)	89,82	
01.2.07.10.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	682.883.000,00	631.993.000,00	(50.890.000,00)	92,55	
01.2.07.10.5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	85.096.000,00	77.873.000,00	(7.223.000,00)	91,51	
01.2.07.10.5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perengkapan Kantor	28.000.000,00	27.733.000,00	(267.000,00)	99,05	
01.2.07.10.5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	57.096.000,00	50.140.000,00	(6.956.000,00)	87,82	
01.2.07.10.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	597.787.000,00	554.120.000,00	(43.667.000,00)	92,70	
01.2.07.10.5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	15.042.000,00	10.000.000,00	(5.042.000,00)	66,48	
01.2.07.10.5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	582.745.000,00	544.120.000,00	(38.625.000,00)	93,36	
01.2.07.10.5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	1.412.000,00	1.400.000,00	(12.000,00)	99,15	
01.2.07.10.5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	477.504.900,00	415.582.000,00	(61.922.900,00)	87,03	
01.2.07.10.5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	439.267.000,00	382.042.000,00	(57.225.000,00)	86,97	
01.2.07.10.5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	335.900.000,00	282.142.000,00	(53.758.000,00)	84,00	
01.2.07.10.5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	103.367.000,00	99.900.000,00	(3.467.000,00)	96,65	
01.2.07.10.5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	21.189.000,00	16.500.000,00	(4.689.000,00)	77,87	
01.2.07.10.5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	21.189.000,00	16.500.000,00	(4.689.000,00)	77,87	
01.2.07.10.5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	17.048.900,00	17.040.000,00	(8.900,00)	99,95	
01.2.07.10.5.2.02.06.03.0022	Belanja Modal Humidity Control	17.048.900,00	17.040.000,00	(8.900,00)	99,95	
01.2.07.10.5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	13.563.800,00	6.910.000,00	(6.653.800,00)	50,94	
01.2.07.10.5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	13.563.800,00	6.910.000,00	(6.653.800,00)	50,94	
01.2.07.10.5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	13.563.800,00	6.910.000,00	(6.653.800,00)	50,94	
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Unsur Pemerintahan Daerah	2.219.663.707,00	1.860.974.658,00	(358.689.049,00)	83,84	
01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.000.000,00	12.576.500,00	(423.500,00)	96,74	
01.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	13.000.000,00	12.576.500,00	(423.500,00)	96,74	
01.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	12.576.500,00	(423.500,00)	96,74	
01.2.08.01.5.1.02.01	Belanja Barang	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	500.000,00	76.500,00	(423.500,00)	15,30	
01.2.08.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	76.500,00	(423.500,00)	15,30	
01.2.08.01.5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	500.000,00	76.500,00	(423.500,00)	15,30	



KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN		REALISASI	BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		JUMLAH (Rp)	(Rp)		(Rp)	(%)	
01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	889.915.707,00		565.564.091,00	(324.351.616,00)	63,55	
01.2.08.02.5.1	BELANJA OPERASI	889.915.707,00		565.564.091,00	(324.351.616,00)	63,55	
01.2.08.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	889.915.707,00		565.564.091,00	(324.351.616,00)	63,55	
01.2.08.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	889.915.707,00		565.564.091,00	(324.351.616,00)	63,55	
01.2.08.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	889.915.707,00		565.564.091,00	(324.351.616,00)	63,55	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon Air, dan Listrik	7.500.000,00		1.975.000,00	(5.525.000,00)	26,33	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	4.998.000,00		1.747.753,00	(3.250.247,00)	34,97	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	58.394.700,00		5.208.664,00	(53.186.036,00)	8,92	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	538.974.807,00		358.034.774,00	(180.940.033,00)	66,43	
01.2.08.02.5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	280.048.200,00		198.597.900,00	(81.450.300,00)	70,92	
01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.316.748.000,00		1.282.834.067,00	(33.913.933,00)	97,42	
01.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	1.316.748.000,00		1.282.834.067,00	(33.913.933,00)	97,42	
01.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.316.748.000,00		1.282.834.067,00	(33.913.933,00)	97,42	
01.2.08.04.5.1.02.01	Belanja Barang	180.650.000,00		163.500.000,00	(17.150.000,00)	90,51	
01.2.08.04.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	180.650.000,00		163.500.000,00	(17.150.000,00)	90,51	
01.2.08.04.5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	59.204.000,00		59.000.000,00	(204.000,00)	99,66	
01.2.08.04.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.561.000,00		0,00	(1.561.000,00)	0	
01.2.08.04.5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	114.885.000,00		103.500.000,00	(11.385.000,00)	90,09	
01.2.08.04.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.000.000,00		1.000.000,00	(4.000.000,00)	20,00	
01.2.08.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.099.690.000,00		1.083.116.401,00	(16.573.599,00)	98,49	
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0003	Belanja Jasa Kantor	994.882.000,00		979.731.071,00	(15.150.929,00)	98,48	
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0007	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.500.000,00		4.000.000,00	(2.500.000,00)	61,54	
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0014	Honorarium Rohaniwan	2.500.000,00		500.000,00	(2.000.000,00)	20,00	
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	3.600.000,00		2.550.000,00	(1.050.000,00)	70,83	
01.2.08.04.5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	982.282.000,00		972.681.071,00	(9.600.929,00)	99,02	
01.2.08.04.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	44.808.000,00		43.385.330,00	(1.422.670,00)	96,82	
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	39.216.000,00		38.099.520,00	(1.116.480,00)	97,15	
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.400.000,00		2.349.243,00	(50.757,00)	97,89	
01.2.08.04.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	3.192.000,00		2.936.567,00	(255.433,00)	92,00	
01.2.08.04.5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	60.000.000,00		60.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.02.03.0004	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	60.000.000,00		60.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Dibenarkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	36.408.000,00		36.217.666,00	(190.334,00)	99,48	
01.2.08.04.5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Dibenarkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	36.408.000,00		36.217.666,00	(190.334,00)	99,48	
01.2.08.04.5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Dibenarkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	36.408.000,00		36.217.666,00	(190.334,00)	99,48	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.856.164.059,00	3.598.630.258,00	(267.553.801,00)	93,08	
01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	584.370.000,00	510.851.589,00	(73.518.411,00)	87,42	
01.2.09.02.5.1	BELANJA OPERASI	584.370.000,00	510.851.589,00	(73.518.411,00)	87,42	
01.2.09.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	584.370.000,00	510.851.589,00	(73.518.411,00)	87,42	
01.2.09.02.5.1.02.01	Belanja Jasa	153.120.000,00	152.566.490,00	(553.510,00)	99,64	
01.2.09.02.5.1.02.01.0033	Belanja Jasa Kantor	146.400.000,00	146.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.02.5.1.02.02	Belanja Jasa Tenaga Supir	146.400.000,00	146.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.02.5.1.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	6.720.000,00	6.166.490,00	(553.510,00)	91,76	
01.2.09.02.5.1.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.880.000,00	5.376.000,00	(504.000,00)	91,43	
01.2.09.02.5.1.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	360.000,00	351.326,00	(8.674,00)	97,59	
01.2.09.02.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	480.000,00	439.164,00	(40.836,00)	91,49	
01.2.09.02.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	425.790.000,00	352.868.719,00	(72.921.281,00)	82,87	
01.2.09.02.5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan	425.790.000,00	352.868.719,00	(72.921.281,00)	82,87	
01.2.09.02.5.1.02.03.02.0038	Dinas Bermotor Perorangan	303.700.000,00	286.822.119,00	(16.877.881,00)	94,44	
01.2.09.02.5.1.02.05	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	122.090.000,00	66.046.600,00	(56.043.400,00)	54,10	
01.2.09.02.5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.460.000,00	5.416.380,00	(43.620,00)	99,20	
01.2.09.02.5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	5.460.000,00	5.416.380,00	(43.620,00)	99,20	
01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	56.570.000,00	49.095.000,00	(7.475.000,00)	86,79	
01.2.09.05.1	BELANJA OPERASI	56.570.000,00	49.095.000,00	(7.475.000,00)	86,79	
01.2.09.05.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.570.000,00	49.095.000,00	(7.475.000,00)	86,79	
01.2.09.05.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	56.570.000,00	49.095.000,00	(7.475.000,00)	86,79	
01.2.09.05.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	56.570.000,00	49.095.000,00	(7.475.000,00)	86,79	
01.2.09.05.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	56.570.000,00	49.095.000,00	(7.475.000,00)	86,79	
01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	120.709.000,00	74.810.000,00	(45.899.000,00)	61,98	
01.2.09.06.5.1	BELANJA OPERASI	120.709.000,00	74.810.000,00	(45.899.000,00)	61,98	
01.2.09.06.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.709.000,00	74.810.000,00	(45.899.000,00)	61,98	
01.2.09.06.5.1.02.01	Belanja Barang Pakai Habis	457.000,00	0,00	(457.000,00)	0	
01.2.09.06.5.1.02.01.01		457.000,00	0,00	(457.000,00)	0	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.09.06.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	457.000,00	0,00	(457.000,00)	0	
01.2.09.06.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	120.252.000,00	74.810.000,00	(45.442.000,00)	62,21	
01.2.09.06.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	120.252.000,00	74.810.000,00	(45.442.000,00)	62,21	
01.2.09.06.5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	10.000.000,00	2.000.000,00	(8.000.000,00)	20,00	
01.2.09.06.5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	7.000.000,00	2.000.000,00	(5.000.000,00)	28,57	
01.2.09.06.5.1.02.03.02.0034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	5.133.000,00	1.000.000,00	(4.133.000,00)	19,48	
01.2.09.06.5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	16.974.000,00	16.800.000,00	(174.000,00)	98,97	
01.2.09.06.5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	5.782.000,00	2.000.000,00	(3.782.000,00)	34,59	
01.2.09.06.5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	10.514.000,00	3.325.000,00	(7.189.000,00)	31,62	
01.2.09.06.5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	7.545.000,00	2.000.000,00	(5.545.000,00)	26,51	
01.2.09.06.5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	25.550.000,00	21.485.000,00	(4.065.000,00)	84,09	
01.2.09.06.5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	24.150.000,00	17.675.000,00	(6.475.000,00)	73,19	
01.2.09.06.5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	7.604.000,00	6.525.000,00	(1.079.000,00)	85,81	
01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.655.114.059,00	2.585.949.223,00	(69.164.836,00)	97,40	
01.2.09.09.5.1	BELANJA OPERASI	1.789.909.167,00	1.770.561.538,00	(19.347.629,00)	98,92	
01.2.09.09.5.1.01	Belanja Pegawai	2.720.000,00	2.720.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.720.000,00	2.720.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.720.000,00	2.720.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.720.000,00	2.720.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.787.189.167,00	1.767.841.538,00	(19.347.629,00)	98,92	
01.2.09.09.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.008.432.000,00	1.001.133.580,00	(7.298.420,00)	99,28	
01.2.09.09.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	965.424.000,00	961.476.000,00	(3.948.000,00)	99,59	
01.2.09.09.5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	468.480.000,00	468.480.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09.5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	468.480.000,00	468.480.000,00	0,00	100,00	



KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		JUMLAH (Rp)	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.09.09.5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Perawatan Pakaian, Alat Kesemian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	8.400.000,00	5.668.000,00	(2.732.000,00)	67,48	
01.2.09.09.5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	20.054.000,00	18.848.000,00	(1.216.000,00)	93,94	
01.2.09.09.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	43.098.000,00	39.657.580,00	(3.350.420,00)	92,21	
01.2.09.09.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	37.632.000,00	34.598.400,00	(3.033.600,00)	91,94	
01.2.09.09.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.374.000,00	2.248.516,00	(55.484,00)	97,59	
01.2.09.09.5.1.02.03	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	3.072.000,00	2.810.664,00	(261.336,00)	91,49	
01.2.09.09.5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	743.813.167,00	732.043.100,00	(11.770.067,00)	98,42	
01.2.09.09.5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan	743.813.167,00	732.043.100,00	(11.770.067,00)	98,42	
	Gedung Kantor	186.314.353,00	179.110.000,00	(7.204.353,00)	96,13	
01.2.09.09.5.1.02.03.03.0002	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan	135.623.820,00	134.776.000,00	(847.820,00)	99,37	
	Gudang					
01.2.09.09.5.1.02.03.03.0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan	17.903.079,00	17.487.000,00	(416.079,00)	97,68	
	Kesehatan					
01.2.09.09.5.1.02.03.03.0009	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan	403.971.915,00	400.670.100,00	(3.301.815,00)	99,18	
	Gedung Tempat Pertemuan					
01.2.09.09.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Dibenakan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	34.944.000,00	34.664.858,00	(279.142,00)	99,20	
01.2.09.09.5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	34.944.000,00	34.664.858,00	(279.142,00)	99,20	
01.2.09.09.5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	865.204.892,00	815.387.685,00	(49.817.207,00)	94,24	
	BELANJA MODAL	203.870.000,00	201.500.000,00	(2.370.000,00)	98,84	
01.2.09.09.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	203.870.000,00	201.500.000,00	(2.370.000,00)	98,84	
01.2.09.09.5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	203.870.000,00	201.500.000,00	(2.370.000,00)	98,84	
01.2.09.09.5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	203.870.000,00	201.500.000,00	(2.370.000,00)	98,84	
01.2.09.09.5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	203.870.000,00	201.500.000,00	(2.370.000,00)	98,84	
01.2.09.09.5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	661.334.892,00	613.887.685,00	(47.447.207,00)	92,83	
01.2.09.09.5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	661.334.892,00	613.887.685,00	(47.447.207,00)	92,83	
01.2.09.09.5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	661.334.892,00	613.887.685,00	(47.447.207,00)	92,83	
01.2.09.09.5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	234.963.220,00	190.763.380,00	(44.199.840,00)	81,19	
01.2.09.09.5.2.03.01.01.0009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	205.858.215,00	204.558.691,00	(1.299.524,00)	99,37	
01.2.09.09.5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	220.513.457,00	218.565.614,00	(1.947.843,00)	99,12	



KODE	URAIAN	Jumlah (Rp)		REALISASI	BERTAMBAH / BERKURANG		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH (Rp)		(Rp)	(%)	
01.2.09.10.5.1.02.01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	449.421.000,00		377.924.446,00	(71.496.554,00)	84,09	
01.2.09.10.5.1.02.01	BELANJA OPERASI	427.310.000,00		356.122.446,00	(71.187.554,00)	83,34	
01.2.09.10.5.1.02.01	Belanja Barang dan Jasa	427.310.000,00		356.122.446,00	(71.187.554,00)	83,34	
01.2.09.10.5.1.02.01	Belanja Barang	63.296.000,00		59.363.000,00	(3.933.000,00)	93,79	
01.2.09.10.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	63.296.000,00		59.363.000,00	(3.933.000,00)	93,79	
01.2.09.10.5.1.02.01.01.00012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.478.000,00		2.290.000,00	(188.000,00)	92,41	
01.2.09.10.5.1.02.01.01.00023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	37.720.000,00		37.720.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02.01.01.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	568.000,00		560.000,00	(8.000,00)	98,59	
01.2.09.10.5.1.02.01.01.00030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	7.150.000,00		6.343.000,00	(807.000,00)	88,71	
01.2.09.10.5.1.02.01.01.00031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	930.000,00		0,00	(930.000,00)	0	
01.2.09.10.5.1.02.01.01.00036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	14.420.000,00		12.450.000,00	(2.000.000,00)	86,16	
01.2.09.10.5.1.02.02	Belanja Jasa	183.744.000,00		183.655.790,00	(88.210,00)	99,95	
01.2.09.10.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	175.680.000,00		175.680.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02.02.01.00035	Belanja Jasa Tenaga Teknis Mekanik dan Listrik	175.680.000,00		175.680.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	8.064.000,00		7.975.790,00	(88.210,00)	98,91	
01.2.09.10.5.1.02.02.02.00005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	7.056.000,00		7.027.200,00	(28.800,00)	99,59	
01.2.09.10.5.1.02.02.02.00006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	432.000,00		421.596,00	(10.404,00)	97,59	
01.2.09.10.5.1.02.02.02.00007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	576.000,00		526.994,00	(49.006,00)	91,49	
01.2.09.10.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	173.718.000,00		106.604.000,00	(67.114.000,00)	61,37	
01.2.09.10.5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	146.718.000,00		97.604.000,00	(49.114.000,00)	66,52	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0010	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	38.022.000,00		12.210.000,00	(25.812.000,00)	32,11	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.00022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	8.640.000,00		8.640.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	68.595.000,00		56.936.000,00	(11.659.000,00)	83,00	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat	25.187.000,00		14.725.000,00	(10.462.000,00)	58,46	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0124	Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.014.000,00		3.638.000,00	(376.000,00)	90,63	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0138	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	800.000,00		0,00	(800.000,00)	0	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		REALISASI	BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN			(Rp)	(%)	
01.2.09.10.5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	1.460.000,00		1.455.000,00	(5.000,00)	99,66	
01.2.09.10.5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	27.000.000,00		9.000.000,00	(18.000.000,00)	33,33	
01.2.09.10.5.1.02.03.05.0057	Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman	27.000.000,00		9.000.000,00	(18.000.000,00)	33,33	
01.2.09.10.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Dibenikan kepada Pihak Keligai/Pihak Lain/Masyarakat	6.552.000,00		6.499.656,00	(52.344,00)	99,20	
01.2.09.10.5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Dibenikan kepada Pihak Keligai/Pihak Lain/Masyarakat	6.552.000,00		6.499.656,00	(52.344,00)	99,20	
01.2.09.10.5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Dibenikan kepada Pihak Keligai/Pihak Lain	6.552.000,00		6.499.656,00	(52.344,00)	99,20	
01.2.09.10.5.2	BELANJA MODAL	22.111.000,00		21.802.000,00	(309.000,00)	98,60	
01.2.09.10.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.111.000,00		21.802.000,00	(309.000,00)	98,60	
01.2.09.10.5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	17.125.000,00		16.816.000,00	(309.000,00)	98,20	
01.2.09.10.5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	17.125.000,00		16.816.000,00	(309.000,00)	98,20	
01.2.09.10.5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	17.125.000,00		16.816.000,00	(309.000,00)	98,20	
01.2.09.10.5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.986.000,00		4.986.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	4.986.000,00		4.986.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10.5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.986.000,00		4.986.000,00	0,00	100,00	
01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	36.225.408.500,00		34.161.672.298,00	(2.063.736.202,00)	94,30	
01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	35.210.152.000,00		33.312.579.640,00	(1.897.572.360,00)	94,61	
01.2.15.01.5.1	BELANJA OPEPASI	35.210.152.000,00		33.312.579.640,00	(1.897.572.360,00)	94,61	
01.2.15.01.5.1.01	Belanja Pegawai	35.210.152.000,00		33.312.579.640,00	(1.897.572.360,00)	94,61	
01.2.15.01.5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	34.745.104.000,00		32.919.459.640,00	(1.825.644.360,00)	94,75	
01.2.15.01.5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	1.285.480.000,00		1.004.010.000,00	(281.470.000,00)	78,10	
01.2.15.01.5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	1.285.480.000,00		1.004.010.000,00	(281.470.000,00)	78,10	
01.2.15.01.5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	180.656.000,00		107.818.200,00	(72.837.800,00)	59,68	
01.2.15.01.5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	180.656.000,00		107.818.200,00	(72.837.800,00)	59,68	
01.2.15.01.5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	181.440.000,00		120.651.720,00	(60.788.280,00)	66,50	
01.2.15.01.5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	181.440.000,00		120.651.720,00	(60.788.280,00)	66,50	
01.2.15.01.5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	110.282.400,00		86.058.000,00	(24.224.400,00)	78,03	
01.2.15.01.5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	110.282.400,00		86.058.000,00	(24.224.400,00)	78,03	
01.2.15.01.5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.864.483.600,00		1.455.814.500,00	(408.669.100,00)	78,08	
01.2.15.01.5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.864.483.600,00		1.455.814.500,00	(408.669.100,00)	78,08	
01.2.15.01.5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	163.848.000,00		140.679.000,00	(23.169.000,00)	85,86	
01.2.15.01.5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	163.848.000,00		140.679.000,00	(23.169.000,00)	85,86	
01.2.15.01.5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	53.163.000,00		4.339.125,00	(48.823.875,00)	8,16	
01.2.15.01.5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	53.163.000,00		4.339.125,00	(48.823.875,00)	8,16	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.15.01.5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.138.340.000,00	7.938.000.000,00	(200.340.000,00)	97,54	
01.2.15.01.5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.138.340.000,00	7.938.000.000,00	(200.340.000,00)	97,54	
01.2.15.01.5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.268.000.000,00	1.955.100.000,00	(312.900.000,00)	86,20	
01.2.15.01.5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.268.000.000,00	1.955.100.000,00	(312.900.000,00)	86,20	
01.2.15.02.5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	141.565.000,00	3.519.161,00	(138.045.839,00)	2,49	
01.2.15.01.5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	141.565.000,00	3.519.161,00	(138.045.839,00)	2,49	
01.2.15.01.5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	570.000,00	26.702,00	(543.298,00)	4,68	
01.2.15.01.5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	570.000,00	26.702,00	(543.298,00)	4,68	
01.2.15.01.5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	12.585.276.000,00	12.408.293.232,00	(176.982.768,00)	98,59	
01.2.15.01.5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	259.200.000,00	88.031.564,00	(171.168.336,00)	33,96	
01.2.15.01.5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	3.519.000,00	2.065.392,00	(1.453.608,00)	58,69	
01.2.15.01.5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kemalian DPRD	10.557.000,00	6.196.176,00	(4.360.824,00)	58,69	
01.2.15.01.5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	12.312.000.000,00	12.312.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.15.01.5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	7.695.600.000,00	7.692.000.000,00	(3.600.000,00)	99,95	
01.2.15.01.5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	7.695.600.000,00	7.692.000.000,00	(3.600.000,00)	99,95	
01.2.15.01.5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	76.400.000,00	3.150.000,00	(73.250.000,00)	4,12	
01.2.15.01.5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	76.400.000,00	3.150.000,00	(73.250.000,00)	4,12	
01.2.15.01.5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	465.048.000,00	393.120.000,00	(71.928.000,00)	84,53	
01.2.15.01.5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	465.048.000,00	393.120.000,00	(71.928.000,00)	84,53	
01.2.15.01.5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	465.048.000,00	393.120.000,00	(71.928.000,00)	84,53	
01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	890.347.500,00	796.680.000,00	(93.667.500,00)	89,48	
01.2.15.02.5.1	BELANJA OPERASI	890.347.500,00	796.680.000,00	(93.667.500,00)	89,48	
01.2.15.02.5.1.01	Belanja Pegawai	680.000,00	0,00	(680.000,00)	0	
01.2.15.02.5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	680.000,00	0,00	(680.000,00)	0	
01.2.15.02.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	680.000,00	0,00	(680.000,00)	0	
01.2.15.02.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengndaan Barang/Jasa	680.000,00	0,00	(680.000,00)	0	
01.2.15.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	889.667.500,00	796.680.000,00	(92.987.500,00)	89,55	
01.2.15.02.5.1.02.01	Belanja Barang	879.667.500,00	787.800.000,00	(91.867.500,00)	89,56	
01.2.15.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	879.667.500,00	787.800.000,00	(91.867.500,00)	89,56	
01.2.15.02.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	57.500,00	0,00	(57.500,00)	0	
01.2.15.02.5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	180.000,00	0,00	(180.000,00)	0	
01.2.15.02.5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	233.280.000,00	200.850.000,00	(32.430.000,00)	86,10	



KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI	BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					(Rp)	(%)	
01.2.15.02.5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Airbut Pimpinan dan Anggota DPRD	403.600.000,00		350.700.000,00	(52.900.000,00)	86,89	
01.2.15.02.5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	242.550.000,00		236.250.000,00	(6.300.000,00)	97,40	
01.2.15.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	10.000.000,00		8.880.000,00	(1.120.000,00)	88,80	
01.2.15.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00		8.880.000,00	(1.120.000,00)	88,80	
01.2.15.02.5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Pertnzan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	10.000.000,00		8.880.000,00	(1.120.000,00)	88,80	
01.2.15.03	BELANJA OPERASI	124.909.000,00		52.412.658,00	(72.496.342,00)	41,96	
01.2.15.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.909.000,00		52.412.658,00	(72.496.342,00)	41,96	
01.2.15.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	124.909.000,00		52.412.658,00	(72.496.342,00)	41,96	
01.2.15.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	124.909.000,00		52.412.658,00	(72.496.342,00)	41,96	
01.2.15.03.5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	124.909.000,00		52.412.658,00	(72.496.342,00)	41,96	
01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	908.587.000,00		795.317.631,00	(113.269.369,00)	87,53	
01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	908.587.000,00		795.317.631,00	(113.269.369,00)	87,53	
01.2.16.03.5.1.02	BELANJA OPERASI	908.587.000,00		795.317.631,00	(113.269.369,00)	87,53	
01.2.16.03.5.1.02.01	Belanja Barang dan Jasa	908.587.000,00		795.317.631,00	(113.269.369,00)	87,53	
01.2.16.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang	721.908.000,00		631.252.000,00	(90.656.000,00)	87,44	
01.2.16.03.5.1.02.01.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	721.908.000,00		631.252.000,00	(90.656.000,00)	87,44	
01.2.16.03.5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	11.340.000,00		11.320.000,00	(20.000,00)	99,82	
01.2.16.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	423.525.000,00		423.177.000,00	(348.000,00)	99,92	
01.2.16.03.5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	287.043.000,00		196.755.000,00	(90.288.000,00)	68,55	
01.2.16.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	181.219.000,00		159.100.616,00	(22.118.384,00)	87,79	
01.2.16.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	166.550.000,00		151.000.000,00	(15.550.000,00)	90,66	
01.2.16.03.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9.700.000,00		0,00	(9.700.000,00)	0	
01.2.16.03.5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pembeli Keterangan Ahli Saksi Ahli dan Beracara	2.250.000,00		0,00	(2.250.000,00)	0	
01.2.16.03.5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	3.600.000,00		0,00	(3.600.000,00)	0	
01.2.16.03.5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	4.600.000,00		4.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.16.03.5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	146.400.000,00		146.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.16.03.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	6.720.000,00		6.100.616,00	(619.384,00)	90,78	
01.2.16.03.5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.880.000,00		5.376.000,00	(504.000,00)	91,43	
01.2.16.03.5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	360.000,00		322.049,00	(37.951,00)	89,46	
01.2.16.03.5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	480.000,00		402.567,00	(77.433,00)	83,87	
01.2.16.03.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	7.949.000,00		2.000.000,00	(5.949.000,00)	25,16	
01.2.16.03.5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	2.020.000,00		2.000.000,00	(20.000,00)	99,01	
01.2.16.03.5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.929.000,00		0,00	(5.929.000,00)	0	
01.2.16.03.5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.460.000,00		4.965.015,00	(494.985,00)	90,93	
01.2.16.03.5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.460.000,00		4.965.015,00	(494.985,00)	90,93	



KODE	URAIAN	Jumlah (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
01.2.16.03.5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	5.460.000,00	4.965.015,00	(494.985,00)	90,93	
02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	39.033.526.000,00	23.961.877.857,00	(15.071.648.143,00)	61,39	
02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	5.557.144.000,00	3.356.186.826,00	(2.200.957.174,00)	60,39	
02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	822.192.000,00	495.395.960,00	(326.796.040,00)	60,25	
02.2.01.01.5.1	BELANJA OPERASI	822.192.000,00	495.395.960,00	(326.796.040,00)	60,25	
02.2.01.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	822.192.000,00	495.395.960,00	(326.796.040,00)	60,25	
02.2.01.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	822.192.000,00	495.395.960,00	(326.796.040,00)	60,25	
02.2.01.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	822.192.000,00	495.395.960,00	(326.796.040,00)	60,25	
02.2.01.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	822.192.000,00	495.395.960,00	(326.796.040,00)	60,25	
02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Perda	1.592.804.000,00	418.716.370,00	(1.174.087.630,00)	26,29	
02.2.01.02.5.1	BELANJA OPERASI	1.592.804.000,00	418.716.370,00	(1.174.087.630,00)	26,29	
02.2.01.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.592.804.000,00	418.716.370,00	(1.174.087.630,00)	26,29	
02.2.01.02.5.1.02.01	Belanja Barang	6.750.000,00	6.723.100,00	(26.900,00)	99,60	
02.2.01.02.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	6.750.000,00	6.723.100,00	(26.900,00)	99,60	
02.2.01.02.5.1.02.01.01.0001	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.750.000,00	6.723.100,00	(26.900,00)	99,60	
02.2.01.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	185.200.000,00	65.450.000,00	(119.750.000,00)	35,34	
02.2.01.02.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	185.200.000,00	65.450.000,00	(119.750.000,00)	35,34	
02.2.01.02.5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	182.200.000,00	65.450.000,00	(116.750.000,00)	35,92	
02.2.01.02.5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	0	
02.2.01.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.400.854.000,00	346.543.270,00	(1.054.310.730,00)	24,74	
02.2.01.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.400.854.000,00	346.543.270,00	(1.054.310.730,00)	24,74	
02.2.01.02.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.400.854.000,00	346.543.270,00	(1.054.310.730,00)	24,74	
02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	2.542.148.000,00	1.850.463.496,00	(691.684.504,00)	72,79	
02.2.01.03.5.1	BELANJA OPERASI	2.542.148.000,00	1.850.463.496,00	(691.684.504,00)	72,79	
02.2.01.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.542.148.000,00	1.850.463.496,00	(691.684.504,00)	72,79	
02.2.01.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.664.600.000,00	1.345.000.000,00	(319.600.000,00)	80,80	
02.2.01.03.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	89.600.000,00	0,00	(89.600.000,00)	0	
02.2.01.03.5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	89.600.000,00	0,00	(89.600.000,00)	0	
02.2.01.03.5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.575.000.000,00	1.345.000.000,00	(230.000.000,00)	85,40	
02.2.01.03.5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	1.575.000.000,00	1.345.000.000,00	(230.000.000,00)	85,40	



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.01.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	877.548.000,00	505.463.496,00	(372.084.504,00)	57,60	
02.2.01.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	877.548.000,00	505.463.496,00	(372.084.504,00)	57,60	
02.2.01.03.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	877.548.000,00	505.463.496,00	(372.084.504,00)	57,60	
02.2.01.04	Fasilitas Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	600.000.000,00	591.611.000,00	(8.389.000,00)	98,60	
02.2.01.04.5.1	BELANJA OPERASI	600.000.000,00	591.611.000,00	(8.389.000,00)	98,60	
02.2.01.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000.000,00	591.611.000,00	(8.389.000,00)	98,60	
02.2.01.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	600.000.000,00	591.611.000,00	(8.389.000,00)	98,60	
02.2.01.04.5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	600.000.000,00	591.611.000,00	(8.389.000,00)	98,60	
02.2.01.04.5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	600.000.000,00	591.611.000,00	(8.389.000,00)	98,60	
02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	1.715.666.000,00	709.379.669,00	(1.006.286.331,00)	41,35	
02.2.02.03	Pembahasan APBD	1.715.666.000,00	709.379.669,00	(1.006.286.331,00)	41,35	
02.2.02.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.715.666.000,00	709.379.669,00	(1.006.286.331,00)	41,35	
02.2.02.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.715.666.000,00	709.379.669,00	(1.006.286.331,00)	41,35	
02.2.02.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.715.666.000,00	709.379.669,00	(1.006.286.331,00)	41,35	
02.2.02.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.715.666.000,00	709.379.669,00	(1.006.286.331,00)	41,35	
02.2.02.03.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.715.666.000,00	709.379.669,00	(1.006.286.331,00)	41,35	
02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	7.648.866.000,00	4.391.396.617,00	(3.257.469.383,00)	57,41	
02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	7.648.866.000,00	4.391.396.617,00	(3.257.469.383,00)	57,41	
02.2.03.01.5.1	BELANJA OPERASI	7.648.866.000,00	4.391.396.617,00	(3.257.469.383,00)	57,41	
02.2.03.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.648.866.000,00	4.391.396.617,00	(3.257.469.383,00)	57,41	
02.2.03.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	7.648.866.000,00	4.391.396.617,00	(3.257.469.383,00)	57,41	
02.2.03.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.648.866.000,00	4.391.396.617,00	(3.257.469.383,00)	57,41	
02.2.03.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.648.866.000,00	4.391.396.617,00	(3.257.469.383,00)	57,41	
02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	10.308.390.000,00	8.908.466.834,00	(1.399.923.166,00)	86,42	
02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	2.961.334.000,00	1.861.663.834,00	(1.099.670.166,00)	62,87	
02.2.04.02.5.1	BELANJA OPERASI	2.961.334.000,00	1.861.663.834,00	(1.099.670.166,00)	62,87	
02.2.04.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.961.334.000,00	1.861.663.834,00	(1.099.670.166,00)	62,87	
02.2.04.02.5.1.02.02	Belanja Jasa	1.552.500.000,00	1.306.500.000,00	(246.000.000,00)	84,15	
02.2.04.02.5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.552.500.000,00	1.306.500.000,00	(246.000.000,00)	84,15	
02.2.04.02.5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	675.000.000,00	631.000.000,00	(44.000.000,00)	93,48	
02.2.04.02.5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	877.500.000,00	675.500.000,00	(202.000.000,00)	76,98	
02.2.04.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.408.834.000,00	555.163.834,00	(853.670.166,00)	39,41	
02.2.04.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.408.834.000,00	555.163.834,00	(853.670.166,00)	39,41	
02.2.04.02.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.408.834.000,00	555.163.834,00	(853.670.166,00)	39,41	
02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	6.630.206.000,00	6.528.029.000,00	(102.177.000,00)	98,46	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
02.2.04.03.5.1	BELANJA OPERASI	6.628.705.000,00	6.528.029.000,00	(100.677.000,00)	98,48	
02.2.04.03.5.1.01	Belanja Pegawai	680.000,00	0,00	(680.000,00)	0	
02.2.04.03.5.1.01.03	Tambahan Penhasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	680.000,00	0,00	(680.000,00)	0	
02.2.04.03.5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	680.000,00	0,00	(680.000,00)	0	
02.2.04.03.5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	680.000,00	0,00	(680.000,00)	0	
02.2.04.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.628.026.000,00	6.528.029.000,00	(99.997.000,00)	98,49	
02.2.04.03.5.1.02.01	Belanja Barang	528.486.000,00	452.959.000,00	(75.527.000,00)	85,71	
02.2.04.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	528.486.000,00	452.959.000,00	(75.527.000,00)	85,71	
02.2.04.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	212.491.000,00	191.468.000,00	(21.023.000,00)	90,11	
02.2.04.03.5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5.245.000,00	2.748.000,00	(2.497.000,00)	52,39	
02.2.04.03.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	310.750.000,00	258.743.000,00	(52.007.000,00)	83,26	
02.2.04.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	6.089.540.000,00	6.075.070.000,00	(14.470.000,00)	99,76	
02.2.04.03.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	6.082.040.000,00	6.067.570.000,00	(14.470.000,00)	99,76	
02.2.04.03.5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	18.400.000,00	18.400.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.03.5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame Film, dan Promofreilan	6.063.640.000,00	6.049.170.000,00	(14.470.000,00)	99,76	
02.2.04.03.5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.03.5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.03.5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0	
02.2.04.03.5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0	
02.2.04.03.5.1.02.03.03.0062	Belanja Pemeliharaan Tugu/Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0	
02.2.04.03.5.2	BELANJA MODAL	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	0	
02.2.04.03.5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	0	
02.2.04.03.5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	0	
02.2.04.03.5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	0	
02.2.04.03.5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	0	
02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	0	
02.2.04.04.5.1	BELANJA OPERASI	398.850.000,00	212.774.000,00	(186.076.000,00)	53,35	
02.2.04.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	398.850.000,00	212.774.000,00	(186.076.000,00)	53,35	
02.2.04.04.5.1.02.01	Belanja Jasa	398.850.000,00	212.774.000,00	(186.076.000,00)	53,35	
02.2.04.04.5.1.02.01.0003	Belanja Jasa Kantor	398.850.000,00	212.774.000,00	(186.076.000,00)	53,35	
02.2.04.04.5.1.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	198.850.000,00	15.150.000,00	(183.700.000,00)	7,62	
		182.850.000,00	15.150.000,00	(167.700.000,00)	8,29	





KODE	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG		DASAR HUKUM
			REALISASI	(Rp)	
02.2.04.04.5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	16.000.000,00	0,00	(16.000.000,00)	0
02.2.04.04.5.1.02.02.39	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	200.000.000,00	197.624.000,00	(2.376.000,00)	96,81
02.2.04.04.5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	200.000.000,00	197.624.000,00	(2.376.000,00)	96,81
02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	318.300.000,00	306.000.000,00	(12.000.000,00)	96,23
02.2.04.05.5.1	BELANJA OPERASI	318.000.000,00	306.000.000,00	(12.000.000,00)	96,23
02.2.04.05.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	318.000.000,00	306.000.000,00	(12.000.000,00)	96,23
02.2.04.05.5.1.02.02	Belanja Jasa	318.000.000,00	306.000.000,00	(12.000.000,00)	96,23
02.2.04.05.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	318.000.000,00	306.000.000,00	(12.000.000,00)	96,23
02.2.04.05.5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	318.000.000,00	306.000.000,00	(12.000.000,00)	96,23
02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.926.249.000,00	1.708.274.000,00	(217.975.000,00)	88,68
02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	0
02.2.05.01.5.1	BELANJA OPERASI	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	0
02.2.05.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	0
02.2.05.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	0
02.2.05.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	0
02.2.05.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	0
02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	1.922.499.000,00	1.708.274.000,00	(214.225.000,00)	88,86
02.2.05.03.5.1	BELANJA OPERASI	1.922.499.000,00	1.708.274.000,00	(214.225.000,00)	88,86
02.2.05.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.922.499.000,00	1.708.274.000,00	(214.225.000,00)	88,86
02.2.05.03.5.1.02.01	Belanja Barang	1.134.234.000,00	1.109.150.000,00	(25.084.000,00)	97,79
02.2.05.03.5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.134.234.000,00	1.109.150.000,00	(25.084.000,00)	97,79
02.2.05.03.5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.984.000,00	0,00	(6.984.000,00)	0
02.2.05.03.5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	54.000.000,00	51.800.000,00	(2.200.000,00)	95,93
02.2.05.03.5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.073.250.000,00	1.057.350.000,00	(15.900.000,00)	98,52
02.2.05.03.5.1.02.02	Belanja Jasa	788.265.000,00	599.124.000,00	(189.141.000,00)	76,01
02.2.05.03.5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	583.065.000,00	494.124.000,00	(88.941.000,00)	84,75
02.2.05.03.5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	188.325.000,00	180.124.000,00	(8.201.000,00)	95,65
02.2.05.03.5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	394.740.000,00	314.000.000,00	(80.740.000,00)	79,55
02.2.05.03.5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	205.200.000,00	105.000.000,00	(100.200.000,00)	51,17
02.2.05.03.5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	205.200.000,00	105.000.000,00	(100.200.000,00)	51,17
02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	350.634.000,00	151.507.970,00	(199.126.030,00)	43,21
02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	350.634.000,00	151.507.970,00	(199.126.030,00)	43,21
02.2.06.02.5.1	BELANJA OPERASI	350.634.000,00	151.507.970,00	(199.126.030,00)	43,21

KODE	URAIAN	Jumlah (Rp)	REALISASI	BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
				(Rp)	(%)	
02.2.06.02.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.634.000,00	151.507.970,00	(199.126.030,00)	43,21	
02.2.06.02.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	350.634.000,00	151.507.970,00	(199.126.030,00)	43,21	
02.2.06.02.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	350.634.000,00	151.507.970,00	(199.126.030,00)	43,21	
02.2.06.02.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	350.634.000,00	151.507.970,00	(199.126.030,00)	43,21	
02.2.08	Fasilitas/ Tugas DPRD	11.526.577.000,00	4.736.665.841,00	(6.789.911.159,00)	41,09	
02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	2.220.168.000,00	861.271.843,00	(1.358.896.157,00)	38,79	
02.2.08.01.5.1	BELANJA OPERASI	2.220.168.000,00	861.271.843,00	(1.358.896.157,00)	38,79	
02.2.08.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.220.168.000,00	861.271.843,00	(1.358.896.157,00)	38,79	
02.2.08.01.5.1.02.02	Belanja Jasa	90.000.000,00	0,00	(90.000.000,00)	0	
02.2.08.01.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	90.000.000,00	0,00	(90.000.000,00)	0	
02.2.08.01.5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	90.000.000,00	0,00	(90.000.000,00)	0	
02.2.08.01.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.130.168.000,00	861.271.843,00	(1.268.896.157,00)	40,43	
02.2.08.01.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.130.168.000,00	861.271.843,00	(1.268.896.157,00)	40,43	
02.2.08.01.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.130.168.000,00	861.271.843,00	(1.268.896.157,00)	40,43	
02.2.08.03	Fasilitas Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	3.066.074.000,00	1.388.215.518,00	(1.677.858.482,00)	45,28	
02.2.08.03.5.1	BELANJA OPERASI	3.066.074.000,00	1.388.215.518,00	(1.677.858.482,00)	45,28	
02.2.08.03.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.066.074.000,00	1.388.215.518,00	(1.677.858.482,00)	45,28	
02.2.08.03.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	3.066.074.000,00	1.388.215.518,00	(1.677.858.482,00)	45,28	
02.2.08.03.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.066.074.000,00	1.388.215.518,00	(1.677.858.482,00)	45,28	
02.2.08.03.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.066.074.000,00	1.388.215.518,00	(1.677.858.482,00)	45,28	
02.2.08.04	Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD	6.240.335.000,00	2.487.178.580,00	(3.753.156.420,00)	39,86	
02.2.08.04.5.1	BELANJA OPERASI	6.240.335.000,00	2.487.178.580,00	(3.753.156.420,00)	39,86	
02.2.08.04.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.240.335.000,00	2.487.178.580,00	(3.753.156.420,00)	39,86	
02.2.08.04.5.1.02.02	Belanja Jasa	3.000.000,00	1.000.000,00	(2.000.000,00)	33,33	
02.2.08.04.5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	1.000.000,00	(2.000.000,00)	33,33	
02.2.08.04.5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	3.000.000,00	1.000.000,00	(2.000.000,00)	33,33	
02.2.08.04.5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	6.237.335.000,00	2.486.178.580,00	(3.751.156.420,00)	39,86	
02.2.08.04.5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.237.335.000,00	2.486.178.580,00	(3.751.156.420,00)	39,86	
02.2.08.04.5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.237.335.000,00	2.486.178.580,00	(3.751.156.420,00)	39,86	
		(95.182.188.176,00)	(75.935.587.850,00)	19.246.600.326,00	0	
	SURPLUS / DEFISIT	(95.182.188.176,00)	(75.935.587.850,00)	19.246.600.326,00	0	
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN					





PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD
SKPD : 4-02.0-00.0-00.01 SEKRETARIAT DPRD
Unit Organisasi : 4-02.0-00.0-00.01.000 SEKRETARIAT DPRD
Sub Unit Organisasi : 4-02.0-00.0-00.01.000.000 SEKRETARIAT DPRD

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
5	BELANJA DAERAH	95.182.188.176,00	75.935.587.850,00	79,78	69.188.997.424,00
5.1	BELANJA OPERASI	88.324.418.690,00	69.531.153.433,00	78,72	56.771.011.112,00
5.1.01	Belanja Pegawai	39.412.525.000,00	37.260.060.579,00	94,54	35.374.193.719,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.911.893.690,00	32.271.092.854,00	65,98	21.396.817.393,00
5.2	BELANJA MODAL	6.857.769.486,00	6.404.434.417,00	93,39	12.417.986.312,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.979.387.900,00	2.806.633.284,00	94,20	5.397.203.361,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.870.909.586,00	3.590.372.133,00	92,75	7.020.782.951,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.472.000,00	7.429.000,00	99,42	0,00
	SURPLUS / DEFISIT	(95.182.188.176,00)	(75.935.587.850,00)	0	(69.188.997.424,00)
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(95.182.188.176,00)	(75.935.587.850,00)	0	(69.188.997.424,00)

